

**PENGEMBANGAN SUMBERDAYA EKONOMI LOKAL
BERBASIS MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
(Studi Pada Peran Aktor di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa
Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:

SITI ZUMROTUL AINIYAH

NIM. 115030101111087



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2015

MOTTO

“Setiap Langkah demi Langkah yang di jalani manusia adalah sebuah tahap demi tahap pembelajaran untuk mencapai rasa syukur yang tulus dan ikhlas kepada Nya. Atas RidhoNya melalui Doa Orang Tua Yang senantiasa ikhlas menjadi Jalan terang dalam melangkah”



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2015
Jam : 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Siti Zumrotul Ainiyah
Judul : Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi Pada Peran Aktor di Desa Tasikagung Rembang Jawa Tengah)

Dan dinyatakan LULUS

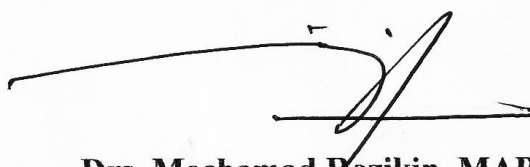
MAJELIS PENGUJI

Ketua



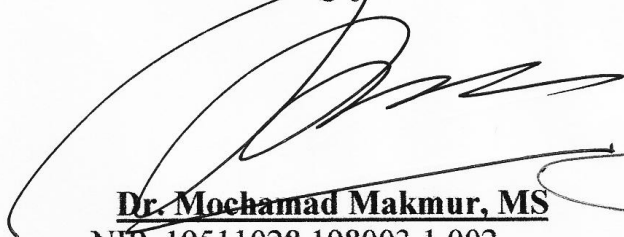
Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



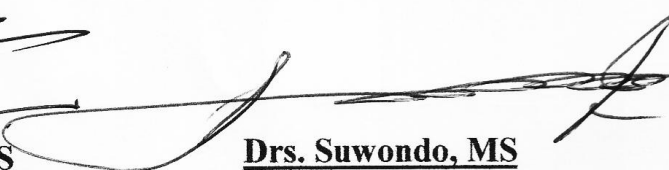
Drs. Mochamad Rozikin, MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

Penguji I



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Penguji II



Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 21 Januari 2015

Mahasiswa



Nama : Siti Zumrotul Ainayah

NIM : 115030101111087

RINGKASAN

Siti Zumrotul Ainiyah **Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi Pada Peran Aktor Di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah)** Dr.Abdullah Said,M.Si-Drs.
Mochamad Rozikin, M.AP (Hal.181,+xv)

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi sektor perikanan tangkap. Hal tersebut dapat dilihat hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Rembang yang tinggi. Salah satu wilayah yang memiliki potensi bidang perikanan tangkap di Kabupaten Rembang adalah Desa Tasikagung Rembang. Lokasi ini memiliki letak strategis dan penataan ruang yang hampir tertata dengan baik dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Namun sayangnya wilayah tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap sesuai dengan program nasional penetapan kawasan minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan ekonomi pada sektor ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari Aktor/*stakeholder* yang memiliki kapasitas dalam melakukan pembangunan di kawasan tersebut sehingga perlu dilakukan strategi pengembangan dengan menggunakan pendekatan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal (LERD).

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan fokus yaitu: Peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap dimana didalamnya tentang regulasi, aktor pelaksana, pelaksanaan pengembangan, serta koordinasi antar aktor. Selain itu yang menjadi fokus yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap.

Hasil penelitian bahwa pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan di Desa Tasikagung Rembang berjalan dengan baik. Desa Tasikagung memiliki karakteristik wilayah sesuai dengan kriteria kawasan minapolitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan. Dukungan peran dan kontribusi aktor yang ada di dalamnya juga menunjukkan dukungan positif. Aktor yang berperan dilokasi penelitian adalah : 1) Masyarakat lokal 2) pelaku usaha lokal 3) Pelaku usaha baru 4)Koperasi 5) Lembaga keuangan di daerah 6) Perguruan tinggi serta 7) Pemerintah daerah. Berdasarkan Konsep LERD, di lokasi penelitian belum memiliki BUMD yang khusus menangani sektor perikanan tangkap. Selain itu juga terdapat faktor pendukung diantaranya adalah ketersediaan sumberdaya manusia perikanan yang memadai, peluang untuk didatangi oleh nelayan luar wilayah, serta adanya upaya terhadap pelestarian lingkungan di sekitar kawasan minapolitan Desa Tasikagung. Selain faktor pendukung terdapat pula faktor

penghambat yaitu belum memiliki BUMD yang menangani khusus perikanan tangkap, kebutuhan BBM yang kurang mencukupi, serta masing adanya kesepakatan yang belum formal sehingga sering terjadi pengulangan permasalahan yang sama.

Untuk meningkatkan upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan di Desa Tasikagung segera dibentuk BUMD khusus bidang perikanan tangkap dan segera untuk membentuk setiap kesepakatan yang dibuat secara formal agar tidak terjadi permasalahan yang sama serta meningkatkan upaya pemenuhan akan kebutuhan dasar *stakholder* tingkat lapang.

Keyword: LERD, Minapolitan, Peran aktor.



SUMMARY

Siti Zumrotul Ainiyah **Resources Development Of Local Economic Fisheries Based Minapolitan Catch (Study In The Role Of Actors In The Village Of Tasikagung Rembang District Central Java)** Dr.Abdullah Said,M.Si-Drs. Mochamad Rozikin, M.AP (Hal.181,+xv)

Rembang district is one of the districts in central java who has the potential of the fisheries sector catch. This can be seen the results of fisheries production catch rembang district high. One of the areas that have the potential to grab the field of fisheries in the rembang district is a village rembang Tasikagung. This location having strategic location and spatial arrangement which almost well-ordered and having enough facilities. But unfortunately these areas not yet been set as the area of fisheries minapolitan catch in accordance with national program area minapolitan the determination by the ministry of fisheries and maritime affairs. Economic development in these sectors requires a commitment from the actor/ stakeholders have the capacity to make the development in the area that needs to be a strategy of using the Local Economy Resource Development (LERD).

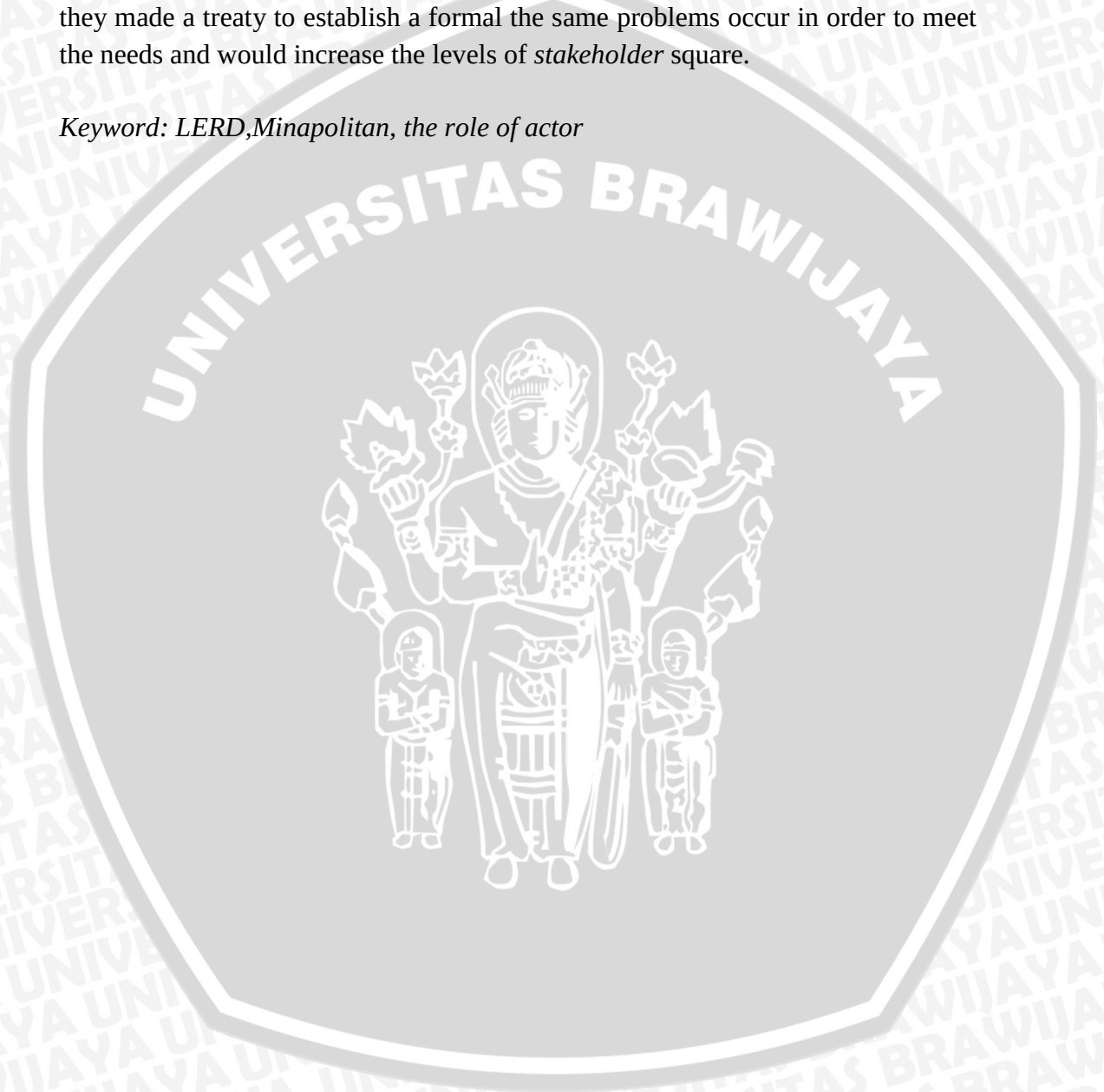
The study is done using the kind of research descriptive with a qualitative approach . This research using focus namely: the role of actors in the development of economy resource local fishery based minapolitan catch where therein about regulations , implementing actor , the implementation of development , as well as coordination between actors . In addition become the focus of supporters namely factors and inhibitors in the development of economy resource local fishery based minapolitan catch .

The results of research that the development of local economic resources in the area in the village the rembang tasikagung minapolitan run well . Village tasikagung having the characteristics of the region in accordance with criteria minapolitan area in accordance with the minister for fisheries and marine 2010 on minapolitan number 12 years . Support the role and kotribusi actor who were in it also show positive support . An actor who had a role dilokasi research are: 1) locals 2) local business operators 3) new business operators 4) cooperatives 5) financial institutions in the 6) college, 7) local governments . LERD based on the concept , in the research locations BUMD which specializes in handling do not have the fisheries sector get . In addition there are also by factors in support of them are the availability of adequate human resources fisheries , the chance to other areas were visited by fishermen , and that there were attempts towards the environmental conservation area around the village minapolitan in Tasikagung. In

addition to supporting factors there is also a factor of a barrier that is not yet having bund who handles special fisheries catch, fuel needs to be inadequate, and each of the agreement formal not so frequent repetition of similar problems .

Efforts to improve the economic resources and development in the local village minapolitan Tasikagung fishery sector plan to set up a special capture, and they made a treaty to establish a formal the same problems occur in order to meet the needs and would increase the levels of *stakeholder* square.

Keyword: LERD,Minapolitan, the role of actor



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mochamad Rozikin, M.AP selaku anggota komisi pembimbing sekaligus sebagai Bapak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban skripsi ini sepenuh hati dan dengan hasil yang terbaik.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
1. Kontribusi Akademis.....	13
2. Kontribusi Praktis.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 16
A. Administrasi Publik.....	16
B. Administrasi Pembangunan.....	19
C. Pembangunan di Era Otonomi Daerah.....	21
1. Fungsi Pemerintah Era Otonomi Daerah.....	21
2. Paradigma Pembangunan.....	24
3. Konsep Pengembangan.....	25
4. Pembangunan di Era Otonomi Daerah.....	27
D. Pembangunan Ekonomi Lokal (<i>Local Economic Development</i>).....	28
1. Definisi <i>Local Economic Development</i> (LED).....	28
2. Strategi Pengembangan Sumber-Sumber Potensi Daerah.....	30
3. Kelembagaan dan Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal.....	33
4. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Daerah.....	37

E. Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap.....	39
1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.....	39
2. Pelabuhan Perikanan.....	43
F. Minapolitan.....	45
1. Konsep Minapolitan.....	45
2. Dasar Hukum Minapolitan.....	47
3. Prinsip Minapolitan.....	47
4. Azas dan Basis Minapolitan.....	49
5. Tujuan dan Sasaran Minapolitan.....	50
6. Konsep Perencanaan Minapolitan.....	51
7. Sistem Dan Mata Rantai Produksi Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Fokus Penelitian.....	60
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	62
D. Sumber dan Jenis Data.....	63
1. Sumber Data.....	63
2. Jenis Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Instrumen Penelitian.....	66
G. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Kabupaten Rembang.....	70
a. Sejarah Maritim Kabupaten Rembang.....	70
b. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang.....	75
c. Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	76
2. Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.....	78
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	80
1. Peran Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.....	80
a. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah.....	91
b. Pelaksanaan Peran Pelaku Usaha Lokal dan Pelaku Usaha Baru.....	101
c. Pelaksanaan Peran Masyarakat Lokal.....	109
d. Pelaksanaan Peran Koperasi.....	119
e. Pelaksanaan Peran Lembaga Keuangan di Daerah.....	120
f. Pelaksanaan Peran Perguruan Tinggi.....	121
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Tasikagung Rembang.....	123

a. Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	123
b. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	125
C. Pembahasan.....	127
1. Peran Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.....	127
a. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah.....	138
b. Pelaksanaan Peran Pelaku Usaha Lokal dan Pelaku Usaha Baru.....	143
c. Pelaksanaan Peran Masyarakat Lokal.....	150
d. Pelaksanaan Peran Koperasi.....	163
e. Pelaksanaan Peran Lembaga Keuangan Di Daerah.....	167
f. Pelaksanaan Peran Perguruan Tinggi.....	168
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Tasikagung Rembang.....	170
a. Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	170
b. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	173
BAB V PENUTUP.....	175
1. Kesimpulan.....	175
2. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....	179

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Jawa Tengah Tahun 2005-2009.....	5
Tabel 2. Analisis Fokus, Kelemahan, dan Kelebihan <i>Local Economic Development (LED)</i>	29
Tabel 3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan menurut Klasifikasi/karakteristik Pelabuhan.....	44
Tabel 4. Detail kegiatan dalam setiap tahapan dari program pengembangan kawasan minapolitan.....	53
Tabel 5. Jumlah Nelayan di Wilayah Kabupaten Rembang.....	77
Tabel 6. Jumlah Bakul Ikan di Kabupaten Rembang.....	77
Tabel 7. Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2011.....	78
Tabel 8. Rincian Aktor yang terlibat dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Tasikagung Rembang.....	88
Tabel 9. Fasilitas yang ada di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Tasikagung.....	93
Tabel 10. Uraian Kebutuhan Nelayan Saat Melakukan Proses Penangkapan Ikan.....	107
Tabel 11. Pengelolaan SDM dan Pengelolaan Kapal.....	112
Tabel 12. Jenis dan Kriteria Kapal yang Melakukan Aktivitas di Pelabuhan Tasikagung Rembang.....	113
Tabel 13. Alokasi Retribusi Hasil Perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kelembagaan dan Aktor Pengembangan Ekonomi Lokal.....	34
Gambar 2. Integrasi Pembangunan Perikanan.....	41
Gambar 3. Program Minapolitan terdiri dari 9 (Sembilan) urutan langkah, 5 (lima) langkah diantaranya dilakukan secara siklik dan dinamis.....	52
Gambar 4. Ilustrasi Denah kawasan minapolitan perikanan tangkap.....	56
Gambar 5. Skema model analisis data Seidel.....	68
Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Rembang	75
Gambar 7. Breakwater.....	92
Gambar 8. Acara Sosialisasi Perizinan Usaha Perikanan.....	99
Gambar 9. Unit Pemindangan Ikan.....	103
Gambar 10. Produk Unit Usaha Penjualan Ikan.....	104
Gambar 11. Proses Pelelangan Ikan Hingga Pemasaran (Alir Produksi).....	156
Gambar 12. Suasana Lelang Di TPI Tasikagung Rembang.....	158
Gambar 13. Proses Pembayaran Nelayan Dan Bakul Ikan (Alir Administrasi) Di TPI Tasikagung Rembang.....	159
Gambar 14. Surat Permintaan Uang (SPU) yang dikelola KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang	160
Gambar 15. Surat Permintaan Uang (SPU) yang dikeluarkan Dinlutkan Kabupaten Rembang.....	161

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Riset Dari Fakultas Ilmu Administrasi Kepada Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Rembang
- Lampiran 2. Surat Pengantar Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi Kepada Kepala Desa Tasikagung Rembang
- Lampiran 3. Surat Ijin penelitian dari Kantor Kecamatan Rembang
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Lampiran 5. Contoh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- Lampiran 6. Contoh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Lampiran 7. Contoh surat Rekomendasi Kebutuhan BBM Untuk Usaha Perikanan
- Lampiran 8. Contoh Surat Rekomendasi Kebutuhan dan Angkutan Khusus BBM Bersubsidi Di Kabupaten Rembang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar, saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi masalah dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan dengan program strategis dan efektif. Menurut *United nations environment Program*–UneP (2003) dalam Kementerian Pekerjaan Umum (2012) menyatakan bahwa wilayah Indonesia yang terbentang di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik memiliki luas keseluruhan sebesar 7,9 juta km. Luas daratan sebesar 22% atau 1,8 juta km sedangkan luas perairannya mencapai 77% dari luas keseluruhan atau 6,1 juta km. Luas perairan tersebut terbagi atas laut teritorial seluas 3,2 juta km (terluas di dunia) dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,9 juta km (terluas ke-12 di dunia). Melihat kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Berdasarkan prakiraan para pakar dan lembaga terkait di tahun 2009 terhadap nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia, hasilnya mencapai 149,94 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,994

triliun. Nilai tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dolar AS, wilayah pesisir lestari 65 miliar dolar AS, bioteknologi laut 40 miliar dolar AS, wisata bahari 2 miliar dolar AS, minyak bumi 6,64 miliar dolar AS, dan transportasi laut sebesar 20 miliar dolar AS.

Sementara itu *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam Kementerian Pekerjaan Umum (2012) menyebutkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar didunia. Hal ini berdasarkan data di tahun 2006 yang menunjukkan bobot produksi ikan Indonesia mencapai 87,1 juta ton. Hasil tangkapan laut Indonesia mencapai 52% dari hasil keseluruhan tangkapan laut dunia. Selain potensi kekayaan laut, perairan Indonesia juga memiliki andil besar dalam perdagangan dunia. Lebih dari 80% perdagangan dunia dengan nilai lebih dari 500 miliar dolar AS (tahun 2006) berlangsung melalui laut.

Oleh karena itu, keberadaan negara maritim seperti Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Potensi besar dari perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dari sektor kelautan. Namun, pengembangan sektor kelautan ini masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari para pemegang kebijakan. Akibatnya, potensi kelautan Indonesia belum diolah secara maksimal sehingga sektor kelautan belum mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Hal ini berujung pada belum tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, khususnya para nelayan.

Hal tersebut tampak pada penjabaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pedoman Umum Minapolitan 2011. Luas lautan Indonesia yang jumlahnya

mencapai 2/3 dari luas keseluruhan hanya memberikan *Product Domestic Bruto* (PDB) perikanan sebesar 3,2%. Disamping itu potensi sumberdaya perikanan tangkap Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun, tetapi masih banyak nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Lebih dari separuh (50%) jumlah nelayan yaitu 2.755.794 orang (nelayan laut dan perairan umum), masih berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan. Sementara itu, jumlah nelayan terus mengalami peningkatan seperti di tahun 2006-2007 terjadi peningkatan jumlah nelayan sebesar 2,06%. Sementara itu Daryanto sebagaimana yang dikutip oleh Ulum (2013) menyatakan bahwa:

“Sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya penting bagi hajat hidup masyarakat yang bisa dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa: *Pertama*, Besarnya potensi perikanan Indonesia, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. *Kedua*, Industri disektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat wilayah disekitarnya. *Ketiga*, perikanan Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) yang tinggi”.

Kondisi ini melatarbelakangi upaya-upaya untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama para nelayan. Untuk itu diperlukan perubahan cara berpikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim dengan konsep pengembangan ekonomi lokal dan gerakan yang mendasar dan cepat. Perubahan ini disebut dengan Revolusi Biru. Revolusi Biru pun diimplementasikan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah yang menggunakan Konsep Minapolitan.

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui berbagai kebijakan, antara lain adalah dengan ditetapkannya konsepsi minapolitan. Konsepsi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Pada Peraturan Menteri tersebut, minapolitan didefinisikan sebagai sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian pada dasarnya kawasan minapolitan merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional. Konsepsi minapolitan dilaksanakan dengan tujuan bahwa mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah.

Kabupaten Rembang memiliki sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka mengelola potensi daerah. Hal ini merupakan implementasi dari UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbarui dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sektor-sektor yang ada kemudian dikembangkan seoptimal mungkin.

Ada beberapa sektor yang menjadi unggulan salah satu diantaranya adalah sektor perikanan laut. Dengan panjang pantai 63,5 km maka Kabupaten Rembang mempunyai potensi laut yang dapat dikembangkan.

Tabel 1. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (Ton/Tahun)

Kabupaten/Kota	tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kabupaten Brebes	4.376	1.774	1.325	2.386	2.504,00
Kabupaten Tegal	341	494	389	435	588,00
Kota Tegal	23.519	20.816	20.783	20.962	25.231,00
Kabupaten Pemalang	12.821	14.472	10.058	10.792	11.014,00
Kabupaten Pekalongan	1.752	1.843	1.551	1.715	1.764,00
Kota Pekalongan	47.695	34.642	31.477	31.675	33.045,00
Kabupaten Batang	12.049	20.293	18.455	22.854	23.296,00
Kabupaten Kendal	1.569	1.064	1.186	1.312	1.531,00
Kota Semarang	37	68	58	164	175,00
Kabupaten Demak	1.918	1.091	986	1.810	1.904,00
Kabupaten Jepara	5.813	5.741	5.858	5.940	5.993,00
Kabupaten Pati	34.895	22.480	24.120	31.067	31.132,00
Kabupaten Rembang	37.229	40.576	27.057	32.372	40.449,00
Kabupaten Wonogiri	19	20	19	21	24,00
Kabupaten Purworejo	19	31	41	54	67,00
Kabupaten Kebumen	918	1.398	1.974	2.244	2.249,00
Kabupaten Cilacap	7.616	11.180	8.354	9.029	14.667,00
Total	192.586	177.983	153.691	174.832	195.633,00

Sumber: www.diskanlut-jateng.go.id, 2014.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan laut yang melimpah dimana ditunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap kabupaten Rembang merupakan produksi yang terbesar di Jawa Tengah sehingga berpeluang untuk dilaksanakan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap. Dalam hal ini minapolitan memiliki dua unsur utama yaitu minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan

sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010).

Sektor perikanan yang mencakup bidang kelautan dan perikanan merupakan sektor yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan sektor inilah yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang. Sektor kelautan dan perikanan terutama perikanan tangkap ini dapat dikatakan sebagai sektor yang paling diunggulkan dewasa ini oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Upaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang, maka diperlukan peran dari seluruh stakeholder terkait, dalam hal ini masyarakat kelautan dan perikanan, dan juga institusi pemerintah yang menangani bidang ini. Institusi pemerintah yang berperan besar dalam pengembangan sektor ini seoptimal mungkin adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Masyarakat desa Tasikagung Kecamatan Rembang, serta aktor/stakeholder terkait yang memiliki kontribusi peran. Untuk mewujudkan optimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, pemerintah kabupaten Rembang telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kondisi sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan.

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang pada tahun 2013 diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi kepada kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan

perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries management*). Kebijakan ini dititikberatkan pada beberapa aspek utama, diantaranya melalui pengembangan produksi perikanan laut dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan, Pengembangan sumberdaya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan kelembagaan bidang perikanan serta peningkatan kerjasama dan membangun sinergitas antar sektor dalam pengembangan kawasan pesisir.

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan dalam kerangka penvapaian program bidang kelautan dan perikanan yang mencakup program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, serta program kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan telah dirasakan mengalami perkembangan positif yang terindikasi dari tingkat capaian kerja sebagai berikut: (1) Produksi perikanan mencapai 57.369,58 ton (95,91%) dari yang ditargetkan sebesar 59.819 ton. (2) Target konsumsi ikan perkapita sebesar 24 kg telah tercapai 27,27 kg yang berarti tingkat capaian sebesar 113%. (3) Keseluruhan dana APBD kabupaten rembang yang dialokasikan untuk penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2013 sebesar Rp 24.977.559.500,- dengan realisasi keuangan mencapai 52,63%. (LKPJ Kabupaten Rembang Tahun, 2014).

Melihat seluruh aktivitas perikanan di seluruh Kabupaten Rembang, lokasi terbesar kegiatan perekonomian bidang perikanan tangkap terletak di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Masyarakat di Desa Tasikagung ini hampir seluruh masyarakatnya merupakan pekerja di bidang kelautan dan perikanan. Masyarakat dari daerah diluar desa Tasikagung juga banyak yang bekerja pada bidang pekerjaan yang sama dilokasi tersebut. Terdapat sarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan ditunjang 10 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diseluruh wilayah kabupaten Rembang. Selain Sarana pelabuhan dan pelelangan ikan, sumber daya manusia yang ada juga sangat menunjang. Data dari seluruh wilayah di Kabupaten Rembang pada tahun 2014, jumlah nelayan sebanyak 20.482 orang, bakul ikan sebanyak 1.486 orang, dan sebanyak 21.167 orang pemilik usaha dan pekerja pada industri pengolahan hasil perikanan. Selain sarana dan sumberdaya manusia terdapat juga sejumlah 9.385 alat penangkapan dan 4.666 armada kapal (Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014).

Kenyataan bahwa konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu. melalui pendekatan sentra produksi, sumberdaya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana

dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat.

Kemudian berdasarkan konsep minapolitan yang ada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang belum dapat dilakukan sesuai dengan pedoman dasar pelaksanaan minapolitan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan mengingat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.35/Men/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dimana Kabupaten Rembang belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap. Berdasarkan kenyataan tersebut maka konsep minapolitan di kawasan Desa Tasikagung hanya dijadikan sebagai dasar pembangunan kawasan perikanan tangkap. Mengingat bahwa di Desa Tasikagung belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka konsep minapolitan dilaksanakan dengan menggunakan perspektif atau pendekatan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal atau yang lebih dikenal dengan konsep *Local Economic Resources Development* (LERD). Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas arah pengembangan ekonomi perikanan tangkap di wilayah tersebut agar tetap berkembang dan meningkatkan kapasitas industri perikanan daerah.

Definisi LERD adalah Usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah (Said, 2012). Merujuk pada konsep LERD tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam upaya

pengembangan ekonomi lokal suatu wilayah dibutuhkan kerjasama yang jelas dan terintegrasi antar aktor/*stakeholder* untuk mencapai tujuan tertentu.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi unggulan dalam sektor perikanan tangkap. Daerah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Pacitan dengan dengan keunggulan letak perairan Pacitan yang berhadapan langsung dengan laut Pasifik sehingga memiliki potensi beragam jenis ikan bernilai ekonomi tinggi. Kabupaten Banyuwangi memiliki Potensi Perikanan di Kecamatan Muncar sangatlah tinggi dimana terdapat kawasan industri perikanan antara lain jenis industri pengolahan hasil ikan antara lain industri minyak ikan, industri pengalengan ikan, industri pemindangan ikan, industri tepung ikan dan industri pengolahan ikan lainnya. dan Kabupaten Tranggalek yaitu PPN Prigi membentuk lembaga khusus yang membidangi dan memfasilitasi nelayan dalam penjualan ikan dan memperjuangkan sarana-prasarana perikanan untuk para nelayan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KEPMEN-KP/2010 tiga Kabupaten tersebut ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap. Berdasarkan penetapan tersebut pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan tangkap pada ketiga wilayah tersebut dapat berkembang dengan cepat. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan kesempatan pembangunan usaha sektor perikanan tangkap serta pembangunan infrastruktur yang berjalan relatif cepat (Musiyam, 2011).

Melihat pada keberhasilan daerah yang melakukan pengembangan potensi lokal sektor perikanan tangkap maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memiliki usaha untuk meningkatkan pengelolaan potensi tersebut diwujudkan dalam program usulan penetapan kawasan minapolitan perikanan tangkap. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebutkan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tangkap dilakukan melalui strategi program pengembangan kawasan minapolitan di Desa Tasikagung. Namun, perencanaan program tersebut hingga saat ini belum memperoleh hasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat pula permasalahan yang dialami dalam pengembangan perikanan tangkap di desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang diantaranya kurangnya daya dukung pemerintah daerah dalam sektor fasilitas terutama pembangunan sumberdaya manusia, kurangnya kontrol terhadap jumlah armada kapal yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan, minimnya persediaan bahan bakar untuk nelayan, dan terbatasnya ruang gerak pembangunan karena kendala luas wilayah.

Melihat fenomena yang terjadi, pengembangan perekonomian yang terjadi di desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang secara keseluruhan didominasi oleh masyarakat lokal. Berdasarkan keinginan, potensi, dan teori yang digunakan, maka peneliti akan melaksanakan penelitian menganalisis pengembangan sektor perikanan tangkap dengan judul **Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis**

Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi Pada Peran Aktor di Desa Tasikagung Kabupeten Rembang Jawa Tengah).

B. Perumusan Masalah

Merujuk Pada Latar Belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis Minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
2. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) baik secara teoritis maupun praktis terhadap peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis minapolitan

1. Kontribusi Akademik

- a. Sebagai sarana wacana pelaksanaan konsep minapolitan di Indonesia dengan melihat pada potensi wilayah lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya melalui perspektif *Local Economic Resources Development (LERD)*.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam Upaya pengembangan kawasan minapolitan melalui perspektif *Local Economic Resources Development (LERD)* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

2. Kontribusi Praktis

- a. Memberikan kontribusi akademis mengenai studi pengembangan kawasan ekonomi lokal. Dapat pula memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemerintah, dan swasta tentang pengembangan kawasan minapolitan dengan menggunakan perspektif *Local Economic Resources Development (LERD)*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi, dan peminat administrasi publik khususnya bidang kajian pembangunan dan ekonomi sektor publik.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam enelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yaitu bagaimana potensi perikanan laut berpeluang untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dengan perspektif *Local Economic Resources Development (LERD)*. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian dasar teori atau landasan berpijak dalam penyusunan skripsi. Terdapat satu teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Pembangunan, dalam penelitian ini lebih fokus pada konsep pembangunan ekonomi lokal. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data yang didapatkan di lapangan baik data primer maupun data sekunder.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan desain analisis data.

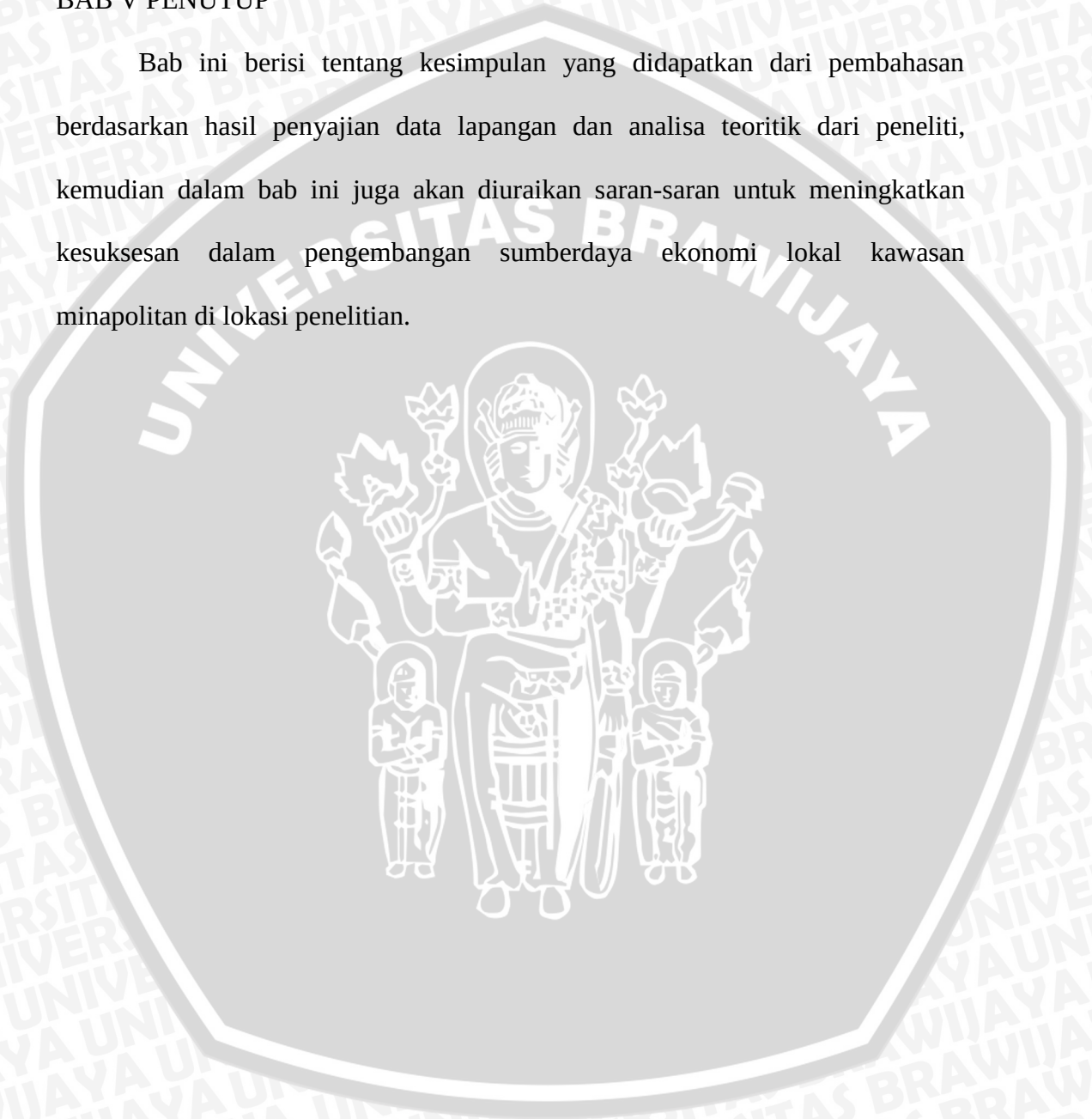
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam

rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh dianalisa berdasarkan teori yang telah ditentukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisa teoritik dari peneliti, kemudian dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran untuk meningkatkan kesuksesan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal kawasan minapolitan di lokasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Penyelenggaraan seluruh kepentingan dan masalah publik (*Public interest and public affairs*) yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik (Mindarti, 2007). Ditegaskan oleh Caiden (dalam Mindarti, 2007) administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Sementara itu Pamudji (1987) mengemukakan bahwa luasnya bidang persoalan aktivitas administrasi publik tidak hanya mencakup aktivitas lembaga eksekutif tetapi juga mencakup aktivitas yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kepublikan yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian Dimock dan Koenig (dalam Mindarti, 2007) menjelaskan pengertian paling luas administrasi publik adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, sedangkan dalam arti sempit administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan eksekutif dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Makmur (2003) yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan bentuk aksi dari pemerintahan yang merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Selanjutnya Rossenbloom (dalam Indradi, 2006) menyatakan administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat

pemerintah dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan segala bentuk aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan serta untuk mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan dan pengaturan kepada masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengertian mengenai administrasi publik dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemerintah dibutuhkan kejelasan peran aktor, penentuan akan tujuan, menetapkan sasaran serta target yang hendak dicapai dengan menggunakan sarana pemanfaatan teori-teori dan beberapa proses didalamnya. Pemahaman akan administrasi publik juga dapat dilakukan melalui karakteristiknya. Beberapa karakteristik administrasi publik menurut Makmur (2003) yaitu:

1. Administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih *urgent*.
3. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli.
4. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih banyak didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku.
5. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga pasar.

6. Administrasi publik dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.
7. Pelaksanaan dan hasil pelayanan yang dilakukan tergantung pada penilaian oleh rakyat.

Selain pada karakteristik yang telah dijabarkan diatas bahwa pemahaman akan administrasi publik dapat pula dipahami dari paradigma administrasi publik. Rosenbloom (dalam Makmur,2003) mengemukakan adanya tiga paradigma utama dalam administrasi publik yaitu:

- a. Paradigma Manajerial-yang melihat peran administrasi publik sebagai 'executive' yang tugas utamanya adalah melaksanakan segala peraturan perundangan secara patuh dan sungguh-sungguh.
- b. Paradigma Politik-yang memandang administrasi publik sebagai lembaga yang mempunyai kapasitas dalam menetapkan kebijakan publik.
- c. Paradigma Legal (Hukum)- yang memfokuskan peran administrasi publik dalam melaksanakan tugas peradilan atau menegakkan hukum.

Paradigma administrasi publik diatas untuk saat ini yang paling tepat dijadikan sebagai pendekatan adalah paradigma politik. Pandangan bahwa administrasi publik disini yang dimaksud adalah pemerintah di tempatkan sebagai sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah kesatuan beberapa orang dalam sebuah organisasi yang memiliki kapasitas dalam menetapkan sebuah kebijakan publik atau kebijakan untuk masyarakat. Kapasitas pemerintah ini mengisyaratkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil dari proses untuk mencapai tujuan tertentu kepada masyarakat. Perkembangan kajian ilmu administrasi publik kemudian berkembang lebih dalam salah satunya adalah kajian mengenai administrasi pembangunan.

B. Administrasi Pembangunan

Determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama atau sebagai *driving forces*. Siagian (2001) memisahkan pokok pengertian dari administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Siagian (2001) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian mengenai pembangunan, Siagian (2001) mendefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Berdasarkan definisi pembangunan menurut Siagian (2001) tersebut, maka jelas dapat dilihat pokok-pokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Definisi kerja (*working definition*) dari Administrasi Pembangunan menurut Siagian (2001) adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Namun sekedar perbandingan untuk dapat memberikan rumusan definisi mengenai

administrasi pembangunan tanpa mengurangi unsur yang ada maka juga harus melihat pendapat yang lain.

Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Samin, 2011) mengemukakan bahwa proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Kartasmita (dalam Samin, 2011) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Merujuk pada beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan ide pokok mengenai administrasi pembangunan yaitu :

1. Adanya suatu proses yang memberikan arti bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya administrator dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah atau negara.
3. Adanya masyarakat.
4. Perubahan dan Modernisasi. Maksudnya adalah keinginan perubahan kearah yang lebih baik yang multi dimensi, dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan juga administrasi.

Maka dengan berpedoman dan tanpa menghilangkan ke 4 (empat) pokok pemikiran diatas, maka secara sederhana mencoba merumuskan definisi

administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh administrator dalam upaya mendorong masyarakat kearah modernisasi yang multidimensional secara administratif. Proses yang dilakukan oleh administrator (pemerintah) untuk melakukan sebuah proses pembangunan juga terjadi pada masa otonomi daerah. Merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah yang secara tersurat menyatakan bahwa pemerintah tingkat daerah harus menjalankan fungsinya dalam mensejahterakan masyarakat termasuk dalam melaksanakan proses pembangunan disegala sektor kehidupan masyarakat.

C. Pembangunan di Era Otonomi Daerah

1. Fungsi Pemerintah Era Otonomi Daerah

Lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya Rasyid (2002) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah memiliki fungsi yang dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu: Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk

melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler (dalam Rasyid,2002) menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat adalah pemberdayaan. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini diartikan sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan kemandirian terutama dalam pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan primer atau sekunder. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menggali potensi masyarakat untuk memahami kebutuhan dan tantangan masa depan.

Selain memberikan pelayanan dan pemberdayaan pemerintah juga melaksanakan pembangunan. Pendapat Bryant dan White dalam Suryono (2010) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu: (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*Capacity*). (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*). (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya

(*empowerment*). (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dengan cara membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu dengan Negara lain (*interdepedence*).

Siagian dalam Suryono (2010) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Kartasmita sebagaimana dikutip Ulum (2013) mengatakan bahwa pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan berpijak pada pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kapasitasnya agar dapat meningkatkan kemampuan untuk dapat terlepas dari masalah perekonomian. Bentuk terlepasnya mereka dalam kehidupan yang lebih mandiri dan berkualitas. Peningkatan kemandirian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan peningkatan pembangunan pada skala nasional. Pembangunan suatu negara yang baik diharapkan berawal dari pembangunan manusia secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma Pembangunan menurut Tjokrowinoto (1996) sebagaimana dikutip oleh Ulum (2013) Pergeseran Paradigma pembangunan merentang mulai dari paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma dependensia, hingga paradigma pembangunan manusia. Sedangkan menurut Suryono (2010) paradigma pembangunan yang pertama adalah paradigma pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan adalah paradigma pembangunan yang hanya memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Paradigma ini berhasil meningkatkan kapital dan pendapatan perkapita negara berkembang. Selanjutnya paradigma pertumbuhan pemerataan. Paradigma ini digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan tersebut adalah: (1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP dengan meningkatkan tabungan; (2) mengalihakn investasi kepada golongan-golongan miskin; (3) mendistribusikan pendapatan kepada golongan miskin; (4) pengalihan harta kepada orang miskin.

Paradigma pembangunan yang selanjutnya adalah paradigma teknologi tepat guna. Paradigma ini beranggapan bahwa perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara menciptakan barang-barang produksi melalui cara yang lebih bersifat padat karya sehingga tepat apabila diterapkan di negara berkembang. Kemudian paradigma kebutuhan dasar pembangunan. Paradigma ini yaitu menyediakan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin.

Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pangan, pakaian, dan papan saja tetapi juga kebutuhan yang lainnya.

Pergeseran paradigma selanjutnya adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini memiliki fokus mewujudkan keseimbangan pembangunan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian paradigma yang terakhir adalah paradigma pemberdayaan. Paradigma ini lahir karena adanya dua premis mayor antara kegagalan dan harapan. Kegagalan dalam pengembangan model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan, sedangkan harapan dikarenakan adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokratis, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Melihat pada paradigma Pembangunan diatas dalam pembangunan ekonomi untuk saat ini paradigma yang paling tepat adalah pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan memiliki keseimbangan antara kegiatan ekonomi, dampak sosial, dan keseimbangan lingkungan. Lingkungan dan sosial tidak lagi hanya sebagai objek melainkan sebagai perhatian untuk dijaga dan dilestarikan. Paradigma ini juga memiliki maksud bahwa keseimbangan ketiga hal tersebut dapat menjadikan harapan akan kehidupan dimasa yang akan datang.

3. Konsep Pengembangan

Sebuah proses untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik kadang kala harus dikaitkan dengan sebuah konsep yang disebut dengan konsep

pembangunan. Salah satu konsep pengembangan di ungkapkan oleh Suryono (2010) yang menyatakan bahwa:

“Konsep pengembangan (*developing concept*) sering dikaitkan dengan istilah Negara yang sedang berkembang (*developing countries*). Berdasarkan pendekatan antropologis Negara ini dianalogikan dengan kondisi masyarakat primitive yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana. Demikian pula halnya dengan bangsa, semua bangsa yang masih dianggap primitive disebut Negara terbelakang (*backward countries*). Sebutan ini kemudian diubah dengan istilah Negara yang belum berkembang atau Negara kurang maju (*underdeveloped countries*). Sebutan – sebutan itu dianggap mengandung unsur negative dan eksploitatif, karena ternyata Negara dunia ketiga pada umunya berkebudayaan tinggi dan memiliki potensi serta sumber – sumber yang berlimpah – limpah, disamping kemerdekaan nasionalnya yang dapat dipakai sebagai modal utamanya. Kelemahan Negara dunia ketiga terutama terletak pada bidang pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan”.

Berdasarkan konsep pengembangan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan merupakan sebuah tahapan dalam sebuah kondisi dimana telah terdapat potensi sumberdaya, perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik dan telah memiliki kebebasan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Implementasi konsep pengembangan pada era otonomi daerah adalah bagaimana suatu daerah yang telah diberikan kebebasan untuk meningkatkan potensi masyarakatnya untuk berkembang lebih mandiri, diberikan kesempatan yang luas untuk mengelola sumberdayanya sendiri baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, serta secara langsung diberikan kebebasan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik disegala bidang kehidupan baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

4. Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Pada dasarnya Kartasmita sebagaimana dikutip oleh Ulum (2013) mengatakan bahwa pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memandirikan mereka. Diulainya proses pembangunan berpijak pada pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Sejak dimulainya masa kuat pemerintah daerah maka pembangunanpun diarahkan untuk peningkatan pembangunan secara maksimal di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 huruf (j) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan otonomi, daerah harus menyelenggarakan kewajiban mengembangkan sumberdaya produktif di daerah. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus menyesuaikan dengan potensi sumberdaya daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia yaitu kekuatan masyarakat lokal untuk meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan sumberdaya alam yaitu potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan pengelolaan yang optimal. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di era otonomi daerah harus memahami dengan benar apa yang dimiliki, dibutuhkan, dan dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun sepanjang optimalisasi potensi daerah harus dilakukan dengan

benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

D. Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (*Local Economic Resources Development*)

1. Definisi *Local Economic Resources Development* (LERD)

Pada era otonomi daerah pembangunan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan pada skala daerah. Pembangunan tersebut juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada di daerah. Pembangunan dengan berdasar pada kemampuan dan sumberdaya daerah akan menjadikan pembangunan daerah lebih baik dengan kebijakan yang sesuai pula. Hal tersebut pula yang di ungkapkan oleh Blakely (1989) mengenai pengembangan ekonomi lokal.

“Locally based economic development is not merely new rhetoric but represent a fundamental shift in the actors as well as the activities associated with economic development. it is essentially a process by which local government and/ or community based groups manage their existing resources and enter into new partnership arrangement with the privat sector, or with each other to create new jobs and stimulate economic activity in a defined economic zone. The central feature in locally oriented or based economic development is in the emphasis on "endogenous development" policies using the potential of local human, institutional, and physical resources. This orientation leads to a focus on taking local initiatives in the development process to create new employment and stimulating increased economic activity.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa Pembangunan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tapi merupakan pergeseran mendasar dalam aktor serta kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Hal itu pada dasarnya adalah sebuah proses dimana kelompok-kelompok pemerintah

dan/atau masyarakat lokal mengelola sumber daya yang ada serta membuat kemitraan dengan sektor privat, atau dengan pihak yang lain untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi di zona ekonomi lokal. Inti dalam pembangunan ekonomi lokal atau berbasis pada penekanan pembangunan dengan kebijakan menggunakan potensi sumberdaya manusia lokal, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Orientasi ini memiliki fokus pada mengambil inisiatif lokal dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi agar meningkat.

Tabel 2. Analisis Fokus, Kelemahan dan Kelebihan *Local Economic Development (LED)*

Definisi	Fokus	Kelebihan	Kelemahan
Edward J Blakely	Menciptakan Lapangan Pekerjaan	Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi juga kepada proses	Tidak dijelaskan: - Kelayakan lapangan kerja - Keberlanjutan dari penciptaan lapangan kerja - Aspek pemerataan aspek kelokalannya - Bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak - Tidak menjelaskan aspek lokasi

Sumber: (Said,2012)

Sedikit berbeda dengan pemahaman mengenai pembangunan ekonomi lokal (LED), *Local Economic Resources Development (LERD)* menurut Said (2012) merupakan usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Melihat pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa LERD merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa aktor penting dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal. Peran aktor menjadi hal penting dalam usaha/upaya tersebut.

2. Strategi Pengembangan Sumber-Sumber Potensi Daerah

Pengembangan potensi sumberdaya lokal membutuhkan strategi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi digunakan sebagai jalan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pengembangan potensi sumberdaya lokal. Menurut (Said, 2014) strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan sumberdaya yang ada di daerah yaitu: *Pertama*, inovasi dan penguatan kelembagaan yang menghasilkan dua demarkasi penting, yaitu konvensi (*conventions*) dan aturan main (*rules of the game*). Kelembagaan berjalan secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak berjalan secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi (*predictable*) dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang. Demikianlah dasar-dasar awal yang diletakkan oleh para penemu (*the founding fathers*) ekonomi kelembagaan. Menurut Said (2014) Kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol

atau yuridiksi, pembebasan atau liberasi dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu. *Kedua*, Upaya mendorong kerangka kelembagaan yang terbentuk untuk melakukan kluster aktivitas ekonomi yang terencana, jelas, dan terarah sebagai “*starting point*”. Kriteria untuk pemilihan kluster aktivitas ekonomi yang dapat diterapkan pada pengembangan ekonomi daerah dengan basis atau pendekatan permintaan adalah sebagai berikut :

1. Potensi permintaan dari luar daerah yang besar. Informasi dasar mengenai potensi permintaan ini harus digali dan dikuasai, hal tersebut harus dilakukan karena merupakan pra-syarat awal untuk menentukan strategi pembangunan berikutnya. Dengan kata lain, potensi pasar inilah yang sebenarnya basis informasi bagi pemilihan, perumusan dan implementasi strategi keunggulan kompetitif dengan pasar yang lebih luas. Tingkat permintaan pasar yang sebenarnya adalah bukan permintaan semu (*fake demand*), tetapi harus mampu diketahui dan dianalisis kecenderungan dan implikasinya kepada ekonomi daerah.
2. Potensi yang mampu untuk tumbuh tinggi di atas rata-rata dan *sustainable*. Kriteria ini secara implisit mengandung semangat strategi keunggulan komparatif, yang mungkin saja dapat kompatibel dengan komoditas unggulan daerah. Pada langkah awal ini pun tidaklah terlalu bijak apabila pengembangan ekonomi daerah masih berlandaskan unsur coba-coba dengan berbasis komoditas sama sekali baru, dengan tingkat pertumbuhan rendah, walaupun mungkin

potensial. Komponen keberlanjutan juga perlu diperhatikan agar dampak berganda dari pengembangan kluster dapat diciptakan dan dipertahankan pada masa-masa mendatang.

3. Melibatkan usaha kecil-menengah. Kriteria ini sebenarnya secara ekonomi dan politik dapat diterima secara luas, apalagi di tengah perubahan paradigma strategi pembangunan ekonomi untuk mengembangkan ekonomi rakyat, tidak bertumpu pada konglomerasi dan usaha besar semata. Dengan sendirinya, pengembangan ekonomi daerah dengan basis industri atau usaha besar seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara dan sebagainya yang cenderung terpusat pada beberapa aktor saja atau *enclave economy*, tidak termasuk dalam pendekatan berbasis permintaan ini. Tingkat keterkaitan kluster ekonomi industri besar ini umumnya telah cukup tinggi, sehingga tidak perlu relevan untuk dibahas dalam pengembangan ekonomi daerah ini.
4. Menciptakan lapangan kerja produktif bagi kelompok rumah tangga miskin. Kriteria ini, selain berdasarkan pertimbangan ekonomi dan pembangunan, juga berdasarkan pertimbangan politik atau kebijakan pemihakan yang harus ditunjukkan oleh pemerintah daerah, dan sektor swasta beserta komponen masyarakat lainnya. Lapangan kerja produktif hanya dapat diciptakan apabila, pendapatan dari perdagangan itu menciptakan dampak ganda (*multiplier effects*) bagi aktivitas ekonomi lain, yang secara konsisten diharapkan meningkatkan

pendapatan kelompok rumah tangga miskin di daerah. Dari sinilah, esensi kepihakan kepada kelompok pendapatan rendah dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif dapat dikembangkan secara konsisten.

3. Kelembagaan dan Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal

Pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal jelas akan merujuk pada peran aktor yang terlibat. Berawal dari konsep LED yang diungkapkan oleh Blakely (1989) dimana dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal harus ada ketegasan peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang tergabung dalam sebuah kelompok serta memiliki kerjasama dengan sektor swasta ataupun dengan pihak lain yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas pembangunan di tingkat daerah. Secara lebih jelas, Said (2014) menjabarkan tentang konsep LERD juga membahas mengenai peran aktor/kelembagaan yang ada dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Kelembagaan/aktor yang dimaksud dalam konsep pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ini adalah kelembagaan/aktor yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah. Kelembagaan/aktor inilah yang kemudian melaksanakan atau melakukan usaha dalam melakukan pengembangan potensi sumberdaya ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Aktor mengkoordinir segala urusan yang menjadi

kapasitasnya serta berpeluang untuk menjalin kerjasama atau koordinasi dengan aktor lain sebagai wujud pelaksanaan perannya serta upaya peningkatan kapasitasnya.



Gambar 1. Kelembagaan dan Aktor Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (Said, 2014)

Berdasarkan gambar diatas tentang kelembagaan dan aktor pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dapat dilihat bahwa dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal terdapat aktor yang berperan penting. Secara lebih terperinci Said (2014) menyatakan bahwa peran setiap yang dimaksud mencakup peran aktif dalam proses maupun aktor yang berperan sebagai pendukung terlaksananya pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya secara lengkap Said (2014) menjabarkan berdasarkan analisis konsep LERD, aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu aktor utama dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Kewajibannya adalah melakukan pembangunan di daerah. Berdasarkan konsep LERD, Pemerintah Daerah berperan dalam mengkoordinir pembuatan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi daerah di tingkat daerah, berperan aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan sumberdaya manusia serta mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah.

2. Pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru

Pelaku usaha lokal merupakan salah satu aktor yang berperan dalam melakukan usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah. Pengelolaan ini merupakan upaya dalam meningkatkan nilai jual sumberdaya yang ada ataupun mendistribusikan sumberdaya alam yang ada pada luar wilayah sentra produksi. Sedangkan pelaku usaha baru adalah pelaku usaha yang bergabung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dengan menciptakan inovasi usaha untuk mendukung proses pengembangan yang telah berlangsung. Kedua pelaku usaha tersebut sama-sama memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dan mendukung dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik secara mandiri dibentuk maupun

hasil kemitraan dengan pihak lain dalam mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah. BUMD merupakan badan yang menaungi proses pengelolaan khusus pada sektor tertentu.

4. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor utama dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Masyarakat lokal yang melaksanakan pengembangan serta pengelolaan sumberdaya alam yang di wilayah tersebut. Masyarakat lokal yang mengkoordinir proses sumberdaya alam diperoleh, distribusi, pengelolaan, serta pengelolaan sumberdaya manusia yang ada. Masyarakat juga berperan sebagai kontrol atas pelaksanaan pengembangan yang dilaksanakan. Pelaksanaan peran masyarakat lokal juga bermitra atau bekerjasama dengan pihak lain.

5. Koperasi

Koperasi merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinir urusan sumberdaya pada sektor tertentu yang ada di kawasan khusus. Urusan yang dimaksud adalah urusan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya modal, serta sumberdaya pendukung lainnya.

6. Lembaga Keuangan di daerah

Lembaga keuangan yang ada di daerah memiliki peran dalam menyediakan sumberdaya modal dalam menunjang proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Lembaga keuangan ini dapat berasal dari Pemerintah Daerah artinya yang menyediakan adalah Pemerintah Daerah atau berasal dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta.

7. Perguruan Tinggi

Merupakan aktor pendukung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal disuatu wilayah. Perannya adalah memberikan evaluasi dan kontribusi akademis terhadap proses pengembangan. Selain itu juga memberikan aksi langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya baik secara sukarela maupun dari hasil kerjasama.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari adanya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah bagaimana pembangunan ekonomi pada tingkat lokal secara dasar mampu meningkatkan kapasitas hidup masyarakat didaerah tersebut terlebih mampu untuk memberikan dampak pembangunan dan manfaat pada daerah dan lingkungan. Tujuan ini memberikan sebuah harapan bahwasanya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal merupakan sebuah usaha yang penting dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Tujuan dalam pembangunan ekonomi lokal memberikan gambaran yang jelas pada *stakeholder* yang berkaitan untuk melaksanakan program yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Daerah

Berdasarkan pernyataan Daryanto (dalam Ulum,2013) yang mengatakan bahwa sektor perikanan di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tinggi. Keunggulan Komparatif merupakan salah satu alat analisis untuk

mengukur potensi relatif perekonomian di daerah. Menurut David Ricardo (dalam Tarigan,2005) keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) adalah ketika suatu komoditi di suatu daerah atau wilayah lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul disini adalah hanya untuk perbandingan. Komoditi yang memiliki keunggulan meskipun hanya dalam bentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan daripada komoditi lain yang sama-sama diproduksi daerah tersebut.

Keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) menganalisis kemampuan suatu daerah untuk mampu memasarkan produknya untuk skala lokal, nasional, maupun global. Istilah keunggulan komparatif lebih mudah dimengerti mengingat analisisnya hanya cukup melihat apakah produk yang dihasilkan dapat dijual secara menguntungkan. Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah kearah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila suatu daerah memiliki suatu komoditi untuk dijadikan sebagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah diketahui terlebih dahulu maka pengembangan ekonomi pada sektor tersebut dapat segera untuk dilakukan.

Keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah (Tarigan,2005). Banyak komoditi yang hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal atau ada yang dipasarkan ke wilayah lain tetapi pada saat ini belum mampu untuk masuk pada pasar nasional/global. Analisis keunggulan komparatif tetap dapat digunakan untuk dapat melihat apakah komoditi tersebut memiliki prospek

untuk dikembangkan meskipun saat ini belum mampu masuk pada pasar global. Perbandingan komparatif juga dapat digunakan untuk pertanda awal bahwa komoditi tersebut memiliki prospek untuk dapat juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya, komoditi tersebut layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk luar daerah.

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang secara geografis dimana sepanjang garis batas utara merupakan wilayah perairan laut. Secara demografi bentuk masyarakat yang tinggal disepanjang wilayah pantai adalah masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan laut. Hal tersebut menandakan bahwa sektor ekonomi yang sangat berperan adalah sektor perikanan tangkap. Dengan adanya peluang sektor perikanan tangkap tidak ada artinya apabila tidak dilakukan pembangunan didalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan atau membawa banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

C. Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap

1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

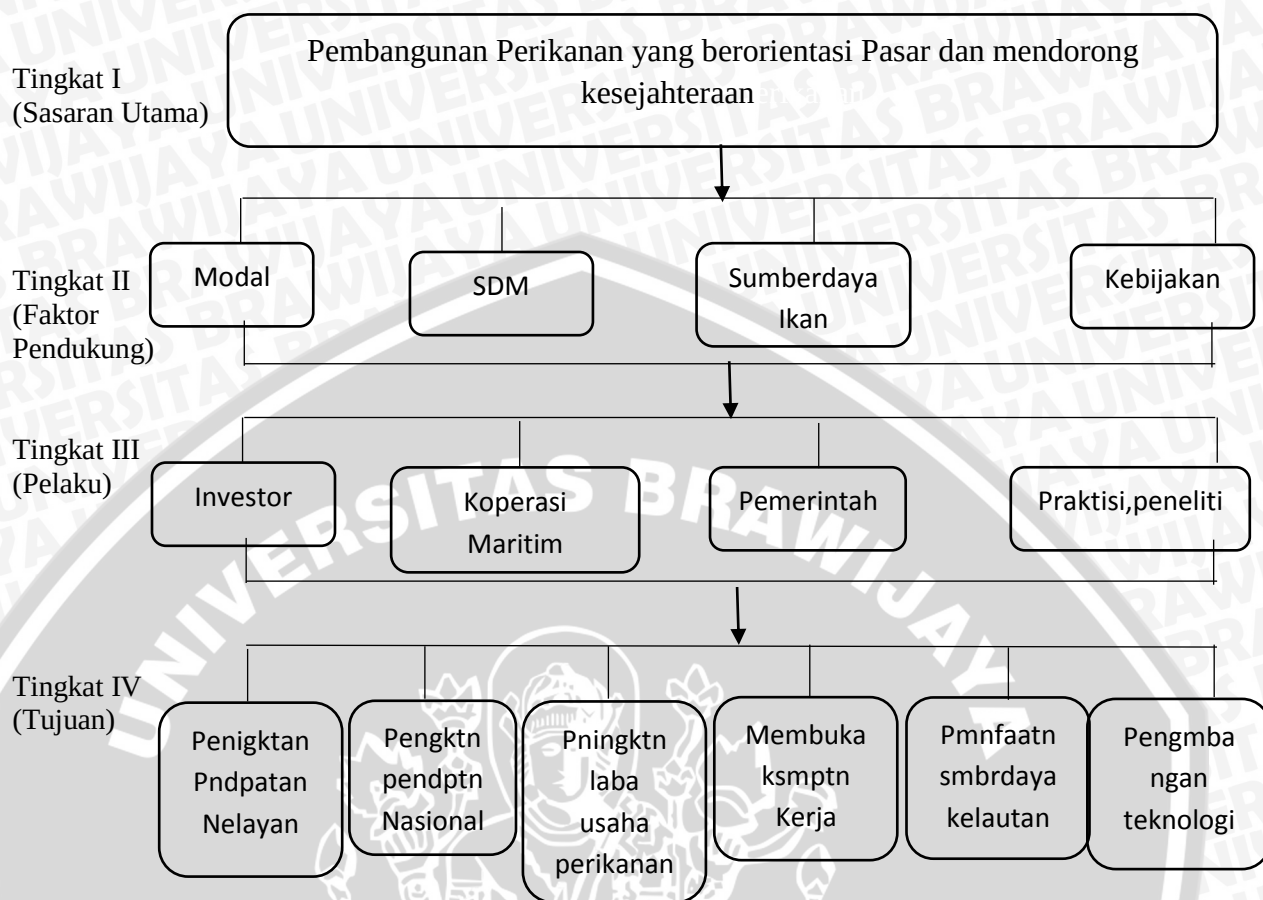
Pengelolaan sumberdaya kelautan merupakan hal yang perlu dipikirkan matang dan terencana dengan baik. Menurut Kamaluddin (2002) Suatu wilayah yang telah ditetapkan ke dalam zona perikanan tertama perikanan tangkap harus memiliki program pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- (2) Pengendalian atau rasionalisasi usaha penangkapan ikan;
- (3) Peningkatan produksi perikanan tangkap;
- (4) Pengembangan usaha perikanan tangkap;
- (5) Menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- (6) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Menurut Kamaluddin (2002) Selain program yang harus dilakukan, perlu juga untuk ditetapkan sebuah strategi dalam pengembangan zona perikanan tangkap, diantaranya yaitu:

- (a) pengembangan zona perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan;
- (b) pengaturan jumlah armada penangkapan ikan;
- (c) pengembangan alat tangkap ramah lingkungan;
- (d) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- (e) pengembangan sumberdaya manusia;
- (f) meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; dan
- (g) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya ikan.

Setelah adanya program dan strategi, yang perlu diperhatikan pula adalah adanya konsep integrasi dalam pembangunan perikanan terutama perikanan tangkap. Integrasi ini diperlukan untuk memperjelas adanya hubungan yang erat antara input dalam pembangunan dan output tujuan yang akan dicapai. Integrasi ini berupa pola hubungan yang salaing terkait antara sektor penunjang. Selain itu, input juga sangat berpengaruh dalam menentukan siapa *stakeholder* atau pelaku dalam pembangunan perikanan. Selain itu faktor pendukung penting untuk dimanfaatkan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dengan strategi yang tepat.



Gambar 2. Integrasi Pembangunan Perikanan (Kamaluddin,2002)

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam pembangunan sektor perikanan perlu dilakukan adanya integrasi. Sebuah bentuk Integrasi akan diawali dengan adanya sasaran atau tujuan utama yang akan dicapai yaitu pembangunan yang berorientasi terhadap pasar dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan atau sasaran utama tersebut maka harus dimanfaatkan faktor pendorong atau faktor pendukung diantaranya yaitu modal, sumberdaya manusia, Sumber daya ikan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Kemudian selain faktor pendukung, hal atau bagian penting yang harus diperhatikan adalah pelaku atau stakeholder. Proses integrasi ini yang dimaksud dengan pelaku terdiri dari: investor, koperasi maritim, pemerintah dan juga peneliti,praktisi bahkan dapat

juga berasal dari kalangan perguruan tinggi. Pelaku atau aktor merupakan hal penting karena program atau kebijakan tidak akan ada dan berjalan tanpa adanya pelaku atau aktor tersebut. Terakhir yang harus di perhatikan juga adalah tujuan (*output*) yang akan dicapai dalam menjalankan proses. Dalam integrasi pembangunan ini menurut Kamaludin (2002) memiliki tujuan yang hendak diwujudkan diantaranya yaitu: *Pertama*, peningkatan pendapatan nelayan, hal ini dilakukan mengingat dalam pembangunan perekonomian sektor perikanan yang menjadi pelaku atau aktor utama adalah nelayan serta setiap program dan kebijakan sektor perikanan jelas akan selalu berpengaruh terhadap nelayan secara langsung. *Kedua*, meningkatkan pendapatan nasional, hal ini dikarenakan sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapat terbesar negara sehingga apabila pembanguann sektor ini akan semakin meningkatkan pendapatan nasional secara baik. *Ketiga*, Peningkatan laba usaha perikanan, sektor perikanan tidak hanya terkait dengan mekanisme memperolehnya tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mengolahnnya dalam bentuk usaha industri besar maupun kecil, secara otomatis apabila pembangunan dilakukan maka akan berpeluang untuk meningkatkan laba usaha sektor perikanan. *Keempat*, berkaitan dengan peningkatan laba usaha akan juga berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang akan diciptakan sehingga akan menunjang kebutuhan lapangan pekerjaan. *Kelima* pemanfaatan sumberdaya kelautan, disini yang dimaksud adalah manajemen pemanfaatan sumberdaya kelautan akan bergerak ke arah yang lebih baik dengan pemanfaatan yang layak dan berwawasan lingkungan. *Keenam*,

memungkinkan adanya pengembangan teknologi sektor perikanan untuk menunjang pembangunan sektor tersebut dimasa depan.

2. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan bagian penting dalam wilayah perekonomian bidang perikanan terutama perikanan laut. Kamaluddin (2002) menyatakan pelabuhan perikanan merupakan prasarana bagi usaha perikanan agar mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tumbuhnya usaha perikanan dalam skala besar maupun kecil serta terwujudnya sentra produksi perikanan dalam skala ekonomi yang efisien.

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan prasarana (termasuk didalamnya pelabuhan perikanan) memiliki peran penting dalam pengembangan prasaranan perikanan tangkap dan industri perikanan. Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan dan kelautan sebagai berikut: (1) melengkapi sarana dan prasarana perikanan; (2) meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana perikanan; (3) mengoptimalkan operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan (4) memelihara sarana dan prasarana; dan (5) strategi untuk pengembangan jaringan pemasaran perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal (59) huruf e angka 3 dinyatakan bahwa pelabuhan Tasikagung Kabupaten Rembang merupakan pelabuhan yang masuk ke dalam jenis Pelabuhan Perikanan Pantai.

Sebagai sarana penunjang perekonomian sektor perikanan yang sangat vital, pelabuhan membutuhkan strategi dan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur yang maksimal. Pengembangan pelabuhan berdasarkan karakteristik masing-masing pelabuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan menurut Klasifikasi/karakteristik Pelabuhan

Klasifikasi/karakteristik	Strategi	Kebijakan
Ketersediaan infrastruktur memadai dan kinerja operasional (kuadran I)	Penguatan pembangunan infrastruktur	1. optimasi utilitas infrastruktur 2. perluasan infrastruktur 3. penciptaan iklim investasi, kapasitas infrastruktur 4. pengembangan akses ke jaringan teknologi
Ketersediaan infrastruktur memadai dan kinerja operasional kurang memadai (Kuadran II)	Optimalisasi pembangunan	1. Optimalisasi utilitas 2. Peningkatan kinerja operasional (produktivitas) 3. Peningkatan koordinasi dan manajemen
Keikutsertaan infrastruktur kurang memadai dan kinerja operasional kurang memadai (kuadran III)	Percepatan pembangunan	1. Peningkatan investasi pemerintah dibidang infrastruktur 2. Pemerataan pembangunan ke pelabuhan yang kurang berkembang
Keikutsertaan infrastruktur kurang memadai dan kinerja operasional memadai (kuadran IV)	Perluasan pembangunan infrastruktur	1. Peningkatan investasi pemerintah bidang infrastruktur 2. Peningkatan dan perluasan kapasitas infrastruktur 3. Pemerataan akses pelayanan infrastruktur

Sumber: Adisasmita, 2002

Selain pembangunan infrastruktur salah satu diantaranya adalah pelabuhan perikanan seperti yang telah dijelaskan diatas, pembangunan sektor perikanan terutama perikanan tangkap harus menggunakan suatu program kegiatan atau kebijakan yang sesuai. Kesesuaian program kegiatan dan kebijakan akan memberikan manfaat dalam kesuksesan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan *output* yang diharapkan. Sektor perikanan yang dimiliki oleh daerah merupakan bagian dari sektor perekonomian yang perlu untuk dijadikan perhatian dalam pembangunan ekonomi lokal. Salah satu program atau kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan perekonomian sektor perikanan dalam skala lokal adalah Minapolitan.

D. Minapolitan

1. Konsep Minapolitan

Pada pertengahan tahun 1970an, Freedmann dalam (wiadnya,2011) mencetuskan konsep pengembangan kota kecil sebagai pusat dan ditunjang oleh beberapa wilayah desa disekitarnya dengan sektor penggerak ekonomi dari pertanian. Teori ini dipandang sebagai solusi untuk menarik aglomerasi urban dari wilayah metropolitan. Namun agropolitan dirancang pada kapasitas daya dukung tertentu, dengan ukuran kota kecil. Setelah daya dukung terlewati, kawasan agropolitan menjadi tidak ekonomis dan urbanisasi diharapkan akan berhenti. Singkatnya, dimensi agropolitan ketika itu dibayangkan sebagai kota kecil (ukuran penduduk sekitar 10 – 25 ribu jiwa), ditambah beberapa wilayah kecamatan disekitarnya (pada radius commuting) dengan jarak sekitar 5 – 10 km

dari pusat kota. Komoditas utama untuk menggerakkan ekonomi wilayah ialah sektor pertanian. Dengan demikian, suatu kawasan agropolitan akan berdimensi penduduk antara 50 – 150 ribu jiwa. Pada wilayah pesisir, konsep agropolitan diadopsi dengan penggerak ekonomi dari sektor perikanan. Kepadatan penduduk di wilayah pesisir umumnya lebih padat dibandingkan dengan wilayah di atasnya yang berbasis pertanian. Oleh karena itu dimensi ruang pada minapolitan bisa sedikit berbeda dengan agropolitan.

Menurut Wiadnya (2011) konsep minapolitan pada dasarnya hampir sama agropolitan, perbedaan dasar terletak pada sektor penggerak ekonomi dari perikanan. Minapolitan sebaiknya dirancang untuk menumbuhkan kota-kota kecil mandiri dan mengurangi penumpukan penduduk di kota-kota besar. Minapolitan tidak selalu harus mulai dari awal. Selanjutnya Wiadnya (2011) juga menyatakan minapolitan merupakan proses yang dinamis dan siklik dengan karakteristik dasar pendekatan multi-sektor secara terpadu. Setiap tahapan rencana aksi harus dibuat melekat dengan rencana yang sudah ada saat ini. Implementasi dari minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui alat monitoring) untuk mengukur setiap keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil dari monitoring harus bisa digunakan sebagai dasar bagi pengelola untuk memperbaiki setiap rencana aksi (implementasi) berikutnya.

Pada proses pembangunan pada program Minapolitan bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan perikanan budidaya. Kedua jenis aktifitas ekonomi ini memiliki dimensi keruangan yang berbeda. Produksi bahan mentah pada sistem penangkapan ikan

dilakukan secara terpusat di tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Aktivitas pengolahan (pabrik es, lahan pengeringan, pengalengan) bisa dirancang pada lokasi dekat dengan pendaratan ikan. Pada Minapolitan budidaya (air tawar), aktivitas budidaya dilakukan secara tersebar dan banyak menjadi satu dengan lahan perumahan penduduk.

2. Dasar Hukum Minapolitan

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1,2,dan 3 maka pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan menteri dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut maupun air tawar dengan menggunakan konsep Minapolitan. Regulasi tersebut kemudian dijadikan sbagai pedoman atau landasan dalam melaksanakan program yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.

3. Prinsip Minapolitan

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di

suatu lokasi tertentu. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.

Konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Pertama, prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik. *Kedua*, prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif. *Ketiga*, prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara

keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif. *Keempat*, prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

4. Azas dan Basis Minapolitan

Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu: *Pertama*, Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat; *Kedua*, Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui dan pemberdayaan rakyat kecil; dan *Ketiga*, Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat. Diharapkan dengan adanya azas tersebut, pelaksanaan minapolitan menjadi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan wilayah dengan struktur sebagai berikut: (1) ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah di Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi; (2) kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan; (3) sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas

kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait; (4) unit produksi/ usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif.

5. Tujuan dan Sasaran Minapolitan

Pelaksanaan Minapolitan yang dilaksanakan memiliki tujuan *Pertama*, untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; *Kedua*, Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan *Ketiga*, untuk mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

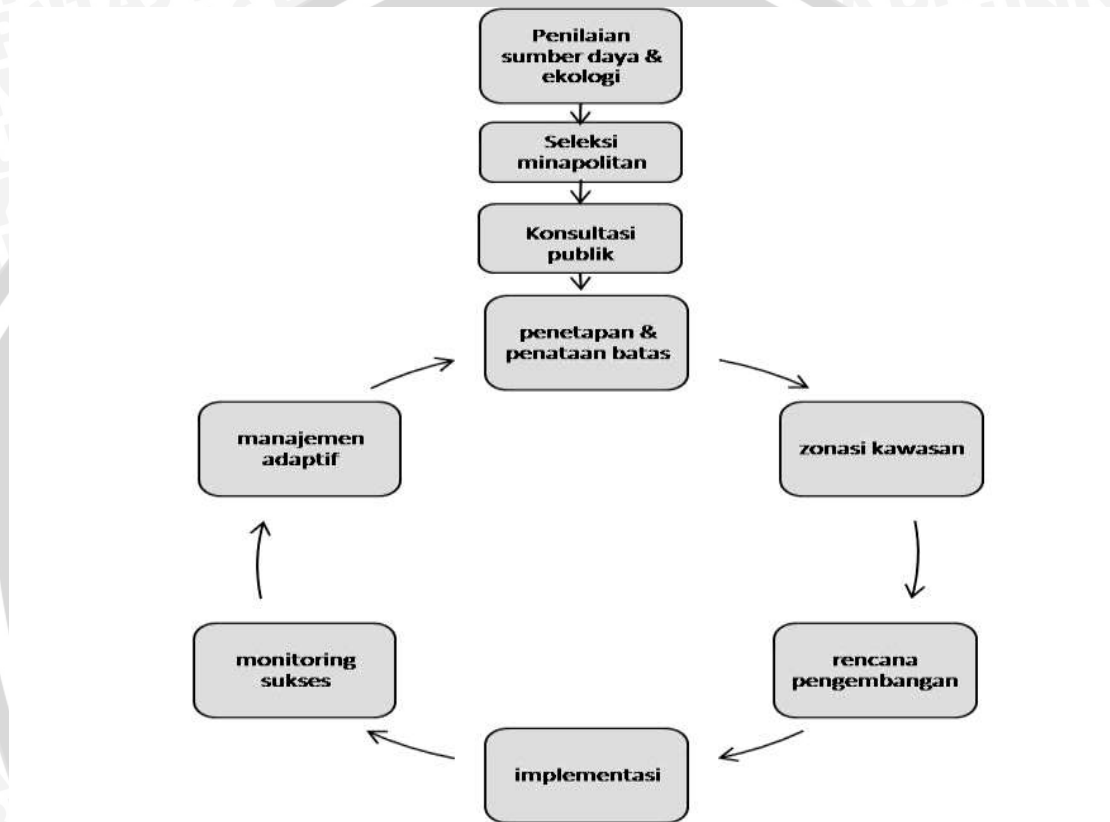
1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. Pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:

- a. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif barriers);
 - d. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - e. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
- a. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

6. Konsep Perencanaan Minapolitan

Minapolitan merupakan proses yang dinamis dan siklik dengan karakteristik dasar pendekatan multi-sektor secara terpadu. Setiap tahapan rencana aksi harus dibuat melekat dengan rencana yang sudah ada saat ini. Implementasi

dari minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui alat monitoring) untuk mengukur setiap keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil dari monitoring harus bisa digunakan sebagai dasar bagi pengelola untuk memperbaiki setiap rencana aksi (implementasi) berikutnya.



Gambar 3. Program Minapolitan terdiri dari 9 (Sembilan) urutan langkah, 5 (lima) langkah diantaranya dilakukan secara siklik dan dinamis (disintesis dari Bogart, 2006; Salet et al., 2003) dalam (Wiadnya, 2011)

Gambar di atas menunjukkan konsep perencanaan Minapolitan. Tahapan tersebut seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 34/Men/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan tahapan tersebut telah

sampai pada tahap keempat yaitu penetapan dan penataan batas. Apabila suatu daerah atau wilayah belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan baik Minapolitan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya maka tahapan harus samapi pada tahap pertama, kedua, ketiga.

Tabel 4 Detail kegiatan dalam setiap tahapan dari program pengembangan kawasan minapolitan (disintesis dari beberapa konsep pengembangan wilayah metropolitan, pengembangan wilayah pesisir terpadu dan kawasan konservasi)

No	Tahapan Langkah	Detail kegiatan
1	Penilaian sumber daya ikan dan ekologi	Variable penilaian terdiri dari, namun tidak terbatas pada: • Potensi atau kapasitas sumber daya ikan dalam skala ekonomi wilayah; • Potensi ekologi pendukung keberlanjutan sumber daya; • Dampak ekonomi pada satuan kawasan; • Kesesuaian wilayah; Keluaran: daftar kawasan potensial untuk dijadikan kawasan minapolitan
2	Seleksi kawasan Minapolitan	Variable penilaian terdiri dari, namun tidak terbatas pada: • Besar dampak ekonomi dari sektor perikanan • Besarnya dampak ekonomi sektor ikutan • Penyerapan tenaga kerja • Analisis keruangan (spatial analysis) yang mendukung • Komitmen politis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup kuat; • Kinerja instansi lintas sektoral secara terpadu • Kebutuhan prioritas untuk pengembangan kawasan minapolitan
3	Konsultasi publik	• Koordinasi instansi pusat, propinsi dan Kabupaten • Koordinasi para pihak pelaku minapolitan pada tingkat lapang (nelayan, petani budidaya, pengolah, pedagang ikan, sektor ikutan) • Koordinasi investasi dan pemasaran • Penyuluhan dan diseminasi pada masyarakat luas
4	Penetapan dan penataan Batas	• Rekomendasi Bupati – pencadangan wilayah sebagai calon kawasan minapolitan • Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai fasilitator Minapolitan

5	Zonasi kawasan Minapolitan	• Penyesuaian dan dibuat melekat dengan RDTR wilayah Kecamatan • Penyesuaian dan dibuat melekat dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Disesuaikan dengan karakter minapolitan – perikanan tangkap, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau dan laut
6	Rencana pengelolaan	• Disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Mengikuti Rencana Strategis Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
7	Implementasi	• Fasilitator (leading institution) untuk minapolitan perikanan tangkap ialah Pelabuhan Perikanan pada lokasi sentra kawasan minapolitan; • Fasilitator (leading institution) untuk minapolitan perikanan budidaya bisa dilakukan oleh Balai Benih setempat atau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
8	Monitoring	• Dilakukan oleh auditor minapolitan yang dibentuk khusus dan terdiri dari perwakilan instansi multi-sektor dan pakar ekonomi perikanan; • Hasil monitoring harus menjadi alat dasar bagi manajemen adaptif
9	Manajemen adaptif	• Menggunakan informasi dari hasil monitoring untuk melakukan penyesuaian rencana program • Rencana pengelolaan ditinjau secara berkala

Sumber: Wiadnya,2011

7. Tata Ruang Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Pelaksanaan minapolitan terdapat kriteria dimana kawasan tersebut dapat dikatakan dapat di kembangkan menjadi kawasan minapolitan. Berdasarkan Kep.Men nomor 18 tahun 2011 bahwa suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka

Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan; (2) Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan dan Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan yaitu memiliki pasar lokal, nasional atau internasional serta volume atau kemampuan produksi tinggi yang dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar; (3) tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan; (4) jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut; (5) mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah; mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif. (6) Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi: (a) lokasi kawasan strategis: 1) jarak dan sistem transportasi; dan 2) mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan) (b) kawasan yang secara alami cocok untuk usaha perikanan: 1) kaya Sumber Daya Alam, subur, dan air melimpah; 2) tempat pendaratan ikan (tangkap); dan 3) dekat dengan *fishing ground* (tangkap) (7) Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di

suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait.



Gambar 4. Ilustrasi Denah kawasan minapolitan perikanan tangkap (Sunoto, 2010)

Proses produksi perikanan tangkap di kawasan minapolitan berawal dari keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif berproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut. Proses produksi harus memiliki kriteria mulai dari hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi dengan keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai.

Kemudian terjadinya sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat dengan keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat. Proses kegiatan yang ada di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI diharapkan akan mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya. Adanya sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik

atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Pada kawasan minapolitan terdapat sistem dan mata rantai produksi perikanan yang berawal pada produksi perikanan laut. Menurut Sunoto (2010)

Sistem tersebut memiliki komponen sebagai berikut:

- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
- 2) Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu;
- 3) Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
- 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
- 5) Sistem dan sarana distribusi produk di dalam maupun ke luar kawasan.

Selain sistem dan tata ruang dalam produksi hasil perikanan yang penting adalah tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan dimana menurut Sunoto (2010) meliputi: (a) permodalan yang meliputi Aksesibilitas nelayan, dan pengolah ikan terhadap bantuan permodalan; (b) kelembagaan yaitu lembaga pemerintahan daerah pembina; (c) lembaga usaha diantaranya koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas; (d) penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan; (e) energi berupa jaringan listrik yang memadai; dan (f) teknologi tepat

guna yaitu penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.

Selanjutnya Sunoto (2010) juga menyatakan dalam menunjang dalam pelaksanaan minapolitan perikanan tangkap adalah kelayakan lingkungan yang diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan dilokasi di masa depan, meliputi: (a) kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung); (b) dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan (c) sesuai tata ruang daerah dan nasional. Selain kelayakan lingkungan yang dibutuhkan adalah kelayakan kelembagaan pemerintah daerah yang terwujud dalam Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan termasuk di dalamnya terdapat keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai yang telah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat serta keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan serta Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan dan ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi: data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait; dan sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln seperti yang dikutip dalam (Moeleong, 2007) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Selanjutnya Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena di dalam fenomena di lapangan peneliti berupaya untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dengan berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang kemudian penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis apakah pengembangan

sumberdaya ekonomi lokal tersebut memenuhi kriteria untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap. Maksudnya adalah pemilihan analisis data kualitatif ini adalah dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif tersebut adalah untuk menguji sesuatu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti bahwa apakah minapolitan perikanan tangkap dapat dilaksanakan dengan perspektif pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang bermanfaat untuk pembangunan daerah, tentu dengan pembuktian dari *survey*, wawancara dan analisis dari data selama penelitian dilapangan kemudian dikaitkan dengan konsep *Local Economic Resources Development (LERD)* dan Konsep Minapolitan perikanan tangkap yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam tahap pertama dilaksanakan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subyek atau situasi yang diteliti. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa dalam pandangan penelitian kualitatif, fenomena bersifat holistik sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya pada variabel saja tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berberinteraksi secara sinergis.

Spradley dalam Sugiyono (2013) mengemukakan empat alternatif dalam menentukan fokus penelitian:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menentukan fokus berdasarkan domain-domain tertentu (*organizing domain*)
3. Menentukan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Menurut Moleong (2007) fokus penelitian digunakan peneliti agar tahu persis data mana dan data tentang apa dan data mana yang perlu dikumpulkan dan dengan penetapan fokus jelas dan mantap peneliti dapat menentukan pula data mana yang tidak perlu digunakan dan yang akan dibuang. Selanjutnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Peran Aktor Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Berdasarkan penjabaran aktor dalam konsep Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (LERD) yang dikemukakan oleh Said (2014) adalah:
 - a. Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah
 - b. Pelaksanaan peran pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru
 - c. Pelaksanaan peran Masyarakat lokal
 - d. Pelaksanaan peran Koperasi
 - e. Pelaksanaan peran Lembaga Keuangan di Daerah
 - f. Pelaksanaan Peran Perguruan Tinggi
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam suatu penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana penelitian dilakukan. Menurut Lofland and Lofland (dalam Ulum, 2013) ada empat alasan mengapa memilih lokasi penelitian yang menarik yaitu: (1) menarik minat peneliti dan secara nyata berlokasi disuatu tempat, (2) terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola tidak tetap (3) adanya keunikan pada individu dan jenis *setting* yang tidak biasa serta banyaknya bentuk pengalaman sosial, dan (4) adanya masalah yang diteliti belum mendapat solusi.

Pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, karena Desa Tasikagung adalah wilayah yang paling besar dalam melakukan aktivitas perekonomian bidang perikanan tangkap serta didukung oleh adanya sumberdaya manusia yang terdiri dari berbagai bidang pekerjaan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pembangunan ekonomi perikanan tangkap dalam perspektif pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis Minapolitan perikanan tangkap.

Kemudian situs penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Tasikagung, kelompok pekerja pelabuhan, masyarakat dan pengusaha di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Penetapan lokasi dan situs dikarenakan lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Penetapan lokasi dan situs tersebut juga didasari pertimbangan pribadi peneliti:

1. Lokasi dan situs penelitian tersebut memberikan data yang relevan untuk melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian.
2. Desa Tasikagung Kecamatan Rembang merupakan daerah yang menjadi lokasi utama dalam pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap.
3. Peneliti memahami kondisi sosial dan potensi serta masyarakat di Desa Tasikagung karena lokasi penelitian tersebut satu wilayah Kabupaten dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat efisien waktu dan biaya dalam penelitian.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan (Arikunto, 2006) bahwa Sumber data dalam penelitian terbagi sebagai berikut:

1. Sumber data

- a. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih dalam proses Prariset secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel bersifat tidak tentu untuk menentukan “*key Informan*”. Artinya bila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang ada dinyatakan cukup baik pada pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam hal ini peneliti

menetapkan informan kunci sesuai dengan bidangnya dan jumlah informan sesuai dengan kebutuhan data dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen ini berhubungan dengan sektor perikanan laut dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Teknik ini dilakukan dalam rangka melengkapi informasi peneliti.
- c. Tempat dan Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi lokal perikanan tangkap.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dan data dari Informan. Data primer digunakan untuk mendukung kegiatan pada tahap analisis.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik Dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data Melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007).

2. Observasi

Nawawi & Martini dalam (Afifudin dan A. Saebani, 2009) mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam suatu penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya sudah ada, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Penggunaan metode dokumentasi ini peneliti memegang *checklist* untuk

mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan tanda *check* ditempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2002).

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan Instrumen dalam pelaksanaannya Menurut (Moleong, 2007) mengatakan dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, maka instrument penelitian yang dipergunakan antara lain :

1. Peneliti sendiri

Disini peneliti sendirilah yang dijadikan instrumen, karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan yang ikut berperan serta. Namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. (Moleong, 2007).

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Didalamnya terdapat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti yang melakukan wawancara dengan informan atau narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Field note menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2007) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

4. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara dan foto-foto aktivitas yang dilakukan responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.

5. Dokumen dan Arsip-arsip

Instrumen ini berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang dimaksud berhubungan dengan pembanguann daerah, perekonomian sektor perikanan tangkap dan pembangunan ekonomi lokal yang ada.

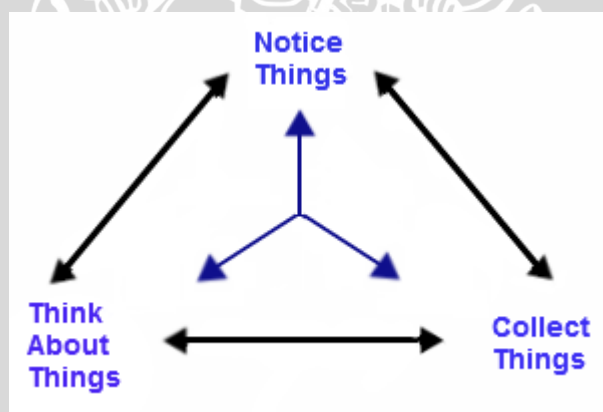
G. Analisis Data

Analisis data merupakan beberapa langkah atau tahap yang dilakukan untuk melakukan pengolahan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari proses penelitian. Pada Penelitian ini, proses yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap data-data yang tersedia, selanjutnya melakukan penguraian terhadap setiap data yang di amati, selanjutnya mendeskripsikan serta menafsirkan sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan.

Sesuai dengan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya serta berdasarkan penjelasan diatas, maka dipilih model analisis yang sesuai dengan jenis penelitian tersebut yaitu dengan model analisis data Seidel (1998).

Seidel sebagaimana dikutip (Annahar,2013) menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif tidak bersifat linier. Karakter model Seidel adalah:

1. Berulang-ulang dan progresif. Ketika peneliti berfikir tentang sesuatu hal, peneliti juga mulai melihat hal-hal baru dalam data, kemudian mengumpulkan dan berfikir tentang hal-hal baru yang lain. Pada Prinsipnya proses tersebut bersifat spiral terbatas.
2. Rekursif. Satu bagian dapat menghubungkan kembali ke bagian sebelumnya. Saat peneliti sedang sibuk mengumpulkan data, secara bersamaan mungkin mulai melihat hal-hal baru untuk dikumpulkan.
3. Holografik. Setiap langkah dalam proses berisi seluruh proses. Ketika melihat hal-hal yang sudah dikumpulkan dan berfikir tentang hal itu.



Gambar 5. Skema model analisis data Seidel (Seidel dalam Annahar,2013)

Lebih terperinci lagi pada masing-masing tahapan dalam model analisis data Seidel sebagaimana dikutip (Annahar,2013) terdiri dari: *Noticing Things*, *Colelecting things*, dan *Thinking about things* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Noticing Things and Coding Things*

Noticing berarti melakukan pengamatan, menulis catatan lapangan, merakan wawancara pengumpulan dokumen dan sebagainya. Ketika peneliti

melakukan tahapan ini, peneliti akan membuat catatan hal-hal yang dapat diperhatikan selama proses wawancara dan observasi. Setelah mendapatkan hasil rekaman dan catatan kemudian perhatian akan dipusatkan pada catatan tersebut, serta memperhatikan hal-hal menarik dalam catatan. Setiap hal dalam catatan akan disebutkan dalam kode A, B, C, dll tetpai kemungkinan besar akan dikembangkan skema penamaan yang lebih deskriptif dan berkembang. *Coding Things* adalah proses sederhana yang telah bnayak diketahui oleh banyak orang. Dalam hal ini *coding* akan digunakan sebagai alat penyelidikan atau untuk memfasilitasi penemuan data.

2. *Collecting and Sorting instances of things*

Dalam proses ini yang dimaksud adalah pengelompokan data yang sudah didapatkan. Dari masing-masing kode yang telah dilakukan sebelumnya data dikelompokan dalam karakteristik yang seragam untuk kemudian disusun menjadi gambaran yang utuh. Selanjutnya *sorting* adalah proses penyaringan data mencari jenis, kelas, urutan, proses, pola atau keutuhan. Tujuan dari *sorting* adalah untuk merekonstruksi data dengan cara yang bermakna atau mudah dipahami.

3. *Thinking about things*

Dalam Proses *thinking* akan dilakukan proses memeriksa data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari proses ini adalah: (1) membuat beberapa jenis pengertian dari setiap koleksi data (2) mencari pola dan hubungan dalam koleksi data (3) membuat penemuan umum tentang fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Rembang

a. Sejarah Maritim Kabupaten Rembang

Pada masa Kerajaan Majapahit, Rembang sebagai kota ataupun wilayah yang sudah berpemerintahan sendiri ataupun menjadi bagian dari suatu negara bagian Kerajaan Majapahit di buktikan dengan jelas dan tepat. Berdasarkan sumber tertulis masa Majapahit, nama Rembang telah di sebutkan di dalam Kitab Negara Kertagama pada Pupuh XXI sebagai berikut: “...*Menuruni surah melintasi sawah, lari menuju Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon dan Panggulan langsung ke payaman, Tepasana ke arah kota Rembang sampai di kemirakan yang letaknya di pantai lautan*”.

Nama Rembang bersama-sama dengan kota-kota pantai lainnya di Jawa juga muncul dalam sumber tertulis yang berasal dari Tome Pires. Disebutkan oleh Tome Pires, (1512-1515) antara lain “Now comes java and we must speak of the King within the hinterland. The land of Cherimon (Cherobaan), the land Jayapura, the land of Losari (Locari), the land of Tegal (Tegeguall), the land of Semarang (Camaram), the land of Demak (Demma), Tidunan (Tudumar), the land of Japara, the land of Rembang (Remee), the land of Tuban (Toban), the land of Sidayu (Cedayo), the land of Gresee (Agacij), the land of Surabaya (Curubaya), the land of Gamta, the land of Blambangan, the land of Pajarakan (Pajarucam), the land of

Camta, the land of Panaruakan (Panarunca), the land of Chamdy, and when is ended we will speak of the great island of Madura”.

Sumber lain tentang Rembang di peroleh dari sebuah manuskrip/tulisan tidak di terbitkan oleh Mbah Guru. Di sebutkan antara lain kira-kira tahun Syaka 1336, ada orang Campa Banjarmati berjumlah delapan keluarga yang pandai membuat gula tebu ketika ada di negaranya, Orang-orang tadi pindah untuk membuat gula merah yang tidak dapat di patahkan itu, berangkatnya melalui lautan menuju arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya tumbuh tak teratur pohon bakau. Kepindahannya itu di pimpin oleh kakek Pow Ie Din ; setelah mendarat kemudian mengadakan doa dan semedi, kemudian di mulai menebang pohon bakau tadi yang kemudian di teruskan oleh orang-orang lainnya. Tanah lapang itu kemudian dibuat tegalan dan pekarangan serta perumahan yang selanjutnya menjadi perkampungan itu dinamakan kampung KABONGAN, mengambil kata dari sebutan pohon bakau, menjadi Kabonga-an (Kabongan). *“Pada suatu hari saat fajar menyising di bulan Waisaka, orang-orang akan memulai ngrembang (mbabat, Ind : memangkas) tebu”*. Sebelum di mulai mbabat di adakan upacara suci Sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun yang akan di kepras/ di pangkas dua pohon, untuk tebu “Penganten”. Upacara pengeprasan itu dinamakan “ngRembang sakawit”...begitu tadi asal mulainya kata : “ngRembang”, sampai di jadikan nama Kota Rembang hingga saat ini., Menurut Mbah Guru , upacara ngRembang sakawit ini di laksanakan pada hari Rabu Legi, saat dinyanyikan Kidung, Minggu Kasadha,

Bulan Waisaka, Tahun Saka 1337 dengan Candra Sengkala : Sabda Tiga Wedha Isyara.

Sejarah Rembang sejak zaman dulu cukup dikenal dengan kemajuan maritimnya yang tak terlepas dari keberadaan pelabuhan Lasem. Bekas kejayaan maritim di masa lampau masih ditemukan pada beberapa situs peninggalan sejarah di sekitar wilayah Rembang. Bukti fisik tersebut dikuatkan dengan beberapa sumber sejarah yang meskipun sangat terbatas menceritakan peran sektor maritim Rembang yang pernah mengalami masa keemasan di masa lalu serta mempengaruhi perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat Rembang hingga saat ini. Gambaran masa lampau wilayah pantai utara Rembang adalah dermaga penting di pulau Jawa mulai dari masa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam hingga masa Kolonial Hindia Belanda.

Sekitar abad ke-19, keberadaan pelabuhan Rembang memegang peran yang cukup penting bagi daerah Rembang dan sekitarnya karena menjadi pintu utama ekspor impor baik hasil produksi dan konsumsi penduduk. Barang-barang yang diimpor melalui pelabuhan Rembang antara lain beras, kapas, minyak, jagung, jarak, gambir, dan kacang serta barang lain seperti kain, besi, keramik cina, serta makanan dan minuman Eropa yang didatangkan dari Batavia (Jakarta), Semarang, dan Surabaya sedangkan barang yang diekspor terutama kayu jati, tembakau, kopi, tebu, dan garam.

Pelabuhan Rembang sangat penting mengingat proses pengapalan barang-barang dilakukan disini. Ditinjau dai jenis barang yang diperdagangkan di

pelabuhan Rembang, perdagangan impor senantiasa lebih besar dari ekspor. Sebuah catatan statistik AVRR (*Algemeen Verslag der Residentie Rembang*) tahun 1832 barang-barang yang diimpor di daerah Rembang adalah beras, kapas, minyak, jagung, jarak, gambir dan kacang serta barang lain seperti kain, besi, keramik cina, serta makanan dan minuman Eropa yang didatangkan dari Batavia, Semarang dan Surabaya sedangkan barang yang diekspor terutama kayu jati, tembakau, kopi, tebu dan garam.

Di samping kegiatan pelabuhan dan perdagangan, usaha penangkapan ikan dan penggaraman di Rembang juga merupakan warisan tradisi masyarakat pesisir Rembang semenjak jaman Kerajaan Lasem. Para nelayan tradisional menggunakan perahu *mayang* yang dilengkapi dengan jaring *payang* untuk menangkap ikan. Perahu *mayang* dikenal dengan sebutan “perahu Rembang”. Jaring *payang* yang umumnya dibuat dari agil dan mempunyai kantong di tengahnya yang dioperasikan di laut untuk menangkap ikan layang, tengiri, lemuru dan ikan kembung. Pada tahun 1820 di Rembang tercatat sejumlah 323 buah perahu *mayang*.

Pada akhir abad ke-19 juga digambarkan bahwa Rembang merupakan salah satu pusat penangkapan ikan di sepanjang pantai utara Jawa. Penggunaan jaring *payang* sangat menonjol dalam usaha penangkapan ikan lepas pantai utara Jawa masa itu dan masih dipergunakan masyarakat pesisir Rembang hingga saat ini. Perkembangan selanjutnya sektor maritim di wilayah Rembang justru mengalami kemunduran sebagai dampak dinamika sosial politik seiring zaman perang kemerdekaan pasca-pendudukan Jepang.

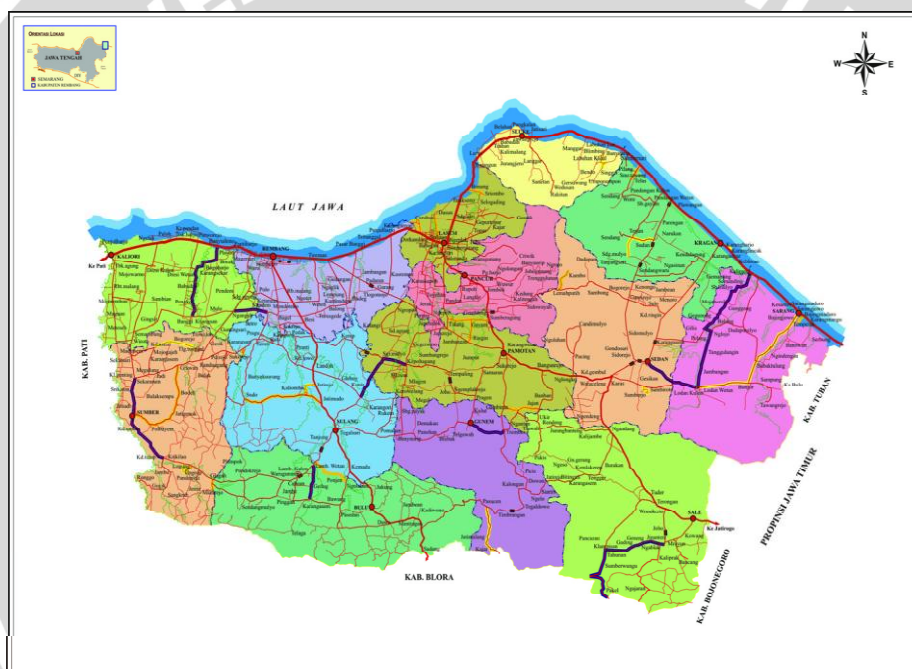
Menarik kesimpulan dari beberapa catatan-catatan sejarah tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Rembang secara historis telah mewarisi tradisi kemaritiman Nusantara yang lebih berhubungan dengan aktivitas ekonomi kebaharian. Jejak sejarah tersebut menunjukkan perkembangan sektor maritim sangat berkaitan dengan keberadaan pelabuhan di lingkungan pesisir Rembang yang telah menghidupkan sendi-sendi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Rembang yang sangat berciri maritim. Seperti ikut berkembangnya sektor pertanian, perikanan, pergaraman, perkapalan, pelayaran, dan perdagangan dengan memunculkan keragaman budaya sebagai dampak interaksi sosial berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya yang semuanya bermula dari adanya aktivitas pelabuhan.

Meskipun pada akhirnya mengalami pergeseran dan kemerosotan terhadap peran dan fungsinya, peran pelabuhan tetap bermanfaat dan memberi pengaruh terhadap perkembangan ekonomi regional. Dengan kenyataan ini, Kabupaten Rembang dipandang mempunyai akar budaya bahari yang kuat yang bila dikelola dengan baik dapat didayagunakan menjadi modal pembangunan daerah pada konteks masa kini. Pengalaman dan perjalanan sejarah tersebut telah membuktikan bahwa Kabupaten Rembang merupakan daerah maritim yang hingga saat ini masih dipandang berpotensi untuk tumbuh berkembang kembali. Fakta-fakta historis ini merupakan salah satu rujukan bahwa pembangunan yang mengedepankan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang telah berangkat dari akar sejarah yang sesuai. Oleh karena itu, pengembangan sektor

kelautan dan perikanan sebagai *leading sector* serta *prime mover* dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang adalah suatu keniscayaan.

b. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km² dengan panjang garis pantai 63,5 km. 35% dari luas wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km².



Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Rembang

Sumber: Rembang Dalam Angka (RDA), Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2012.

Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di antara 111°00' – 111°30' Bujur Timur dan 06°30' – 07°00' Lintang Selatan dengan 14 wilayah kecamatan yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Sale, Sedan, Gunem, Pamotan, Sulang, Sumber, Bulu, Pancur. Secara Administratif Kabupaten

Rembang berbatasan dengan sebelah utara yaitu Laut Jawa, sebelah selatan yaitu Kabupaten Blora, sebelah barat yaitu Kabupaten Pati, dan sebelah Timur adalah Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur).

Wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan dimana didalamnya terdapat 287 Desa dan 7 Kelurahan. Seluruh wilayah Kabupaten Rembang dipergunakan untuk beberapa jenis kegiatan seperti Pertanian, Pertambangan, Kehutanan, Pariwisata, dan Perikanan dan Kelautan. Pemanfaatan wilayah untuk kegiatan perekonomian Kelautan dan Perekonomian terletak di wilayah utara Kabupaten Rembang. Sepanjang garis pantai yaitu sepanjang 63,5 Km dimanfaatkan untuk kegiatan Kelautan dan Perikanan.

c. Penduduk dan Sosial Ekonomi

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang dalam Rembang Dalam Angka (RDA) Tahun 2012 sebanyak 597.262 jiwa pada Tahun 2011. Jumlah tersebut terdiri dari 298.244 jiwa penduduk laki-laki dan 299.018 jiwa untuk penduduk perempuan. Seluruh jumlah tersebut merupakan jumlah total dari 14 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Berdasarkan data tersebut diketahui pula terdapat data penduduk yang memiliki pekerjaan sektor Kelautan dan perikanan. Pekerjaan tersebut diantaranya adalah sebagai nelayan, bakul ikan, dan pemilik usaha pengolahan ikan. Ketiga pilihan pekerjaan tersebut merupakan bidang pekerjaan yang mendukung pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan Minapolitan perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang.

Tabel 5. Jumlah Nelayan di Wilayah Kabupaten Rembang

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Juragan	3.748	3.756	3.761	3.777	3.809
Pandega	15.477	15.947	15.992	16.065	16.673
Jumlah	19.225	19.703	19.753	19.845	20.482

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nelayan setiap tahunnya meningkat. Selain jumlah nelayan bidang pekerjaan yang dipilih oleh penduduk Kabupaten Rembang adalah bakul ikan.

Tabel 6. Jumlah Bakul Ikan di Kabupaten Rembang

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Bakul Ikan	1.069	1.049	1.446	1.477	1.486

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah bakul ikan yang ada di Kabupaten Rembang terjadi fluktuasi. Penurunan jumlah bakul ikan terjadi pada tahun 2010 namun untuk tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi kenaikan kembali. Selanjutnya adalah pemilik usaha pengolahan hasil perikanan tangkap.

**Tabel 7. Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang
Tahun 2009-2011**

Jenis Olahan	2009		2010		2011	
	Unit	Orang	Unit	Orang	Unit	Orang
Pemindangan	31	455	27	438	25	405
Pengeringan/Pengasinan	467	4.692	485	4.710	509	4.945
Pedo	930	3.578	946	10.589	993	11.118
Jambal	32	220	35	228	38	238
Pengasapan	15	85	18	91	20	98
Terasi	522	1.060	532	1.073	558	1.125
Kerupuk	150	450	155	462	163	483
Petis	155	412	160	435	176	490
Presto	120	300	110	280	115	294
Tepung Ikan	24	50	26	60	32	96
Pembekuan	1	60	1	80	1	95
Lain-lain (aneka produk)	16	800	18	820	22	988
J u m l a h	2.488	12.381	2.546	12.630	2.694	21.167

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014

2. Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang memiliki wilayah seluas lebih kurang 60 Ha. Desa Tasikagung memiliki Pelabuhan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung. Adapun batas-batas wilayah Desa Tasikagung adalah

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Komplek bangunan DPRD Kabupaten Rembang

Sebelah Selatan : Jalan Raya Semarang – Surabaya

Sebelah Barat : Sungai Karang Geneng

Wilayah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang terdiri dari 4 RW dan 17 RT. Jumlah penduduk Desa Tasikagung Rembang adalah 3.667 jiwa hingga Tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri dari 1.783 jiwa penduduk laki-laki dan 1.884 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut 90% penduduk usia produktif bekerja padasektor kelautan dan perikanan. Selebihnya yaitu 10% bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, dan lain-lain.

Saat ini Desa Tasikagung telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Rembang dengan berbagai aktifitas kegiatan yang meliputi Perikanan, Perindustrian, dan Perdagangan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi di kawasan tersebut, karena banyaknya aktifitas kegiatan perikanan, yang banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Status sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang disandang PPP Tasik Agung sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) semakin mengukuhkan Tasik Agung sebagai Pelabuhan Ikan terbesar di Kabupaten Rembang.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Kabupaten Rembang memiliki letak geografis sebagai wilayah pantai sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan sebagai kawasan Minapolitan perikanan tangkap. Kondisi ini juga diharapkan akan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan masyarakat lokal. Salah satu wilayah yang menjadi pusat pengembangan adalah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Wilayah tersebut dijadikan Pemerintah Daerah sebagai wilayah dengan pusat kegiatan perekonomian sektor perikanan tangkap. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Tasikagung dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dengan berbasis Minapolitan perikanan tangkap dalam upaya melakukan perencanaan dalam pembentukan kawasan Minapolitan perikanan tangkap.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Desa Tasikagung sudah cukup memadai untuk dijadikan wilayah pengembangan Minapolitan perikanan tangkap. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik, tata ruang wilayah, ketersediaan sumberdaya yang diperlukan, serta integrasi dengan wilayah pendukung. Penetapan Desa Tasikagung menjadi pusat pengembangan Minapolitan perikanan tangkap adalah letak geografis wilayah yang berhadapan

langsng dengan Laut Jawa, penggunaan kawasan sebagai pelabuhan sejak zaman penjajahan, serta tingkat kepekaan masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari N (L : 65 Th) yang merupakan warga Desa Tasikagung yang menyatakan bahwa:

“Zaman dahulu pas zaman Belanda Tasikagung ini sudah jadi pelabuhan perdagangan. Perdagangan barang dari luar daerah sana selain juga untuk mendukung perdagangan di Lasem sana. Kan dulu banyak pedagang China. Orang China dulu mengajarkan juga cara membuat kapal, dahulu bukan kapal galangan besar seperti sekarang tetapi masih perahu jukung (Kapal Kecil) ya akhirnya berlanjut jadi bisa berlayar dan menjual ikan di Pelabuhan itu. Dari zaman dahulu pelabuhan itu ramai sekali. Apalagi di sebelah barat Desa Tasikagung kan ada Sungai Karanggeneng itu nah itu jadi alasan kenapa Desa Tasikagung ini menjadi pelabuhan yang ramai. Semakin lama karena banyak nelayan yang menangkap ikan disini akhirnya pelabuhan Tasikagung itu hanya untuk perikanan sedangkap pelabuhan barang pindah di Lasem kan juga punya Sungai Bagan jadi sistemnya sama saja. Setelah puluhan tahun makin lama banyak masyarakat yang jadi nelayan, punya usaha pengolahan meskipun dulu itu perorangan. Misalkan usaha pemindangan ikan ini dulu tempatnya tempayan dari tanah, jualnya jalan kaki sampai Blora. Sekarang sudah sangat berkembang pesat karena ya banyak bantuan dari Pemerintah misal bantuan pembangunan TPI, disediakan alat pelelangan yang cukup seperti timbangan, basket, gledeskan (gerobak), dan banyak lagi yang sangat membantu sekali. Tasikagung ini sampai sekarang menjadi tumpuan masyarakat. Masyarakat Tasikagung atau masyarakat luar di Rembang” (Hasil wawancara 19 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa memang Desa Tasikagung merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sejak dulu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dengan Sn (L : 50 Th) Selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kealutan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:

“ Pelabuhan perikanan yang ada di Desa Tasikagung memang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana. Selanjutnya berkembang sedikit demi sedikit hingga menjadi besar seperti sekarang ini .Karena berkembang kemudian banyak sekali warga daerah Rembang ini yang menjadi pelaku ekonomi sektor perikanan

tangkap seperti nelayan, bakul, pengolah, dan sebagainya sehingga pada tahun 1957 urusan organisasi nelayan dan pelelangan ikan menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang pada waktu itu sesuai dengan UU Keadaan Bahaya tentang peraturan penguasa daerah teritorial IV No. PERR P.P.D./007/4/1958. Dengan adanya dasar hukum tersebut maka pada tahun 1962 dikeluarkanlah Perda Nomor 10 Tahun 1962 Tentang Penjualan/pelelangan hasil laut. Dari itulah awal dimulainya perhatian kepada Desa Tasikagung Rembang sebagai wilayah pusat perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Menanggapi dikeluarkannya Permen KP Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan Kami tidak terburu-buru untuk meningkatkan status wilayah Desa Tasikagung menjadi kawasan Minapolitan yang ditetapkan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dilakukan karena menurut kami yang lebih penting dahulu adalah menjadikan Tasikagung yang mandiri dengan dukungan pembangunan, fasilitas, dan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan pula nanti pasti akan diusulkan menjadi kawasan Minapolitan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Selain itu juga Minapolitan belum tentu dipahami oleh masyarakat lokal” (Hasil Wawancara Tanggal 24 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya Pemerintah Daerah telah memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik akan keberadaan potensi yang dimiliki oleh Desa Tasikagung Rembang pada pengembangan Minapolitan perikanan tangkap. Senada dengan pernyataan di atas, pernyataan pendukung juga datang dari M (L : 45 Th) yang merupakan seorang nelayan sekaligus warga Desa Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“ Kalau tentang Minapolitan saya tidak paham. Tapi kalau melihat apa yang ada di Desa Tasikagung ini saya melihat sudah memadai. Baik dari peran masyarakat dari nelayan, bakul, pengusaha, petugas dari TPI, pelabuhan, dan Pemerintah juga sudah baik. Penataan ruang juga sudah lumayan baik melihat kondisi wilayah yang tidak terlalu luas namun hampir semua fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia. Misalkan pembangunan fisiknya harus lewat jalan reklamasi ya tidak masalah asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang direncanakan menjadi kawasan Minapolitan sesuai dengan ketentuan ya lebih baik tetapi lebih baik fokus pada pembangunan wilayahnya dulu untuk kepentingan bersama” (Hasil Wawancara tanggal 26 November 2014).

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Tasikagung merupakan keberlanjutan dari pembangunan yang dulu memang telah ada. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ini didasarkan pada ketersediaan Sumberdaya alam yang memang bersal dari wilayah tersebut. Selain itu ada hal yang menjadi fokus adalah pangsa pasar untuk perikanan tangkap. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di tiga pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rembang yaitu Pasar Kragan, Pasar Kebloran, dan Pasar Pandangan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa mayoritas penjual ikan menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Hanya ditemukan 1-3 orang yang menjual ikan hasil budidaya. Hal tersebut terjadi karena minat dan daya beli masyarakat yang lebih menyukai ikan hasil tangkapan nelayan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan K (P : 40 Th) yang merupakan salah seorang penjual ikan yang menyatakan bahwa:

“Orang-orang lebih suka beli ikan laut daripada tambak. Karena memang sudah terbiasa makan ikan laut. Pilihan jenis lebih banyak.harganya juga macam-macam tergantung kondisi musim penangkapan. Macam-macam ikan laut juga banyak tinggal memilih jenis ikan sesuai harga. Ikan kalau sudah dibeli kalau untuk ibu rumah tangga ya lebih banyak pengolahannya. Banyak yang bilang ikan laut lebih enek dari ikan tawar” (Hasil wawancara tanggal 19 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa pangsa pasar lokal memiliki tingkat ketertarikan yang besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil perikanan tangkap memang memiliki kesesuaian dengan selera masyarakat dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Hal itu pula yang kemudian berpeluang untuk memperluas pangsa pasar.

Pengembangan kawasan Minapolitan merupakan program nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilaksanakan oleh daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dimana Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan tetapi bukan Minapolitan perikanan tangkap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dj (L : 50 Th) yang merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:

“Memang benar bahwa Kabupaten Rembang belum ditetapkan sebagai Kabupaten dengan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap hingga saat ini. Tetapi kita telah berupaya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan para pelaku dan masyarakat perikanan. Meskipun bukan fokus utama namun kami juga tetap akan berupaya untuk mengusulkan itu. Sejauh ini yang menjadi fokus adalah pengembangan perikanan tangkap yang sudah adadan berjalan selama ini. Mekanisme yang dilaksanakan memang ada menggunakan dasar pedoman Minapolitan sesuai dengan aturan yang berlaku” (Hasil wawancara 20 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memang belum ditetapkan sebagai Kabupaten minapolitan perikanan tangkap. Sehingga sejauh ini dasar pengembangan Minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Rembang di tolong dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD). Hal tersebut didukung dengan pernyataan Sn (L : 50 Th) selaku kepala seksi Pengolahan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Rembang terutama diwilayah Tasikagung sejauh ini didasarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Pada RPJMD Kabupaten Rembang tercantum dalam Bab VIII Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan bidang Kelautan dan perikanan huruf (e) dalam program pengembangan perikanan tangkap angka (15) tentang pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Tasikagung. Selain RPJMD, pengembangan perikanan tangkap juga ditunjang dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang. Karena belum ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan tangkap tidak menutup kemungkinan mengadopsi regulasi tentang Minapolitan” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan memiliki dasar yang jelas. Meskipun belum menjadi kawasan Minapolitan perikanan tangkap maka regulasi yang dapat digunakan selain RPJMD, dan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan serta Keputusan kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.

Dasar Regulasi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pengembangan Minapolitan perikanan tangkap. RPJMD Kabupaten Rembang berisikan tentang Kebijakan umum dan strategi dalam program pembangunan daerah. Berdasarkan rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan kebijakan tentang pengembangan ekonomi rakyat yaitu dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Kelautan dan perikanan tangkap. Pengembangan ini juga termasuk di dalamnya adalah pengembangan di Desa Tasikagung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

yang dikemukakan oleh Dj (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan perikanan laut/perikanan tangkap yang ada di Rembang selama ini berdasarkan RPJMD dan dasar hukum yang mendukung. Dengan Visi Kabupaten Rembang dalam mewujudkan obsesi *seafront city* serta letak geografis yang cocok. Kondisi di Tasikagung menjadi Pemerintah semakin yakin untuk mengajak masyarakat yang telah banyak berfikir mandiri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Hasil pemaparan diatas menunjukan bahwa Pemerintah menyadari akan penentuan dan pemilihan tempat di Desa Tasikagung. Hal tersebut didasarkan atas kesesuaian kondisi fisik serta kondisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mandiri dan memiliki kemauan untuk diajak melakukan pembangunan perikanan tangkap.

Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap merupakan bentuk kegiatan pembangunan yang berfokus pada perencanaan wilayah yang didukung oleh pengelolaan perikanan tangkap. Perpaduan kedua fokus tersebut membutuhkan pengelolaan yang tepat. Selain itu juga membutuhkan koordinasi aktor beserta perannya untuk pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap ini.

Selanjutnya yang menjadi fokus terpenting adalah siapa saja aktor/*stakeholder* yang memiliki peran dan kontribusi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi

Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan sebuah upaya pembangunan jelas yang perlu diketahui adalah siapa saja aktor yang terlibat atau berperan didalamnya. Aktor ini juga menyangkut peran dan kepentingan yang ada didalamnya pula. Aktor ini juga melaksanakan peran pada setiap bidang kegiatan yang berbeda. Kaitannya dengan Pengembangan di Desa Tasikagung. Ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya seperti Dinlutkan yang mewakili pemerintah daerah yang menangani bidang perikanan khususnya perikanan tangkap. Dalam kinerjanya Dinlutkan bekerjasama dengan SKPD lain misal Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan fisik, Bappeda untuk perencanaan tata ruang pembangunan, UPT Pelabuhan dan Kesyahbandaran untuk pengelolaan pelabuhan, Petugas TPI untuk proses lelang termasuk UPBI, KUD Tasikagung untuk mengelola keuangan nelayan dan kepentingan nelayan, bidang keamanan bekerjasama dengan Polair, TNI AL. Kelembagaan nelayan dengan HNSI. Koordinasi dengan Pemerintah desa Tasikagung. Yang paling penting adalah dengan masyarakat perikanan, nelayan, bakul ikan, pemilik unit usaha bidang perikanan. Namun sayangnya di Rembang belum punya BUMD yang khusus menangani pengelolaan bidang perikanan tangkap” (hasil wawancara tanggal 27 November 2014).

Pernyataan tambahan juga di berikan oleh M (L : 45 Th) yang merupakan seorang warga Desa Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“Karena urusan pengelolaan perikanan di Tasikagung ini sangat banyak jadi pihak yang terlibat juga pasti banyak. Apalagi segala macam kebutuhan yang harus terpenuhi juga sangat banyak pula. Jangan dilupakan juga permasalahan yang perlu diselesaikan juga banyak sekali” (Hasil wawancara tanggal 30 November 2014).

Pernyataan mendukung juga datang dari Dj (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:

“Pihak akademisi atau perguruan tinggi juga beberapa yang memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan di Tasikagung ini. Perguruan ini berbentuk perorangan maupun kelembagaan. Beberapa kontribusi juga mereka berikan” (Hasil wawancara tanggal 27 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa banyak aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap yang ada di Desa Tasikagung Rembang. Seluruh aktor/*stakeholder* sedikit banyak telah memiliki peran dan memberikan kontribusi di dalamnya. Selain menunjukkan perannya terdapat pula gambaran akan adanya koordinasi antar aktor tersebut. Peran ini sangat menunjang pelaksanaan perencanaan yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 8. Rincian Aktor Yang Terlibat Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Rembang

No	Bidang	Aktor/ Stakeholder	Rincian Bidang
1	Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang 2 SKPD yang terkait dan berkoordinasi (Dinas PU dan Bappeda) 3 Perguruan Tinggi (Akdemisi) 4 Masyarakat Lokal	-Perencanaan Pengembangan Kawasan serta perencanaan Program yang akan dilaksanakan
2	Pengelolaan Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang 2 KUD Tasikagung Rembang 3 Masyarakat Lokal 4 UPBI 5 Lembaga Keuangan Swasta	-Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Perikanan -Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas dan Permodalan -Pengelolaan Hasil dan Produksi Perikanan

3	Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Masyarakat Lokal 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 SKPD terkait 4 UPT Pelabuhan dan Kesyahbandaran 5 Pengelola TPI Tasikagung 4 Polair,TNI AL,HNSI	-Pelaksanaan peran <i>Stakeholder</i> tingkat Lapang -Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana -Pelaksanaan Fasilitas -Pelelangan Hasil Penangkapan -Penyelesaian Konflik dan permasalahan
4	Pengawasan Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Masyarakat Lokal 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Akademisi /Perguruan Tinggi 4 pemerintah Desa Tasikagung	-Kontrol pelaksanaan Pengembangan Kawasan -Pengawasan Pengelolaan Sarana dan prasarana serta Fasilitas

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa Aktor/*Stakeholder* yang terlibat/berperan dalam pengembangan kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap ini secara tersirat di dominasi peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Peran tersebut tidak terlepas dari Peran SKPD lain yang terkait. Selain Dinas Kelautan dan Perikanan, aktor yang mendominasi adalah mamsyarakat lokal yang juga merupakan bagian dari *stakeholder* tingkat lapang. Pelibatan masyarakat intensif karena masyarakat lokal yang didalamnya terdiri dari nelayan, bakul ikan, dan pemilik unit usaha perikanan selain sebagai sasaran juga sebagai aktor penting. Selanjutnya aktor pelaksana yang terlibat adalah SKPD terkait

seperti Dinas PU, Bappeda, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pengelola TPI Tasikagung, KUD Tasikagung Rembang, UPBI, Petugas Keamanan seperti Polair dan POS TNI AL, Pemerintah Desa Tasikagung, dan Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi.

Peran masing-masing aktor merupakan fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Peran serta dan koordinasi dilakukan dalam menjalankan perencanaan program dan pelaksanaannya agar tercapai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di kawasan Desa Tasikagung.

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang melibatkan banyak aktor/*stakeholder* yang memerikan peran serta dan kontribusinya masing-masing. Aktor/*stakeholder* yang berperan didalamnya adalah Pemerintah, Masyarakat Lokal, Swasta serta Akademisi. Aktor dari Pemerintah terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang dan Kesyahbandaran, Pengelola TPI Tasikagung Rembang, KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang, serta Petugas Keamanan dari Polair dan Pos TNI AL. Selanjutnya dari Masyarakat lokal terdiri dari nelayan termasuk didalamnya adalah Paguyuban nelayan, Bakul Ikan, Pemilik usaha pengolahan hasil penangkapan, dan pemilik usaha penunjang sektor perikanan. Sektor Swasta adalah Lembaga Keuangan Swasta. Akademisi merupakan aktor yang berasal dari perguruan tinggi.

Pelaksanaan peran aktor dilakukan pada bidangnya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap aktor yang terlibat memiliki peran masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya. Hal tersebut juga berhubungan dengan bidang-bidang yang ditangani. Karena pengelolaan kawasan tasikagung ini khususnya perikanan sangat kompleks hal tersebut juga untuk meminimalisir adanya penangananan yang tumpang tindih” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

a. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan perikanan tangkap. SKPD yang ditunjuk untuk menangani bidang kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Pelaksanaan pengembangan di kawasan Minapolitan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa peranan yang penting diantaranya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik, Pemberian Fasilitas dan Konsultasi, serta pemberian sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Dj (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Dukungan dalam bentuk pembangunana sarana dan prasarana ini penting karena menjadi jalan untuk kelancaran kegiatan nelayan dan masyarakat. Usaha yang telah dilakukan ini merupakan wujud keseriusan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan di Tasikagung” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2014).

Hal Tersebut didukung oleh pernyataan M (L : 45 Th) yang merupakan warga Desa Tasikagung yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana jelas sangat penting bagi masyarakat nelayan. Kalau tidak sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin kegiatan ekonomi perikanan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana itu merupakan dukungan yang paling utama untuk dilakukan. Meskipun harus bertahap namun sejauh ini sudah cukup memenuhi di Desa Tasikagung ini terutama di wilayah pelabuhan” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Beradsarkan pemaparan diatas mnggambarkan bahwa pemerintah dan masyarakat sepakat untuk menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kegiatan ekonomi perikanan. Dukunagn ini merupakan bentuk kesadaran dan bentuk pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap sesua dengan rencana pembangunan yang telah disusun.

Salah satu bentuk pembangunan sarana dan prasarana adalah pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik merupakan penunjang yang penting untuk disediakan. Salah satu diantaranya adalah pembangunan *Breakwater* sebagai pelaksanaan program kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.



Gambar 7. Breakwater

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014

Pembangunan infrastruktur fisik merupakan salah satu bentuk pemenuhan fasilitas dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Keterangan datang dari Dj (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk fisik diwujudkan dalam bentuk fasilitas yang terbagi menjadi 3 (tiga). Fasilitas tersebut adalah fasilitas pokok, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang. Meskipun belum sempurna namun diharapkan mampu untuk mendukung kegiatan yang ada di Desa Tasikagung guna mengembangkan kawasan perikanan” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2014).

Upaya untuk memberikan fasilitas baik fasilitas pokok, fasilitas operasional, maupun fasilitas penunjang merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam perannya membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perekonomian perikanan tangkap yang ada di kawasan Minapolitan Desa Tasikagung Rembang.

Tabel 9. Fasilitas yang ada di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Tasikagung Rembang

No	Fasilitas	Uraian
1	Fasilitas Pokok	a. Alur laut dengan ukuran diameter 2 meter dan panjang 70 meter b. Dermaga bongkar dengan ukuran 5x200m² c. Dermaga <i>Fender</i> dengan luas 400 m² d. Dermaga Perbekalan dengan luas 310 m² e. Kolam laut seluas 70 m² f. <i>Breakwater</i> sepanjang 116 m dan memiliki jarak dengan daratan sejauh 79 m g. Talud <i>sheeypile</i> dengan luas 555 m² h. Talud beton dengan luas 600 m²

2	Fasilitas Fungsional	a. Tanah dengan luas 3900 m ² b. Gedung TPI luas 656 m ² c. Penyediaan: - Instalasi Listrik - Menara air artesis - Air bersih PDAM - Mekanikal dan Elektrikal - Hidrant d. Lantai jemur alat tangkap seluas 200 m ² e. Kios untuk usaha 39 unit f. SPBN sebanyak 3 unit g. <i>Coldstorage</i> sebanyak 1 unit
3	Fasilitas Penunjang	a. Area parkir b. Sarana MCK c. Jalan d. Kantor Administrasi Pelabuhan e. Kantor Kamla yang dipergunakan oleh Satpolair, Pos TNI AL, dan HNSI

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2014

Berdasarkan tabel rincian fasilitas diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam melakukan pengembangan di kawasan minapolitan di Desa Tasikagung Rembang. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan membangun sarana dan prasarana fisik meskipun bertahap dan belum seluruhnya ada. Selain infrastruktur fisik, pemberian sarana juga dalam bentuk pelayanan untuk dokumen perizinan bidang perikanan tangkap.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pengurusan izin untuk nelayan dan masyarakat nelayan di Tasikagung tersebut memang di urus terlebih dahulu disini. Meskipun hanya beberapa izin yang memang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang. Ada beberapa yang memang yang harus diurus ditempat lain seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Nelayan ada

yang mengurusnya sendiri, ada pula yang menguruskan melalui pihak lain seperti lewat pegawai KUD. Beberapa dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh dinas Kelautan dan perikanan adalah surat rekomendasi kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan dapat membelinya di SPBN maupun di SPBU. Selain itu ada surat rekomendasi untuk kebutuhan nagkutan untuk pengangkutan BBM bagi nelayan atau kapal untuk melaut. Untuk dokumen perizinan yang lain Dinas Kelautan dan Perikanan hanya membantu menguruskan seperti pengurusan SIUP, SIPI, Surat Keterangan Kecakapan, Surat Pas Besar, Surat ukur kapal, Surat ijin berlayar, Sertifikasi kelautan, dan Grosse Kapal” (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Sm (L : 38 Th)

yang merupakan salah seorang nelayan yang menyatakan bahwa:

“Kalau surat-surat untuk nelayan melaut itu ya memang yang mengurus pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Biasanya Juragan kapal itu minat bantuan pegawai KUD untuk menguruskan karen tidak sempat. Yang penting kelengkapan suratnya terpenuhi. Misal harus ngurus ke Semarang juga pada gak ada waktu mas. Pada bingung juga prosedurnya. Paling penting bagi nelayan kan SIUP, SIPI, sama Surat Keterangan Kecakapan yang setiap saat harus dibawa saat melaut. Jadi kalau Dinas mau membantu seperti itu ya Alhamdulillah” (Hasil wawancara tanggal 29 November 2014).

Senada dengan pernyataan diatas, pernyataan juga datang dari Dr (L :38 Th)

yang merupakan pemilik usaha jasa pengangkutan BBM untuk nelayan yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau bekerja harus menggunakan izin khusus. Karena muatan ini muatan khusus untuk kerja perikanan bukan untuk dijual lagi. Lagipula kalau kita ngambil di SPBU juga mana mungkin boleh beli pakai jerigen gini kalau tidak ada surat izin dari dinas. Ini juga harus menyertakan syrat-surat yang lain seperti Surat Layak Operasi dari syahbandar, sama SIPI dan SIUP pemilik kapal “ (Hasil wawancara tanggal 20 November 2014).

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah memiliki daya dukung yang besar terhadap pengembangan kegiatan ekonomi oleh masyarakat di kawasan minapolitan di

Desa Tasikagung. Pemerintah secara sadar memahami kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya.

Selain Dinas Kelautan dan Perikanan, peran pemerintah juga dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang yang menangani pengelolaan pelabuhan. Dukungan Pernyataan datang dari Sk (L : 50 Th) selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kewenangan Pelabuhan Tasikagung ini dilakukan oleh UPT PPP Tasikagung yang dibentuk oleh Dinlutkan Provinsi. Berdasar pada PerGub Nomor 38 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata UPT pada dinlutkan Provinsi Jawa Tengah. Tugasnya itu seperti kontrol ketertiban kapal, pengelolaan pelabuhan, menjaga kenyamanan nelayan dan masyarakat, pengawasan penggunaan fasilitas pelabuhan, dan bekerjasama dengan pusat informasi PPP Tasikagung untuk memberikan data dan informasi tentang perikanan di wilayah Tasikagung” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014)

Pernyataan dukungan juga datang dari M (L : 45 Th) yang merupakan warga desa Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“Tugasnya UPT dan Kesyahbandaran itu ya kontrol kapal yang datang, ketertiban kapal di dermaga, pengelolaan fasilitas pelabuhan, sama ketertiban para nelayan. UPT juga bekerjasama dengan nelayan untuk mengurus masalah nelayan” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Peran pemerintah selanjutnya adalah Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI merupakan tempat dimana pelaksanaan proses lanjutan setelah penangkapan ikan dilakukan yaitu pelelangan ikan. Pernyataan datang dari I (P : 35 Th) yang merupakan salah satu bakul ikan yang menyatakan bahwa:

“Pelelangan di Tasikagung di lakukan di dua tempat. Di TPI yang lama (TPI Tasikagung I) digunakan untuk Kapal Cantrang kalau yang TPI baru (TPI Tasikagung II) untuk Kapal Mini *Purse Seine*. Proses pelelangan setiap hari dimulai pukul 07.00 pagi sampai kapal yang melelang selesai sesuai dengan nomor urut lelang. Kalau banyak yang lelang yang bisa sampai sore atau

mala tapi kalau kondisi biasa ya sampai siang saja. Setelah lelang ya urusannya bakul buat bayar ke kasir TPI mau pakai modal sendiri atau lewat UPBI. Setelah itu Kasir TPI memberi SPU kepada Nelayan untuk di tukar dengan uang sebagai hasil pendapatan nelayan melaut” (Hasil wawancara tanggal 20 November 2014).

Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Desa Tasikagung sudah pasti memiliki fase perencanaan pembangunan terlebih dahulu. Proses perencanaan pembangunan juga melibatkan aktor lain dalam melaksanakan perannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dj (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Jelas bahwa dalam proses perencanaan bidang perikanan tangkap kita koordinasi dengan pihak lain. SKPD ataupun masyarakat. Dalam hal penyusunan program kegiatan dan RPJMD misalnya saja, kan koordinasi dengan SKPD seperti Bappeda, KUD, Masyarakat, UPT Pelabuhan. Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pasti juga berhubungan dengan Dinas PU dan masyarakat lagi” (Hasil wawancara tanggal 27 November 2014).

Pernyataan senada juga datang dari Sn (L: 50 Th) selaku Kepala seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“ Kerjasama itu jelas ada. Misal dalam penataan ruang mana yang akan dilakukan pembangunan fisik misal kan kerjasamanya sama Dinas PU sama Bappeda. Misal Dinlutkan yang memberi arahan bentuk pembangunan, Bappeda yang menentukan penataan lokasi sedangkan Dinas PU yang melakukan pelaksanaan hingga melakukan teknis lelang, hingga pengerjaan pembangunan infrastrukturnya itu. Dalam perencanaannya kami juga berkonsultasi dengan masyarakat Desa Tasikagung mengenai apa yang sekiranya mereka butuhkan lagi. Nah ada juga kerjasama dengan perguruan tinggi, melalui konsultasi pembangunan, konsultasi perancangan tata ruang dan sebagainya. Tentu tidak melupakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa” (Hasil wawancara tanggal 5 Januari 2015).

Pernyataan dukungan juga datang dari M (L : 45 Th) yang merupakan warga Desa Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama ya ada. Kayak pembangunan jalan dipinggir pantai itu yang ngerjakan orang PU. Kontruksinya yang mengerjakan dari Pati. Tapi yang merancang pembangunan Dinlutkan. awalnya kan dulu masyarakat laporan kalau jalannya sudah rusak, kalau musim panas berdebu sekali mengganggu aktivitas jadi minta di bangun. Alhamdulillah Oktober 2014 mulai dibangun. Kalau dulu Turap penahan itu ya usulan masyarakat. Kan pada lapor kalau musim ombak sampai naik ke jalan akhirnya dibangun. Kadang juga ada Bapak-Bapak pakai baju rapi melakukan *survey* disini, tanya-tanya kebutuhan nelayan apa aja. saya tanya dari perguruan tinggi” (hasil wawancara tanggal 21 November 2014).

Selain itu pernyataan juga datang dari Sn (L: 45 Th) selaku Sekretaris Desa Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa hanya diberikan informasi tentang permasalahan dan kegiatan yang dilakukan di Desa ini. Informasi itu dari Dinlutkan maupun masyarakat. Biasanya yang dari masyarakat itu dari Paguyuban nelayan kapal Cantrang sama kapal mini *Purse Seine* itu” (Hasil wawancara Tanggal 20 November 2014).

Berdasarkan berapa data wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam perencanaan pengembangan di kawasan minapolitan di Desa Tasikagung Rembang melibatkan koordinasi dengan beberapa aktor. Aktor tersebut melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan merupakan komitmen dari multi aktor yang ada.

Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Manusia merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan di Kawasan Minapolitan. Pengelolaan ini salah satunya adalah keterkainnya dengan koordinasi dalam pelayanan dokumen perizinan bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha Perikanan. Ketrangan di

sampaikan oleh Sn (L: 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pada tanggal 16 November 2014 diadakan Sosialisasi Perizinan Usaha Perikanan dan Gerai Investasi Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara ini dilaksanakan di wilayah kerja PPP Tasikagung Rembang yakni di KUD Mina Rahayu Kragan. Pembicara dari kegiatan tersebut, berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan UPT PTSP Semarang. kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 40 peserta yang berasal dari Nelayan, Pemilik Kapal dan Nahkoda Kapal. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman dan tata cara melakukan perpanjangan SIPI maupun pembuatan SIPI baru” (Hasil wawancara tanggal 19 November 2014).



Gambar 8 . Acara Sosialisasi Peizinan Usaha Perikanan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan,2014

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh Sk (L :50 Th) Selaku Kepala PPP Tasikagung Rembang yang menyatakan bahwa:

“Saya menghimbau kepada pemilik kapal, didalam pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk diurus sendiri agar biaya yang dikeluarkan tidak besar. Selama ini pemilik kapal lebih suka melakukan Perpanjangan SIPI dipasrahkan kepada Pengurus, sehingga biaya yang dikeluarkan bertambah besar” (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Selain koordinasi dalam pengelolaan Sumberdaya Manusi melalui sosialisasi yang telah dilakukan, ketertiban juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya adalah penertiban tambat labuh di PPP tasikagung. Berdasarkan pernyataan dari Sk (L :50 Th) selaku Kepala Pelabuhan menyatakan bahwa:

“Penertiban Tambat Labuh diarea Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai berjalan dengan lancar kemarin. tim gabungan dari PPP Tasikagung, UPT PPUP Dinlutkan Kab. Rembang, PosPolair Tasikagung Rembang dan POS TNI AL, menertibkan kapal-kapal Cantrang yang sandar diarea dermaga yang diperuntukan untuk kapal Mini *Purse Seine*. Penertiban ini merupakan tidak lanjut kesepakatan bersama antara Paguyuban Nelayan Cantrang dan Mini *Purse Seine* yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kab. Rembang dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang. Namun ada beberapa nahkoda kapa yang ternyata belum mengetahui tentang aturan itu ” (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Pernyataan senada datang dari So (L : 27 Th) selaku nahkoda kapal yang menyatakan bahwa:

“kami tidak mengetahui kalau ada larangan sandar di area ini sepanjang 100 meter. Biasanya kalau kami sudah bongkar ikan, kapal kami diam disini beberapa hari sambil menunggu muat perbekalan untuk pergi melaut lagi” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa aktor pemerintah berusaha untuk melakukan kesepakatan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan. Namun apabila memang terjadi hal dimana ada masyarakat yang belum memahami makan hal tersebut menjadi cacatan untuk pelasaan program selanjutnya.

b. Pelaksanaan Peran Pelaku Usaha Lokal Dan Pelaku Usaha Baru

Selanjutnya masyarakat lokal yang masuk dalam aktor tingkat lapang adalah pemilik/pelaku usaha lokal. Pemilihan tempat unit pengolahan ikan di Tasikagung didasarkan pada kedekatan dengan perolehan bahan baku utama dan bahan baku pendukung.

Pernyataan diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:

“Pengolahan seperti pemindangan dan pengasapan serta olahan yang lain di Tasikagung memang merupakan pilihan yang bagus karena jarak dengan pelabuhan perikanan dekat sekali, untuk bahan baku pendukung seperti tenaga kerja, garam, es batu, besek (pengemas ikan pindang), seluruhnya dapat di peroleh di wilayah sendiri. Terutama tenaga kerja yang sekaligus untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Tasikagung. Tenaga kerja di unit usaha pemindangan kan rata-rata atau sebagian besar adalah wanita sekaligus sebagai pemberdayaan wanita nelayan/pesisir laut untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Senada dengan pernyataan dari Sn (L : 50 Th) , pernyataan datang dari Mr (L: 47 Th) yang merupakan salah seorang pemilik unit usaha pemindangan yang menyatakan bahwa:

“Ya karena rumahnya disini jadi membangun usaha disini. Kalau bahan baku ya enak dekat jadi ongkos kirim ikan tidak banyak. kalau pegawai banyak orang sekitar. Besek, garam, bahan bakar juga ada yang jual di wilayah ini. jadi alhamdulillah lancar-lancar saja selama pasar menerima dan harganya sesuai” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas menunjukan bahwa memang kedekatan dengan bahan baku dan bahan pendukung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi usaha yang akan dibangun. Jarak dengan bahan baku merupakan pertimbangan penting terkait dengan biaya distribusi. Tempat

memperoleh tenaga kerja juga sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang ada. Kedekatan akses perolehan bahan baku memberi peluang untuk meningkatkan produksi dalam usaha dan peluang peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kebutuhan bahan baku yang tidak kalah penting adalah tempat ikan pindang (besek). Berdasarkan *survey* yang di lakukan peneliti, hampir seluruh pemilik usaha pemindangan menggunakan “besek” ini. Bahan baku ini didapatkan dari pemilik usaha penjualan besek. Salah satu diantaranya adalah Tn (P : 40 Th) yang menyatakan bahwa:

“Kalau permintaan (besek) ini lumayan banyak.kalau sedang musim ikan banyak bisa lebih dari 30.000 buah sehari. Untuk memenuhi kebutuhan Tasikagung sendiri sama beberapa usaha di Kragan. Paling sedikit 15.000 besek sehari lah. Bahan baku diperoleh dari pengrajin di desa dekat gunung sana karen bahan bakunya dari bambu” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Senada dengan itu keterangan sama juga datang dari Mr (L : 47 Th) yang menyatakan bahwa:

“Kalau bahan ikan dari TPI, besek dari H.Tin, garam dari pengusaha garam di Kaliori (salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang), kalau karyawan dari warga sekitar sini saja. Banyak ibu-ibu yang menata ikan, yang masak bapak-bapak.kalau pakai besek hasilnya lebih kering, gak banyak air.masalahnya di bawanya keluar kota jadi harus bagus” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Ketersediaan bahan baku telah menjadi jaminan dari pemilik usaha pemindangan ikan. Tenaga kerja juga telah tersedia. Bahan pendukung juga telah ada. Hal yang kemudian menjadi fokus utama adalah bagaimana pemasaran akan dilakukan. Pangsa pasar untuk unit usaha pemindangan yang besar seperti ini adalah luar daerah Kabupaten Rembang seperti beberapa daerah di Jawa Tengah

maupun di Jawa Timur. Pangsa tersebut sifatnya produksi yang tergolong besar sehingga penjualan/pemasarannya langsung ke distributor besar maupun langsung ke pasar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mr (L : 47 Th) yang merupakan pemilik unit usaha pemindangan ikan yang mengatakan bahwa:

“Kalau bentuknya unit usaha seperti ini kalau saya kirimnya ke Kota Solo, Blora, Cepu, Purwodadi. Kalau di Jawa Timur biasanya ya Madiun, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Malang, Lumajang, Jember. Jadi sistemnya langsung ke bakul besar atau ke pasar ikan langsung. Tidak jualan perorangan. Kalau yang jualan perorangan biasanya yang perorangan dirumah di jual dipasar Rembang atau Blora tapi bisa jual satuan ikan, kalau saya gak bisa satuan” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).



Gambar 9. Unit Pemindangan Ikan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Selain unit usaha pemindangan yang memang telah lama menjadi salah satu unit usaha yang banyak diminati oleh masyarakat lokal, terdapat unit usaha baru yang ada yaitu penjualan produk ikan segar ke beberapa wilayah di luar Kabupaten Rembang. Penjualan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan

ikan segar untuk kemudian diolah kembali. Unit usaha ini berorientasi diwilayah luar Kabupaten Rembang. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Wr (L : 35 Th) yang merupakan salah seorang pemilik unit usaha pengiriman ikan segar yang menyatakan bahwa:

“Permintaan konsumsi ikan untuk masyarakat diluar wilayah Rembang ini sebenarnya cukup banyak. Saya memulai ini dari tahun 2012 dengan modal kecil. Bersama istri sedikit demi sedikit beli ikan hasil pancingan nelayan sendiri hanya untuk skala kecil. ya Alhamdulillah sekarang sudah bisa memiliki kendaraan sendiri untuk mengirim barang ke luar kota yang agak jauh. Jadi ya dapat dikatakan kalau usaha ini memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan. Masyarakat ya kalau bisa jangan mau kalah sama pabrik dan pengusaha besar lainnya. Membuka kesempatan kerja sendiri kan juga lebih baik” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).



Gambar 10. Produk Unit Usaha Penjualan Ikan Segar

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Gambar diatas merupakan salah satu jenis hasil penangkapan yang merupakan jenis yang paling banyak diminta oleh konsumen. Ikan besar dengan

kualitas super merupakan kebutuhan bahan yang dibutuhkan oleh para pemilik usaha penjualan ikan segar. Ikan dengan ukuran besar dan dalam kondisi segar. Selain bahan baku, bahan pendukung yang digunakan adalah balok es dan garam untuk menjaga kesegaran ikan yang akan dikirimkan kepada konsumen.

Selain daya dukung bahan baku pula, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana pangsa pasar dan strategi pemasaran dalam menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tujuan masyarakat pemilik unit usaha. Hal tersebut dijelaskan dari pernyataan Wr (L : 35 Th) yang merupakan salah satu pemilik unit usaha penjualan ikan segar yang menyatakan:

“Pangsa pasar yang saya pilih itu distributor besar dan pemilik usaha restoran di tempat wisata. Sekarang saya sudah punya 3 (tiga) kota tujuan dengan beberapa distributor yang menampung kiriman saya itu ada Subang, Bogor, sama Jogja. Kalau yang jogja itu yang di daerah Parangtritis sana. Padahal daerah sana daerah pantai tapi distributor saya bilang lebih enak ikan dari laut utara dan lebih banyak peminatnya. Strateginya ya Cuma yang penting kirim ikan yang kualitas bagus sesuai permintaan konsumen, lebih banyak variasi ikan berukuran besar dan sedang sesuai kebutuhan konsumen. Kadang juga kalau ada yang super y kirim cumi-cumi, udang, ya pokoknya pinter-pinter pilih bahan baku juga, selain itu juga ketepatan waktu pengiriman biar konsumen tidak kecewa” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Berdasarkan beberapa penjelasan dan data tentang jenis unit pengolahan hasil perikanan tangkap menunjukkan beberapa hal yang perlu untuk dijadikan perhatian penting. Hal tersebut diantaranya adalah bagaimana partisipasi masyarakat untuk melihat peluang usaha dari lingkungan sekitar.

Selain pembuatan usaha dalam bentuk pengolahan hasil penangkapan ikan, masyarakat lokal memiliki usaha lain yaitu usaha memberikan jasa penyediaan bahan perbekalan untuk nelayan sebelum berangkat melaut. Jenis unit usaha ini merupakan usaha yang memiliki hubungan atau integrasi yang sangat erat dengan

kegiatan penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan unit usaha ini yang membidangi penyediaan logistik dan kebutuhan lain oleh para nelayan saat akan berangkat melaut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ab (L : 40 Th) yang merupakan salah seorang juragan kapal mengungkapkan bahwa:

“Pasti butuh sekali dengan perbekalan, kan dilaut juga butuh makan butuh apa saja yang dibutuhkan nelayan, makanan, Solar, es batu, blarak (daun Kelapa), dan lain-lain. Kalau harus menyiapkan sendiri ya capek. Enak kerjsama sama usaha perbekalan tinggal bayar. ABK juga gak capek. Pokonya tinggal mikir berangkat saja” (hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan bahwa nelayan membutuhkan unit usaha ini untuk mendukung proses kerja. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa memang ada integrasi atau hubungan antara nelayan dengan pelaku ekonomi perikanan lain yang mendukung.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa memang ada integrasi atau hubungan antara nelayan dengan pelaku ekonomi perikanan lain yang mendukung. Integrasi ini merupakan bentuk sistem kerja perekonomian yang baik antar sektor dalam menjalankan usaha perikanan. Hubungan antara nelayan dan unit usaha penyedia perbekalan merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari M (L : 45 Th) yang merupakan seorang nelayan yang mengungkapkan bahwa:

“Memang sangat berhubungan antara nelayan sama penyedia logistik dan penyedia kebutuhan nelayan yang lain. Nelayan butuh logistik, bahan bakar, dan lain-lain sementara unit usaha butuh nelayan untuk dapat keuntungan dan bisa saja membuka lapangan pekerjaan. Dalam urusan logistik dan hal yang lain-lain jelas merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh oleh nelayan. Tidak mungkin juragan atau majikan menyiapkan semuanya sendiri. Maunya semuanya ya tinggal berangkat. Jadi gak usah mikir apa-apa lagi tinggal berangkat dan melaut dengan kebutuhannya semuanya sudah terpenuhi” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh En (P : 30 Th) yang merupakan salah satu pemilik unit usaha penyedia perbekalan nelayan yang menyatakan bahwa:

“Usaha menyediakan kebutuhan buat nelayan saat mau berangkat melaut. Kebutuhannya macem-macem seperti bahan makan, solar,es batu,blarak (daun kelapa),air,dan lain-lain.Jumlahnya sesuai jenis kapal, kan waktu berlayar sama jumlah ABK beda,jadi ya beda-beda” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan memenag ada hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara nelayan dengan pemilik unit usaha penyedia perbekalan nelayan. Berdasarkan Hasil *survey* dan wawancara dengan informan diperoleh keterangan tentang jenis perbekalan nelayan.

Tabel 10. Uraian Kebutuhan Nelayan Saat Proses Penangkapan Ikan

Jenis Perbekalan	Uraian
Logistik	-Bahan Makanan: Beras, Lauk-Pauk, Bumbu Masak, Air Minum, Air Bersih/Air Tawar, Minuman instant,dan lain-lain.
Bahan Bakar	-Solar untuk bahan bakar kapal -LPG untuk bahan bakar memasak makanan
Bahan pendukung	-Es Batu (Balok) -Garam -Blarak (Daun Kelapa)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2014

Penyediaan jasa perbekalan untuk nelayan yang akan berangkat melaut banyak komponen atau bahan yang harus tersedia. Penyediaan seluruh komponen

tersebut membutuhkan kerjasama dengan unit usaha yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan En (P : 32 Th) yang merupakan salah satu pemilik unit usaha penyedia perbekalan nelayan yang menyatakan bahwa:

“Kebutuhan perbekalan nelayan kan banyak jadi harus kerjasama sama yang punya usaha yang lain. Kayak Garam kan harus kerjasama sama pengepul garam di daerah tambak-tambak. Kalau daun kepala ya harus sama pencari daun blarak. Es balok harus sama agen es balok dan dari abrik es balok. Logistik makanan jelas sama pedagang di pasar. Tenaga angkut juga ada yang mengatur. Sama Solar ya juga harus kerjasama dengan pemilik usaha angkutan BBM dari SPBU sana. Kalau tidak kerjasama ya gak bisa karena kebutuhannya banyak sekali” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Selain Usaha penyedia jasa perbekalan, terdapat pula usaha jasa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk perikanan. Pengangkutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perbekalan nelayan untuk bahan bakar dalam proses penangkapan ikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Dr (L : 38 Th) yang merupakan salah satu pemilik unit usaha penyedia jasa angkutan BBM untuk kapal nelayan yang menyatakan bahwa:

“Sudah membangun usaha selama hampir 5 tahun. Ini jasa pengangkutan BBM terutama solar untuk kapal-kapal yang melakukan aktivitas di Tasikagung. Dulu mengangkutnya pakai gledes (gerobak) karena dekat. Ada 3 SPBN yang dimiliki KUD sama perseorangan. Pengangkutan dari SPBN ke kapal. Tapi sekarang harus pakai kendaraan mobil karena semakin banyak kapal yang beraktivitas di sini makanya bebannya semakin banyak. Kalau sudah tanggal 20 ke atas ya harus mengangkut dari SPBU luar pelabuhan Tasikagung yang telah ditunjuk dinas. Penunjukan tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas kelautan dan perikanan untuk jangka waktu tertentu dan kuota tertentu untuk setiap kapal. Kalau saya melayani kapal yang menggunakan jasa penyedia perbekalan yang dikelola unit yang bekerjasama sama saya saja. Selama ini juga sudah cukup banyak” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa unit usaha pengangkutan BBM untuk memenuhi kebutuhan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan

ikan. Selain itu juga menunjukkan adanya kerjasama atau koordinasi antar unit usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sektor perikanan tangkap. Masyarakat memiliki peranan yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi di Kawasan Minapolitan perikanan tangkap Desa Tasikagung Rembang Jawa Tengah.

c. Pelaksanaan Peran Masyarakat Lokal

Selain peran pemerintah daerah terdapat pula peran masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang dimaksud adalah Nelayan, Bakul Ikan, serta Pemilik unit usaha baik pengolahan ikan maupun pemilik usaha penyedia jasa bidang perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang. Masyarakat lokal ini juga memiliki peran penting dalam pengembangan sumberdaya ekonomi di kawasan Minapolitan.

Masyarakat lokal yang mempunyai peranan yang pertama adalah nelayan. Nelayan merupakan salah satu aktor penting sebagai penggerak ekonomi di kawasan Minapolitan di Desa Tasikagung Rembang. Pernyataan datang dari D (L: 35 Th) yang merupakan salah seorang Juragan (Nahkoda) kapal yang menyatakan bahwa:

“Enaknya kalau di Tasikagung itu segala yang dibutuhkan nelayan seperti kami tersedia. Pulang melaut tidak capek lagi karena semuanya sudah ada orang-orang yang mengurus. Penghasilan melaut juga lebih cepat dikasih karena keuangan di TPI ya alhamdulillah lancar. Jadi nelayan pokoknya ya konsentrasinya mencari ikan saja dilaut. Tidak mikir lagi kalau sudah darat. Semua sudah ada yang mengurus” (Hasil wawancara tanggal 23 November 2014).

Senada dengan pernyataan D, ungkapan serupa juga datang dari Sm (L : 38 Th) yang merupakan seorang nelayan menyatakan bahwa:

“Saya sudah mengalami bagaimana rasanya jadi nelayan dari jaman susah dulu sampai sekarang. Kalau dulu waktu masih di TPI Karanganyar jaman dulu ya semua sendiri. Pulang mencari ikan ya masih punya tanggungjawab membawa hasil tangkapan ke TPI sendiri, nunggu pendapatan itu agak lama, sampai beberapa hari bahkan bisa satu minggu. Sekarang meskipun di TPI Karanganyar juga mulai banyak berubah tapi kalau mau sama-sama dibandingkan ya lebih enak di Tasikagung ini. Semua sudah ada. Tapi kalau kapal-kapal datangnya bareng-bareng ya harus mendaratkan kapal di TPI Karang anyar karena saya ikut jadi ABK di kapal punya orang sana” (Hasil wawancara tanggal 23 November).

Berdasarkan kedua pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan juga merasakan bahwa tepat memang apabila Desa Tasikagung ditepakan sebagai wilayah yang menjadi pusat pengembangan perikanan tangkap. Hal tersebut dikarenakan nelayan merasakan bahwa apa yang ada di desa Tasikagung mendukung kerja mereka untuk melakukan pekerjaan bidang perikanan tangkap. Pilihan menjadi nelayan telah menjadi pilihan pekerjaan yang telah dipilih dan berkomitmen untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Sm (L : 38 Th) yang merupakan salah satu nelayan di Kabupaten Rembang yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Desa Tasikagung:

“Nelayan itu tidak cuma pekerjaan. Tetapi nelayan ya hidup kita. Karena banyak yang lahir dari bapak seorang nelayan, hidup disekitar nelayan, makan juga hasil nelayan. Jadi ya nelayan itu sumber hidup. Saya menjadi nelayan sudah 20-an tahun sejak umur 20 tahun sudah melaut. Tidak ada yang memberitahu cara nelayan kerja ya mungkin karena bapak seorang nelayan jadi ya mengalir saja jadi nelayan” (Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2014).

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh M (L : 45 Th) yang mengungkapkan bahwa:

“Jangan ditanya kenapa kita menjadi nelayan. Bukan cita-cita tapi panggilan hidup. Lingkungannya nelayan, saya anaknya seorang nelayan ya pasti jadi nelayan. Saya jadi nelayan sudah lama mulai dari pekerja biasa sampai pernah jadi nahkoda kapal.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2014).

Berdasarkan keterangan dari wawancara yang telah dilakukan bahwa pilihan pekerjaan sebagai nelayan adalah pengaruh lingkungan internal. Pengaruh internal yang dimaksud adalah keluarga, lingkungan sosial, dan ketekunan dalam memilih pekerjaan (keahlian). hal yang menjadi penting adalah manajemen atau sistem pembagian kerja pada saat melaut. Pembagian kerja ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam aktivitas penangkapan ikan terdiri dari banyak kegiatan seperti penentuan posisi penangkapan, tugas untuk pengelolaan logistik, dan tugas yang lain.

Berdasarkan pernyataan dari D (P : 35 Th) yang merupakan salah satu juragan kapal yang menyatakan bahwa:

“Ya memang bagi-bagi kerja itu harus dilakukan karena biar kerjanya juga enak.jadi pas lagi melaut tidak bingung nanti siapa yang jaga umpan, siapa yang masak makan, siapa yang jaga mesin sama bahan bakar biar aman, kalau tidak ada yang tanggap nanti malah gak beres pekerjaannya” (Hasil wawancara tanggal 23 November 2014).

Hal tersebut menjadi penegasan bahwa sebagai juragan dan sekaligus sebagai pengurus kapal harus mampu menjadi pemimpin yang baik. Perawatan kapal dan pengelolaan ABK (Pandega) menjadi hal yang wajib dilakukan oleh juragan kapal. Pengelolaan ini juga tidak lepas dari koordinasi dengan pemilik kapal (Majikan Kapal) yang juga memiliki andil dalam pengelolaan kapal terutama pada hal pengelolaan keuangan dan kebutuhan ABK.

Tabel 11. Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Kapal

Sumberdaya Manusia	Tugas dan Tanggungjawab
Majikan (Pemilik Kapal)	- Bertanggungjawab untuk menyediakan modal awal dan modal perbekalan di awal (Modal Pembuatan Kapal Perbekalan awal). - Bertanggungjawab untuk menjaga komitmen kerja Anak Buah Kapal (ABK).
Juragan (Nahkoda)	- Bertugas untuk mengemudikan kapal pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan - Mengelola keuangan kapal baik uang pembayaran lelang, pembayaran perbekalan, dan pemberian pendapatan ABK - Memimpin semua kegiatan dalam kapal saat melaut.
Pandega (Pekerja Depan)	- Dalam sebuah kapal terdapat 8 orang pandega depan yang bertugas dalam 4 (empat) aspek penting yaitu perbekalan, penyediaan makanan, penangkapan, dan mesin serta bahan bakarnya. - Rata-rata yang memiliki tanggungjawab sebagai pandega depan adalah yang berusia masih produktif karena tanggungjawab yang besar tertama bagian penangkapan.
Pandega Biasa	- Membantu segala aspek dalam kegiatan terutama penangkapan ikan - Hanya konsentrasi pada proses penangkapan ikan

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2014

Melihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas bahwa seorang Majikan (pemilik Kapal) harus memiliki modal awal yaitu berupa Kapal dan alat kelengkapan yang ada di dalamnya serta perbekalan awal. Pemilik kapal ini tidak semua merupakan perseorangan tetapi ada pula yang dimiliki oleh beberapa orang.

Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Ab (L : 40 Th) yang merupakan salah satu nelayan menyatakan bahwa:

“Kalau kapal itu bisa milik sendiri, bisa milik bersama artinya itu gabungan dari beberapa orang (Namun rata-rata ya saudara sendiri). Tapi ada juga satu orang yang punya banyak kapal. Harganya mahal untuk kapal Mini *Purse Seine* sama Cantrang jadi ada yang gabungan. Kalau kapal kecil sebagian besar milik sendiri karena penagkapannya juga sendiri” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Pernyataan senada juga sesuai dengan pernyataan dari M (L : 45 Th) yang menyatakan bahwa:

“Memang kalau mau membuat kapal ya memang mahal tetapi kan ada banyak cara misal gabungan dengan beberapa orang, 2-4 orang lah. Satu kapal mini itu kan harganya 300-600 juta rupiah termasuk alat-alat tangkap, mesin buat jalan, hingga peralatan kecil-kecil tapi penting. Kalau Cantrang lebih mahal lagi soalnya lebih besar, alat tangkapnya juga lebih banyak, mesin yang dipakai juga lebih besar. Sekitar 500-900 juta segitulah”. (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Penegasan tersebut dilengkapi pula dengan pernyataan dari Sd (L : 42 Th) seorang pemilik usaha pembuatan kapal (Galangan Kapal) yang berlokasi di Kecamatan Sarang yang menyatakan bahwa:

“Memang harga pembuatan kapal yang sering beroperasi di Tasikagung termasuk jenis kapal yang sedang dan besar. Jelas harganya mahal karena bahan baku yang digunakan juga sudah mahal, kayu, besi-besi yang digunakan, belum mesinnya, alat tangkapnya. Kalo Kapal Mini itu sampai 500an juta, kalau Cantrang bisa sampai 1 M lah” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Selain dalam hal modal awal, yang tidak kalah penting adalah bagaimana jumlah kebutuhan sumberdaya manusia dan perbekalan dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan sumberdaya kapal dan perbekalan yang sekiranya dibutuhkan.

Tabel 12. Jenis dan Kriteria Kapal yang melakukan Aktivitas di Pelabuhan Tasikagung Rembang

Jenis Kapal	Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)	Kebutuhan Perbekalan
Cantrang	25-35 Orang ABK	-Kebutuhan Perbekalan Kurang lebih 70-100 Juta Rupiah untuk

		masa melaut selama 30-45 hari dengan jarak tempuh hingga 500 mil. -Kebutuhan tersebut meliputi logistik, BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter,es batu sebanyak 8 ton,dan lain-lain.
Mini Purse Seine (Sarang)	Jumlah ABK 20-25 Orang	-Kebutuhan perbekalan sebanyak 10-20 juta Rupiah untuk masa melaut selama 5-8 hari untuk jarak tempuh 100-150 mil. -Kebutuhan tersebut meliputi logistik,BBM Jenis Solar sebanyak 240-300 Liter, dan es batu sebanyak 100 blok
Mini Purse Seine (Kragan)	18-20 Orang ABK	-Perbekalan dengan nilai 7-12 juta untuk masa melaut selama 2-5hari dengan jarak tempuh 40-100 mil. - Perbekalan tersebut berupa perbekalan logistik, BBM jenis solar sebanyak 400-450 liter, dan es batu sebanyak 40 blok.
Mini Purse Seine (Pandangan)	16-20 orang ABK	-Perbekalan dengan nilai 7-10 juta untuk masa melaut selama 2-4 hari dengan jarak tempuh < 60 mil. -Perbekalan berupa logistik,BBM jenis solar sebanyak 300-400 liter dan es batu sebanyak 35 blok.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Selain nelayan, aktor/*stakeholder* tingkat lapang masyarakat lokal yang memiliki peran dalam aktivitas pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor perikanan khususnya perikanan tangkap adalah bakul ikan. Bakul ikan disini tidak diartikan hanya sebagai penjual ikan saja tetapi ada banyak bidang pekerjaan yang dapat di golongankan bakul ikan adalah perantara antara nelayan dengan perusahaan pengolah hasil perikanan, pemilik usaha pengolahan ikan (perorangan) yang

melakukan transaksi untuk membeli bahan baku sendiri, ataupun penampung dari perorangan yang menjual hasil penangkapan.

Keterangan dikemukakan oleh salah seorang bakul ikan yaitu I (P : 35 Th) yang menyatakan bahwa:

“Sudah 8 Tahun bekerja disini, asli warga Tasikagung. Kerjanya ya ini membeli ikan untuk pemilik usaha pengolahan ikan seperti pindang, asap, ikan segar di pasar, dan pemilik usaha tapi skala kecil. Penghasilannya ya dari selisih harga beli dari hasil lelang atau kesepakatan dari penjual skala kecil dengan saya. Lumayan untuk membantu kebutuhan keluarga” (wawancara Tanggal 25 November 2014).

Senada dengan pernyataan dari I, hal yang sama juga dikemukakan oleh N (P : 30 Th) yang mengemukakan bahwa:

“Sudah 10 tahun jadi bakul ikan, saya membeli ikan dari hasil penjualan nelayan dalam skala kecil. kadang juga hasil nelayan mancing. Saya beli ikan untuk dijual lagi tetangga saya di dusun Pacar untuk di olah lagi jadi pindang wajan, asap, ikan asin, nanti dijual lagi di luar daerah atau di pasar Rembang. Keuntungannya lumayan buat keluarga” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Pernyataan tidak jauh beda juga dikemukakan oleh Nk (P : 32 Th) yang merupakan pengumpul ikan dari bakul ikan kecil yang menyatakan bahwa:

“Mengumpulkan ikan dari setoran bakul-bakul kecil, selain itu juga hasil dari penjualan hasil nelayan memancing ikan-ikan besar. Khusus ikan-ikan besar sama cumi-cumi sama Rajungan saja. Soalnya disetorkan ke pemilik usaha yang jual ikan khusus ikan besar dan segar ke luar kota. Jadi harus kualitas super” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah diungkapkan diatas menunjukan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang memberikan potensi untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Besar kecilnya usaha yang dimiliki bakul ikan dipengaruhi oleh pangsa pasar dan pastinya modal

usaha yang dimiliki. Salah satu pernyataan dari I (P : 35 Th) yang merupakan salah seorang bakul ikan yang menyatakan bahwa:

“Kalau modal awal untuk usaha yang skalanya kecil ya tidak begitu besar. Kalau yang bakul ikan yang skala besar punya kerjasama dengan pemilik usaha yang besar tentu modalnya juga harus besar. Modal diperoleh dari beberapa sumber seperti ada yang dari KUD, ada yang dari UPBI, selain itu dari koperasi milik swasta dan Bank-Bank swasta” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa bakul ikan dalam membangun usahanya memperoleh modal dari beberapa sumber dan dengan jumlah tertentu. Semua lembaga keuangan yang memberikan peluang untuk memperoleh modal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Hal tersebut ditambahkan keterangan dari I (P : 35 Th) yang merupakan salah satu bakul ikan yang memberikan keterangan bahwa:

“Kalau dari UPBI atau KUD memiliki kelebihan bunga pinjamannya sangat rendah dan jangka waktunya sedikit lebih lama namun kekurangannya nilai pinjamannya tidak bisa dengan nilai yang banyak karena prinsipnya kan dibagi-bagi atau untuk banyak orang yang ingin memiliki usaha sebagai bakul ikan ataupun meningkatkan usahanya sedikit demi sedikit. Sedangkan yang ingin memiliki usaha lebih besar biasanya ya pinjam modal dari bank swasta” (Hasil wawancara tanggal 28 November 2014).

Modal yang dibutuhkan oleh bakul ikan sejauh ini sudah memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan. Kebutuhan modal yang seharusnya besar memang tidak dapat terpenuhi secara langsung tetapi dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pengembangan suatu kawasan tidak terlepas dari adanya permasalahan atau bahkan konflik. Potensi ini dapat terjadi baik dalam kawasan maupun dengan pihak luar. Hal tersebut juga terjadi pada nelayan di kawasan

Tasikagung Rembang dan daerah sekitar di Kabupaten Rembang. Salah satu buktinya adalah ketika terjadi peristiwa sebanyak 375 Anak Buah Kapal (ABK) dari 15 kapal nelayan asal Kecamatan Sarang dan Kragan Rembang Jawa Tengah yang ditangkap nelayan warga Kepulauan Masalembu, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan kapal-kapal tersebut dianggap melanggar area tangkap. Jumlah ABK dari 15 kapal yang tertangkap rata-rata per kapal ada 25-30 orang ABK. Berdasarkan Pernyataan dari SI (L : 37 Th) yang merupakan seorang pengurus KUD Mina Rahayu Kragan menuturkan:

“Ratusan nelayan Rembang yang tertangkap oleh nelayan Masalembu pada saat itu memang tidak mendapat jaminan makan sehingga proses pembebasan harus bisa segera dilakukan. Biar tidak terjadi kelaparan. Kasihan mereka jika tidak segera dibebaskan, selain ancaman kelaparan karena perbekalan mereka habis, ikan hasil tangkapan mereka akan membusuk jika dibiarkan berlama-lama di sana. Bisa-bisa mereka tekor ratusan juta, karena tangkapan mereka busuk dan juga harus memberikan uang jaminan untuk pembebasan”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2014)

Kasus penyanderaan kapal nelayan Rembang oleh nelayan Masalembu merupakan salah satu kejadian yang terjadi terkait kesalahpahaman antar nelayan di beberapa wilayah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sn (L : 50 Th) yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang juga terlibat dalam penyelesaian permasalahan tersebut menyatakan bahwa:

”Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah batas tangkap ikan kan 12 mil dari bibir pantai, namun nelayan setempat (Masalembu) menganggap jarak yang diketemukan kurang dari itu. Pendapat lain dari nelayan Rembang yang menyatakan bahwa mereka mendekat 20 mil dari dermaga. Otomatis ini akan merugikan nelayan lain sebab jika melanggar akan ditangkap nelayan setempat dan diminta tebusan. Pemerintah harus bisa menertibkan

masalah ini agar tak ada kejadian lain, batasan tangkapan sudah tertera pada SIPI dan sudah dijelaskan pada nahkoda kapal” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014)

Sementara itu hasil pertemuan pemilik kapal bersama pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta KUD Mina Rahayu Kragan dan KUD Miyoso Mardi Mino Sarang, Bersama perwakilan dari pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Syahbandar, Satpolair, dan TNI Angkatan Laut Rembang, terkait teknis pertemuan dengan pihak kelompok nelayan dan aparat terkait di Masalembu.

Keterangan lebih lanjut kembali disampaikan oleh Sn (L : 50 Th) yang menyatakan bahwa:

“Sebanyak 15 kapal motor nelayan yaitu sebanyak 12 merupakan milik nelayan Sarang dan 3 milik warga Kragan sebelumnya dikabarkan ditangkap oleh petugas di wilayah Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur ternyata ditangkap oleh kelompok nelayan Masalembu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dianggap melanggar zona larangan melaut di kawasan perairan nelayan tradisional di wilayah itu. Kelompok nelayan Masalembu menginginkan agar kapal yang menggunakan alat tangkap jenis trawl tidak memasuki perairan di bawah 30 mil. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2011 kapal berpukat hela atau trawl boleh menangkap ikan hingga 12 mil” (hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari M (L : 45 Th) yang merupakan salah seorang warga Tasikagung menyatakan bahwa:

“Masalah yang terjadi seperti ini sudah berulang kali terjadi, masalah yang umum ya kesalahpahaman. Kapal sudah ada SIPI udah tau wilayah pencarian ikan dimana dan yang tidak boleh dimana saja. Nahkoda juga sudah pada paham. Di kapal juga sudah ada GPS. Masalah ini juga akhirnya diselesaikan dengan penebusan setiap kapal sejumlah 50 juta rupiah. Ini kan sangat merugikan sekali. Ya selanjutnya tidak ada kayak gini lagi. Kasian ABKnya.” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kkordinasi antar aktor juga terlihat pada komitmen dalam pelaksanaan penyelesain permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa memang aktor telah siap dalam melaksanakan hal termasuk dalam penyelesaian masalah. Peran aktor sesuai dengan kapasitas menjadi penting untuk selalu dilaksnakan dan menjaga komunikasi dengan baik.

d. Pelaksanaan Peran Koperasi

Pelaksanaan pengelolaan keuangan nelayan dilakukan Unit Permodalan Bakul Ikan (UPBI) dan Koperasi Unit Desa (KUD) Suroyo Mino Tasikagung Rembang. Pernyataan dukungan datang dari M (L : 45 Th) yang merupakan salah seorang warga Desa Tasikagung yang menyatakan:

“KUD itu mengelola kepentingan nelayan dan bakul ikan. Kepentingan nelayan ya termasuk keuangan, pembayaran hasil lelang yang kerjasama UPBI dan TPI, pengelolaan retribusi nelayan dalam setiap proses lelang dan berkomunikasi dengan kelompok nelayan setiap ada permasalahan” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat dilihat bahwa peran setiap bagian dari pemerintah memberikan banyak dukungan terhadap pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapoltan di Desa Tasikagung. Hal tersebut ditunjukan dengan kesadaran peran dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Pelaksanaan peran juga menunjukan komunikasi antar peran untuk meningkatkan kontribusi dalam proses pembangunan wilayah.

Selain masyarakat lokal yang menjadi aktor/*stakeholder* utama dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasisi minapolitan perikanan

tangkap ada pula aktor utama lain yang memiliki peran yang besar. Aktor tersebut adalah dari swasta yang memberikan dukungannya untuk upaya pembangunan ditingkat daerah.

e. Pelaksanaan Peran Lembaga Keuangan di Daerah

Aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal selain pemerintah dan masyarakat lokal adalah Lembaga Keuangan di Daerah. Sektor ini sedikit banyak telah memberikan peran dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Rembang terutama di wilayah Desa Tasikagung Rembang. Aktor swasta yang terlibat pada hal ini adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud disini adalah Koperasi dan Perbankan baik swasta maupun perbankan daerah. Namun lembaga keuangan tersebut yang memiliki hubungan dan mendukung kegiatan perekonomian sektor perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Rembang khususnya di wilayah Desa Tasikagung Rembang.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikelukakan oleh Sm (L : 38 Th) yang merupakan salah seorang nelayan yang menyatakan bahwa:

“Kalau pinjaman ya bianya buat bikin kapal kan ya kalau dari patungan kadang kurang jadi harus pinjam bank, tapi ya yang menyediakan dalam jumlah besar. Tetapi ya tidak semua harus pinjam selama ada jalan lain ya pasti usaha jalan lain dulu. Selain pemilik kapal biasanya yang mengusahakan modal di bank ya bakul ikan sama pemilik usaha perikanan. Untuk modal awal atau pengembangan usaha” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran aktor swasta dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Tasikagung tidak banyak namun tetap penting. Hal tersebut menunjkan bahwa peran swasta tetap ada menjadi bagian dari pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi

lokal guna mendukung kelancaran kegiatan perekonomian sektor perikanan tangkap. Meskipun peran swasta terlihat kecil namun masih tetap memiliki bagian dalam pengembangan ekonomi khususnya sektor modal.

f. Pelaksanaan Peran Perguruan Tinggi

Pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal tidak hanya terdapat peran pemerintah, masyarakat lokal, maupun swasta terdapat pula aktor lain yaitu dari perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Kabupaten Rembang khususnya Desa Tasikagung baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Perguruan Tinggi tersebut diantaranya adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, serta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Jawa Tengah. Peran beberapa perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah memberikan konsultasi dan bantuan perencanaan pembangunan perikanan. Hal tersebut selaras dengan keterangan yang dikemukakan oleh Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:

“Iya memang benar kalau ada perguruan tinggi yang membantu dalam sektor perikanan di Rembang ini. Seperti perencanaan infrastruktur, pengelolaan data statistik, perencanaan pembangunan infrastruktur fisik, dan lain-lain. Tapi sebagian besar masih bersifat perorangan kalau lembaganya belum ada kerjasama formal. Tapi ada juga yang kelembagaan sudah ada peran untuk perikanan di Rembang ini. Perguruan tinggi tersebut seperti UNDIP, UNISULA, PIP, STIP. Ya perguruan tinggi itulah” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat sedikit banyak Perguruan tinggi telah memberikan perannya. Peran tersebut bagaimanapun bentuknya telah

membantu dalam pengembangan ekonomi di Kawasan Minapolitan di Tasikagung Rembang.

Pengembangan sumberdaya ekonomi di Kawasan Minapolitan Perikana juga membutuhkan adanya kegiatan pengawasan. Pengawasan tidak hanya berbentuk pengawasan formal tapi juga perhatian pada pelaksanaan suatu kegiatan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Nelayan. Kegiatan ini adalah hasil dari pengamatan akademis yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sehingga munculah kegiatan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sk (L : 50 Th) selaku kepala pelabuhan yang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi tersebut berawal dari laporan mahasiswa PIP yang melakukan PKL (praktik Kerja Lapangan) disini. Sehingga ada kegiatan tersebut. Koordinasi sama kami, nelayan, dilutuk sama Desa” (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengadakan penyuluhan tentang keselamatan pelayaran dan kesehatan bagi nelayan tradisional di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang. Selanjutnya Sk (L : 50 Th) selaku Kepala PPP Tasikagung juga menyatakan bahwa:

“Mengucapkan banyak terima kasih kepada PIP Semarang yang telah memberikan penyuluhan di wilayah kerja PPP Tasikagung Rembang. yang mana penyuluhan ini memberikan dampak positif bagi nelayan, mengingat kasus demi kasus yang pernah ada di Rembang disaat Nelayan saat mencari ikan ditengah laut ada Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit tanpa mengerti penanganan pertama akan semakin memperparah kondisi kesehatan Awak kapal yang sakit. ada juga meninggal dunia sebelum mendapat pertolongan. oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini sangat penting yang turut serta memberikan pemahaman dan mencerdaskan masyarakat nelayan. semoga acara sosialisasi seperti ini berlanjut dan terus ada di wilayah kerja PPP Tasikagung Rembang” (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Pengembangan Kawasan Minapolitan yang ada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini jelas membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan peran aktor/*stakeholder* yang ada. Koordinasi ini bertujuan untuk menselaraskan peran antar aktor/*stakeholder* sehingga akan mewujudkan pola komunikasi yang baik. Koordinasi tersebut juga telah banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat sebagai sasaran pengembangan ekonomi di Kawasan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Sumberdaya ekonomi di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan Minapolitan perikanan tangkap Desa Tasikagung Rembang memiliki beberapa Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor inilah yang kemudian memiliki pengaruh dengan pelaksanaan pengembangan yang ada. Faktor ini pula yang dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan selanjutnya.

a. Faktor Pendukung Pengembangan Sumberdaya Ekonomi di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor Perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang ini didukung oleh beberapa faktor. Pernyataan pertama datang dari Sn (L : 50 Th) selaku Kepala seksi Pengelolaan Perikanan Bidang perikanan Tangkap Dinas kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa:

“Masyarakat perikanan, yang meliputi nelayan, bakul ikan dan juga pengolah ikan. Masyarakat lokal yang juga disebut masyarakat perikanan dijadikan faktor pendukung karena dengan partisipasi masyarakat yang kuat maka upaya pengembangan sumberdaya ekonomi akan dapat berjalan

sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. Keberadaan masyarakat lokal yang terdiri dari nelayan, bakul ikan, hingga pengolah ikan menunjukkan integrasi dari hulu hingga ke hilir ekonomi sektor perikanan terutama perikanan tangkap” (Hasil wawancara Tanggal 24 November 2014).

Selanjutnya Pernyataan lain datang dari Sm (L : 38 Th) yang merupakan seorang nelayan menyatakan bahwa:

“ Ketersediaan adanya sarana penangkapan ikan, yang meliputi jumlah kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan kan banyak. selain itu juga terdapat fasilitas infrastruktur pelabuhan yang cukup memadai. Jumlah kapal dan alat tangkap yang ada memadai dan punya kemampuan baik pada proses penangkapan ikan” (Hasil wawancara Tanggal 28 November 2014).

Pernyataan dukungan juga datang dari M (L : 45 Th) yang merupakan seorang warga Desa Tasikagung yang menyatakan bahwa:

“Tasikagung ini punya Potensi untuk didatangi kapal dari daerah lain, seperti Juwana, Tegal, Pekalongan dan Batang. Potensi ini menggambarkan bahwa kapal dari luar wilayah Kabupaten Rembang memperhitungkan kondisi TPI dan pelabuhan perikanan yang memadai. Selain Fasilitas fisik, pembayaran hasil penangkapan juga menjadi salah satu perhatian. Banyaknya kapal luar Kabupaten Rembang yang mendaratkan kapal dan menjual hasil perikanan di TPI Rembang terlihat bahwa kondisi keuangan dalam keadaan stabil” (Hasil wawancara Tanggal 25 November 2014).

Pernyataan tambahan datang dari M (L : 45 Th) yang menyatakan bahwa:

“Upaya Pelestarian lingkungan juga telah dilakukan untuk mendukung keseimbangan ekonomi sektor perikanan. Selain itu juga membuat pelaksanaan proses disini jadi terlihat lebih lestari” (hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan telah menunjukan beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pengeruhi pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap.

b. Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Kawasan Minapolitan Perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang ini memiliki beberapa hambatan. Pernyataan datang dari Sn (L : 50 Th) selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Kabupaten Rembang belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus menangani sektor perikanan tangkap. Meskipun sektor perikanan merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Rembang belum ada tindakan pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan pembentukan BUMD yang khusus untuk sektor perikanan tangkap” (hasil wawancara tanggal 24 November 2014).

Faktor penghambat selanjutnya diungkapkan oleh Dr (L : 38 Th) pemilik unit saha jasa pengangkutan BBM untuk Kpala yang menyatakan bahwa:

“Ketersediaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan nelayan yang belum mencukupi. Kebutuhan BBM untuk nelayan di wilayah Tasikagung Rembang telah ditunjang oleh 3 (Tiga) buah SPBN khusus untuk memenuhi kebutuhan Solar nelayan. Namun yang terjadi adalah kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Setiap pertengahan bulan tanggal 14-18 pasti cadangan sudah habis sehingga harus membeli di luar wilayah” (Hasil wawancara tanggal 27 November 2014).

Penjelasan tentang faktor penghambat datang pula dari M (L : 45 Th) yang merupakan seorang warga Desa Tasikagung yang menyatakan bahwa:

“Sering ada kesepakatan tidak formal yang sering dilakukan antar pihak yang menyebabkan seringnya masalah terulang kembali. Kesepakatan formal dimaksudkan untuk menjelaskan setiap keputusan yang sudah diambil sehingga tidak simpang siur informasi yang di dapatkan. Semua pihak yang melakukan kesepakatan tersebut juga memiliki pemahaman yang sama sehingga pelanggaran yang terjadi tidak terus menerus terulang kembali” (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014).

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas dapat disimpulkan yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan ekonomi di kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Rembang. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah Partisipasi masyarakat yang tinggi, Kepemilikan alat penangkapan yang mencukupi, Potensi untu didatangi kapal dari luar daerah, dan adanya upaya dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah Kabupaten Rembang belum memiliki BUMD yang menangani khusus perikanan tangkap, Ketersediaan BBM yang kurang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan nelayan, serta sering terjadinya kesepakatan yang tidak formal sehingga sering terjadi pelanggaran yang berulang.



C. Pembahasan

1. Peran Aktor dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki prioritas dalam pengembangan ekonomi sektor perikanan. Hal tersebut tertuang dalam adanya obsesi untuk membuat Kabupaten Rembang sebagai “*Seafront City*”. Garis pantai Kabupaten Rembang yang membentang sepanjang 63,5 km mengandung potensi ekonomi bahari yang sangat besar dan beragam khususnya sektor kelautan dan perikanan yang dapat digambarkan dari perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya pantai yang meningkat dari tahun-ke tahun.

Memperhatikan potensi dan peluang tersebut, maka upaya optimalisasi sumberdaya pesisir Kabupaten Rembang adalah keniscayaan dan perlu diakomodasi dalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu seperti dirumuskan melalui pendekatan *seafront city*. Filosofi pengembangan *seafront city* dilandasi pada perubahan paradigma masyarakat yaitu cara pandang serta perilaku masyarakat yang selama ini masih berorientasi daratan (*land based*) menjadi berorientasi pada lautan (*ocean based*). Perubahan paradigma ini diharapkan merubah orientasi masyarakat untuk menempatkan pengelolaan kawasan perairan laut sebagai “halaman depan” serta menuntut kearifan semua *stakeholder* terhadap pengelolaan sumberdayanya. Pengembangan *seafront city* bukan merupakan konsep baru bagi masyarakat Rembang yang secara

sosiokultural telah mewarisi budaya maritim sejak berabad-abad silam serta pernah mengalami masa kejayaan maritim di masa lalu. Konsekuensi logis atas digunakannya konsep pengembangan ini adalah dibutuhkan komitmen segenap pemangku kepentingan serta terfokusnya kebijakan pada sektor maritim terutama dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Rembang yang dilakukan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir adalah aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan *seafront city* mengingat karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir yang rawan termarginalisasi.

Penyediaan infrastruktur dalam konsep *seafront city* perlu diinisiasi melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi maupun sektor pendukungnya yang secara tidak langsung juga akan membawa perubahan paradigma masyarakat terhadap pembangunan *seafront city*. Upaya tersebut dilakukan secara integratif dan komprehensif dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir utamanya masyarakat nelayan yang ditekankan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, pendidikan serta penguatan struktural dalam masyarakat sehingga kesejahteraannya meningkat, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Rembang bermukim di kawasan pesisir dan sebagian menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi di sektor maritim.

Obsesi *Seafront City* ditujukan untuk memberikan ketegasan bahwa Pemerintah beserta masyarakat menginginkan Kabupaten Rembang menjadi kawasan pesisir yang memiliki kekuatan dalam sektor perikanan khususnya

perikanan tangkap. Keinginan atau obsesi tersebut berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Rembang yang seluruh garis wilayah utara merupakan Laut Jawa.

Berdasarkan potensi tersebut dapat dikatakan bahwa model pembangunan daerah yang dapat dilakukan adalah menggunakan pengembangan sumberdaya ekonomi daerah / *Local Economic Resources Development (LERD)*. Menurut Said (2012) yang dimaksud dengan LERD adalah Usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Pengertian tentang LERD diatas memberikan gambaran bahwa dalam usaha untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal suatu wilayah yang menjadi *point* penting adalah sumberdaya yang memang merupakan sumberdaya yang tersedia diwilayah tersebut, keterlibatan aktor/*stakeholder* yang ada diwilayah tersebut, serta karakteristik wilayah yang sesuai dengan sumberdaya yang akan dikembangkan.

Sehubungan dengan konsep pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah merupakan salah satu wujud dari pembangunan ekonomi daerah yang tentu saja merupakan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana salah satu pokok yang ada didalamnya menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk melakukan pembangunan di daerah untuk menunjang perekonomian di daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di daerah. Mencapai tujuan tersebut Pemerintah daerah

Kabupaten Rembang mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamnya mencantumkan bahwa untuk menunjang perekonomian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mengupayakan untuk mengembangkan sektor perikanan terutama pengembangan di kawasan minapolitan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Keselarasan pendapat tentang pengembangan sumberdaya ekonomi daerah pada sektor perikanan tangkap terutama yang berada di Desa Tasikagung merupakan wujud nyata yang di cita-citakan oleh berbagai pihak. Masyarakat mendukung dengan segala bentuk upaya dan segala yang mereka miliki sedangkan pihak lain mendukung dengan segalayang menjadi kewenangannya. Hal tersebut meberikan gambaran akan adanya kesamaan persepsi untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya terkait dengan pengembangan sektor atau bidang perikanan tangkap maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat regulasi/dasar hukum berupa Peraturan Menteri tentang Minapolitan dan Kawasan Minapolitan. Konsep Minapolitan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan. Berdasarkan regulasi tersebut yang dimaksud dengan Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi,

pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Sama halnya seperti yang ingin diwujudkan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal, minapolitan juga menitikberatkan akan adanya peran aktor/*stakeholder* yang ada didalamnya. Berdasarkan konsep minapolitan diatas juga disebutkan akan adanya peran penting dari aktor atau *stakeholder*. Peran *stakeholder* ini menjadikan apakah konsepsi Minapolitan dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Hal tersebut sehubungan dengan konsepsi dasar Minapolitan yang mengutamakan prinsip menyeluruh yang artinya tidak hanya sumberdaya yang kemudian menjadi fokus utama melainkan kepentingan dan peran aktor yang ada didalamnya juga penting. Upaya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat agar perikanan tangkap Kabupaten Rembang menjadi kawasan Minapolitan namun memang belum berhasil. Keadaan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penetapan kawasan Minapolitan pada suatu wilayah bukan satu-satunya alasan mengapa wilayah tersebut menjadi wilayah pusat pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor perikanan tangkap namun tidak pula menutup kemungkinan menggunakan dasar pedoman minapolitan dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal.

Aturan dasar atau regulasi adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan sebuah pembangunan baik pembangunan nasional maupun daerah pada segala bidang kehidupan. Pembangunan tersebut termasuk salah satu diantaranya adalah pembangunan kelautan dan perikanan. Pelaksanaan

pembangunan daerah sektor kelautan dan perikanan salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Rembang yaitu pengembangan perikanan tangkap. Pengembangan sumberdaya ekonomi sektor perikanan dan kelautan tersebut di laksanakan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Regulasi sebagai landasan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan. Lebih jelas kemudian dalam pelaksanaannya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Tercantum dalam reglasi tersebut yang dimaksud dengan Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan konsep Minapolitan tepat digunakan pada pelaksanaan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan kawasan yang memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 suatu kawasan Minapolitan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan.
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia didalam kawasan dan daerah sekitarnya
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

Kawasan Minapolitan di Desa Tasikagung telah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan aturan karakteristik yang pertama tersebut. Pengembangan ekonomi di Tasikagung memiliki PPP Tasikagung dan 2 (dua) TPI yang ada didalamnya sebagai sentra produksi perikanan tangkap. Hal tersebut dikarenakan di lokasi terbut proses mulai kapal datang untuk membonkar hasil penangkapan ikan, melakukan proses lelang, hingga sampai pada pemilik usaha pengolahan ikan dilakukan. Pengeolahan dan pemasaran juga tersedia di kawasan tersebut. Pengolahan produksi ikan di buat dalam beberapa jenis seperti pemindangan, pengasinan, pengasapan, dan beberapa hasil yang lainnya. Pemasaran di prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan lokal serta pengiriman di luar daerah baik Kabupaten maupun Provinsi. Melihat besarnya potensi dari perikanan tangkap maka muncul bidang usaha untuk menunjang seperti usaha perbekalan nelayan, jasa pengangkut BBM untuk nelayan, usaha rumah makan, dan beberapa usaha yang lainnya.

Kegiatan ekonomi di Desa Tasikagung di tunjang oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. Sarana fisik berupa infrastruktur fisik sebagai fasilitas dalam

bentuk fasilitas pokok, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang juga telah tersedia. Aksesibilitas dalam kegiatan juga didukung dengan kedekatan lokasi dengan jalan raya pantai utara Jawa sehingga dapat terintegrasi dengan sektor lain yang dibutuhkan. Selain itu juga adanya dukungan fasilitas non fisik seperti pelayanan administratif dari pemerintah daerah dan bentuk pelayanan yang lain.

Sumberdaya Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi yang ada di kawasan Desa Tasikagung tidak hanya warga Desa Tasikagung saja tetapi dari beberapa wilayah di Kabupaten Rembang. Sumberdaya Manusia tersebut mayoritas adalah yang bekerja sebagai nelayan, bakul ikan, dan pemilik unit usaha pengolahan hasil perikanan. Karena Desa Tasikagung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah maka wajar apabila masyarakat luar daerah Tasikagung banyak pula yang melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Melihat dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang ada di Desa Tasikagung tersebut jelas akan membawa dampak positif bagi daerah sekitar. Alasannya adalah dengan adanya pengembangan ekonomi di kawasan tersebut akan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat kawasan pesisir, dan dampak positif lainnya yang timbul dari kegiatan tersebut.

Selain landasan tentang pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Minapolitan terdapat pula regulasi dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015. Berdasarkan regulasi tersebut tercantum didalamnya tentang

pengembangan sumberdaya perekonomian lokal bidang urusan kelautan dan perikanan dengan pengembangan Minapolitan di Tasikagung Rembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di wilayah Desa Tasikagung merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Regulasi penunjang dalam kegiatan perekonomian di kawasan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang. Aturan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. Landasan regulasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan izin terhadap pemilik usaha jasa pengangkutan BBM untuk nelayan dalam proses penangkapan ikan.

Regulasi diatas menandakan bahwa adanya dasar dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan Minapolitan perikanan tangkap yang ada di Desa Tasikagung Rembang. Aturan tersebut menjadi dasar dan koridor pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Selain itu juga menjadi dasar jaminan atas hak-hak masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi bidang kelautan dan perikanan untuk dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulasi juga dapat dikatakan sebagai respon yang diberikan pemerintah dalam menjawab pengelolaan potensi yang ada di daerah.

Menurut Said (2014) menyatakan bahwa aktor yang dimaksud dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (LERD) adalah *stakeholder*/lembaga yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah. Adapun aktor yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Lokal, Pelaku Usaha Baru, BUMD, Masyarakat Lokal, Koperasi, Lembaga Keuangan di daerah, dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa aktor yang menjalankan perannya serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan Minapolitan perikanan tangkap Desa Tasikagung Rembang. Beberapa Aktor tersebut adalah:

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan aktor yang memberikan peran dan kontribusi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di wilayah minapolitan di Desa Tasikagung Rembang. Peran ditunjukan dengan kapasitasnya sebagai interpretasi pemeritah pusat dalam bidang kelautan dan perikanan. Perannya menunjukan komitmen dengan cara melakukan perencanaan program dan pembengunan, melakukan penyelesaian dalam permasalahan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

2) Pelaku Usaha Lokal dan Pelaku Usaha Baru

Masyarakat lokal ada yang berperan sebagai pelaku usaha lokal. Pelaku usaha lokal adalah pemilik unit usaha yang bergerak pada usaha pengelolaan dan pengolahan hasil penangkapan ikan oleh nelayan. Pelaku usaha lokal memiliki peran dalam meningkatkan nilai produksi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Pelaku usaha baru merupakan bagian dari masyarakat lokal yang baru memulai usahanya setelah dilakukan pengembang sumberdaya ekonomi. Hal tersebut pelaku usaha baru tidak memulai usaha barunya bukan dari awal adanya kegiatan ekonomi yang ada di kawasan minapolitan Desa Tasikagung Rembang. Usaha baru ini merupakan bentuk variasi usaha yang ada di wilayah tersebut.

3) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan aktor terpenting dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan Desa Tasikagung kecamatan Rembang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat berperan sebagai subyek dalam pengembangan tersebut. Peran masyarakat lokal menjadi penting karena merupakan aktor yang menjadi pelaku pada proses perekonomian dari hulu dimana mereka mendapatkan bahan baku sebelum dilakukan proses pengelolaan dan proses pengolahan selanjutnya. Nelayan berperan penting dalam memperoleh hasil produksi perikanan tangkap. Sedangkan bakul ikan berperan dalam distribusi hasil pangkapan kepada pemilik unit usaha pengolahan ikan maupun langsung kepada konsumen

4) Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang mengusahakan ketersediaan modal dan mengelola keuangan dalam kegiatan ekonomi perikanan. Koperasi yang paling berperan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD mengupayakan modal bagi bakul ikan dan nelayan. Sementara itu KUD juga mengelola sebagian retribusi dari nelayan serta menampung aspirasi nelayan terkait pembangunan yang ada di wilayah Tasikagung.

5) Lembaga Keuangan di Daerah

Lembaga keuangan yang ada di daerah yang memiliki peran dalam proses pengembangan dikawasan minapolitan adalah lembaga keuangan yang memiliki peran dalam memberikan dukungan ketersediaan modal bagi nelayan, bakul ikan, dan pihak lain. Lembaga keuangan itu diantaranya adalah Unit Permodalan Bakul Ikan (UPBI) serta lembaga keuangan swasta seperti Bank. Aktor tersebut memberikan dukungan modal dalam pengembangan usaha perikanan tangkap.

6) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan aktor dari kalangan akademisi yang memberikan peran dan kontribusi dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan di Desa Tasikagung Rembang. Kontribusi tersebut dalam bentuk konsultasi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap kehidupan perikanan.

Setiap aktor memiliki peran masing-masing serta memiliki kemampuan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya di kawasan Minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung. Peran tersebut sedikit banyak telah mendukung terlaksananya tujuan dari pengembangan wilayah tersebut. Peran aktor tersebut menunjukkan komitmen dalam melakukan pembangunan di daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

a. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu *stakeholder* dalam suatu upaya melakukan pengembangan ekonomi tingkat daerah untu sektor perikanan khususnya

perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Rembang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Upaya untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mencanangkan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam program kerja, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Dinas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Rembang, meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pantai sehingga ada tekad dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan khususnya adalah perikanan tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi teknis yang memiliki peran utama dalam pengoptimalisasian potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang menyusun visi dan misi dinas agar kinerja dinas menjadi lebih terarah dan terukur serta tepat sasaran. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah “Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Rembang Yang Unggul dan Maju Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dimana dalam penyusunannya didasarkan pada kriteria-kriteria pembangunan kelautan dan perikanan yaitu tujuan Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi daerah, memberikan kontribusi/ sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan penyerapan tenaga kerja dan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi lainnya. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa Pembangunan kelautan dan

perikanan harus mampu memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya nelayan. Selanjutnya arah pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan mampu memelihara kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka disusunlah misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk sektor perikanan tangkap yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tangkap.
2. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan, pesisir dan kelautan.
3. Meningkatkan pengelolaan hasil tangkapan.
4. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan.

Melihat bahwa Visi dan Misi merupakan dasar pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Realisasi misi yang telah dicanangkan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah menyusun program kerja dengan dasar kebijakan “Penerapan pengelolaan perikanan (*fisheries management*) secara bertahap yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan”. Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang adalah:

1. Pengembangan Produksi Perikanan
2. Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan
3. Pengembangan Sumberdaya pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil
4. Pengembangan Kelembagaan Bidang Perikanan
5. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran dan Hasil Perikanan
6. Pengembangan Kerjasama dan Membangun Sinergitas Antar Sektor dalam Pengembangan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau kecil.

Kebijakan yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek pokok tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam penyusunan program kerja yang diharapkan dapat memberikan arah dalam mendorong terwujudnya tujuan dan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. Adapun tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing bidang kelautan dan perikanan.

Sedangkan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang adalah :

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi.
2. Meningkatkan pengelolaan perikanan, pesisir dan kelautan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan.
4. Memperluas akses pasar produk hasil olahan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa kelautan dan perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Rembang, sehingga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang ini salah satunya merupakan perikanan tangkap/perikanan laut. Upaya diatas memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah telah memahami dan mengerti potensi yang ada di daerah dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya untuk kepentingan masyarakat.

Selain upaya yang telah dijabarkan diatas, peran aktif yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah peran dalam fasilitasi fisik maupun non fisik. Peran ini diwujudkan tanpa meninggalkan koordinasi dengan pihak lain. Koordinasi ini dianggap penting karena merupakan bentuk partisipasi antar aktor. Peran tersebut diantaranya adalah memberikan fasilitas dalam bentuk infrastruktur fisik seperti pembangunan akses jalan menuju Desa Tasikagung dan pelabuhan perikanan yang ada didalamnya hal tersebut merupakan bentuk fasilitas untuk memperlancar aktivitas ekonomi yang ada. Selain itu adalah pembangunan fisik lainnya seperti pembangunan tempat pelelangan baru sehingga sejak tahun 2013 telah memiliki 4 tempat pelelangan untuk kapal yang bersandar dan melakukan pelelangan di pelabuhan perikanan Tasikagung selain Tempat pelelangannya juga ada bentuk sarana seperti fasilitas timbangan dan basket tempat ikan.

1) Peran Pelaku Usaha Lokal dan Pelaku Usaha Baru

Masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian sektor perikanan tangkap adalah pemilik usaha perikanan. Pemilik usaha perikanan diantaranya adalah pemilik usaha pengolahan hasil perikanan, pemilik usaha penjualan hasil perikanan, serta pemilik usaha jasa pendukung kegiatan perikanan tangkap. Pemilik usaha ini tergolong dalam *stakeholder* tingkat lapang. Hal tersebut dikarenakan memang pemilik usaha ini yang juga berkaitan langsung dengan proses mulai dari hulu hingga hilir kegiatan perekonomian lokal perikanan tangkap. Maksudnya adalah mulai dari mendapat bahan baku hingga distribusi kepada konsumen. Pemilik unit setiap usaha memiliki tujuan atau orientasi dalam membangun sebuah usaha maupun mengembangkan usaha yang ada. Inovasi jenis usaha juga banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memperluas jangkauan pangsa pasar. Upaya ini sebagai bentuk peningkatan pendapatan secara ekonomi termasuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jenis usaha yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Rembang. Hal diatas juga sekaligus menunjukkan tingkat inovasi yang tinggi dari masyarakat. Banyaknya usaha ini juga menunjukkan keragaman usaha serta banyaknya pemilik unit usaha pengolahan ikan dapat dikatakan pula mampu untuk menciptakan banyak kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini terutama berkaitan pula dengan pemberdayaan wanita di kawasan ini mengingat rata-rata bentuk usaha pengolahan perikanan berbentuk usaha makanan.

Sesuai dengan sumber dalam memperoleh bahan baku dan penunjang, setiap jenis unit usaha tergantung dari letak wilayahnya. Misalkan pemilik usaha seperti terasi, pengasinan, dan petis sebagian besar terletak di wilayah pantai mengingat nelayan yang mencari sumber bahan baku adalah nelayan yang menggunakan kapal kecil yang mendarat langsung disekitar lokasi pembuatan terasi. Unit usaha pengasinan membutuhkan tempat yang luas untuk menjemur pada akhirnya tempat yang paling strategis untuk melakukan usaha tersebut adalah daerah pantai.

Kawasan Tasikagung Rembang, unit usaha pengolahan hasil perikanan yang paling banyak adalah pemindangan, sebagian pengasapan, pengeringan, dan unit usaha baru yang adalah unit usaha penjualan ikan segar keluar wilayah. Seluruh unit usaha tersebut dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal di Desa Tasikagung. Pemilik dan tenaga kerja yang ada di dalamnya merupakan bagian dari masyarakat lokal yang memang telah terbiasa dengan lingkungan nelayan dan kegiatan penangkapan ikan. Pemilihan tempat unit pengolahan ikan di Tasikagung di dasarkan pada kedekatan dengan perolehan bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama yang dimaksud adalah ikan itu sendiri. Bahan baku pendukung diantaranya adalah Tenaga kerja, bahan bakar, pengemasan, dan sebagainya. Kedekatan ini di harapkan akan mampu untuk menekan biaya produksi yang ada untuk pengangkutan bahan baku dan bahan pendukung.

Kedekatan dengan bahan baku dan bahan pendukung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi usaha yang akan dibangun. Jarak dengan bahan baku merupakan pertimbangan penting terkait dengan biaya distribusi. Tempat memperoleh tenaga kerja juga sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang

ada. Kedekatan akses perolehan bahan baku memberi peluang untuk meningkatkan produksi dalam usaha dan peluang peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Terkait dengan penyediaan bahan baku ikan, para pemilik unit usaha pengolahan ikan untuk pemindangan tidak selalu yang melakukan pelelangan sendiri di TPI tetapi ada juga yang memiliki pekerja yang bertugas untuk ikut lelang di TPI untuk mendapatkan ikan sesuai dengan kebutuhan usaha dan jenis ikan sesuai dengan permintaan konsumen dipasar. Perbedaan ini umum dilakukan oleh setiap unit usaha pemindangan untuk menjaga kestabilan permintaan pasar untuk menjaga kestabilan usaha yang dilakukan. Pekerja lelang ini mulai bekerja pukul 07.00 pagi saat proses lelang akan dibuka hingga didapatkan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan unit usaha.

Ketersediaan bahan baku telah menjadi jaminan dari pemilik usaha pemindangan ikan. Tenaga kerja juga telah tersedia. Bahan pendukung juga telah ada. Hal yang kemudian menjadi fokus utama adalah bagaimana pemasaran akan dilakukan. Pangsa pasar untuk unit usaha pemindangan yang besar seperti ini adalah luar daerah Kabupaten Rembang seperti beberapa daerah di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Pangsa tersebut sifatnya produksi yang tergolong besar sehingga penjualan/pemasarannya langsung ke distributor besar maupun langsung ke pasar. pengolahan ikan jenis pemindangan memiliki daya jangkauan pasar yang luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Rembang khususnya di Desa Tasikagung memiliki daya saing yang bagus untuk pangsa pasar regional maupun pangsa pasar luar daerah. Kemampuan

tersebut tentu harus didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketersediaan bahan baku, bahan pendukung, dan strategi pemasaran serta tujuan dalam peningkatan kemampuan usaha yang telah dimiliki.

Selain unit usaha pemindangan yang memang telah lama menjadi salah satu unit usaha yang banyak diminati oleh masyarakat lokal, terdapat unit usaha baru yang ada yaitu penjualan produk ikan segar ke beberapa wilayah di luar Kabupaten Rembang. Penjualan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan ikan segar untuk kemudian diolah kembali. Unit usaha ini berorientasi diwilayah luar Kabupaten Rembang. Ikan besar dengan kualitas super merupakan kebutuhan bahan yang dibutuhkan oleh para pemilik usaha penjualan ikan segar. Ikan dengan ukuran besar dan dalam kondisi segar. Selain bahan baku, bahan pendukung yang digunakan adalah balok es dan garam untuk menjaga kesegaran ikan yang akan dikirimkan kepada konsumen.

Selain daya dukung bahan baku pula, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana pangsa pasar dan strategi pemasaran dalam menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tujuan masyarakat pemilik unit usaha. Berdasarkan beberapa penjelasan dan data tentang jenis unit pengolahan hasil perikanan tangkap menunjukkan beberapa hal yang perlu untuk dijadikan perhatian penting. Hal tersebut diantaranya adalah bagaimana partisipasi masyarakat untuk melihat peluang usaha dari lingkungan sekitar. Selain meningkatkan nilai jual ikan juga berpotensi memberi kesempatan kerja untuk masyarakat yang lain. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi unit usaha yang ada. Hampir seluruh bahan baku dan bahan pendukung tersedia disekitar unit

usaha yang ada sehingga dapat membuat unit usaha yang ada dapat berjalan dengan baik dan perpeluang untuk selalu dikembangkan. Selanjutnya terkait dengan strategi pemasaran dan penentuan pangsa pasar yang ada juga memiliki beragam strategi yang digunakan sehingga unit usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Selain Pembuatan usaha dalam bentuk pengolahan hasil penangkapan ikan, masyarakat lokal memiliki usaha lain yaitu usaha memberikan jasa penyediaan bahan perbekalan untuk nelayan sebelum berangkat melaut. Jenis unit usaha ini merupakan usaha yang memiliki hubungan atau integrasi yang sangat erat dengan kegiatan penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan unit usaha ini yang membidangi penyediaan logistik dan kebutuhan lain oleh para nelayan saat akan berangkat melaut. Nelayan membutuhkan unit usaha ini untuk mendukung proses kerja. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa memang ada integrasi atau hubungan antara nelayan dengan pelaku ekonomi perikanan lain yang mendukung. Integrasi ini merupakan bentuk sistem kerja perekonomian yang baik antar sektor dalam menjalankan usaha perikanan. Hubungan antara nelayan dan unit usaha penyedia perbekalan merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan. ada hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara nelayan dengan pemilik unit usaha penyedia perbekalan nelayan. Berdasarkan Hasil *survey* dan wawancara dengan informan diperoleh keterangan tentang jenis perbekalan nelayan.

Tabel 11. Uraian Kebutuhan Nelayan Saat melakukan Proses penangkapan ikan

Jenis Perbekalan	Uraian
Logistik	-Bahan Makanan: Beras, Lauk-Pauk, Bumbu Masak, Air Minum, Air Bersih/Air Tawar, Minuman instant,dan lain-lain.
Bahan Bakar	-Solar untuk bahan bakar kapal -LPG untuk bahan bakar memasak makanan
Bahan pendukung	-Es Batu (Balok) -Garam -Blarak (Daun Kelapa)

Sumber: Hasil Olahan Penulis,2014

Selain penyedia jasa pemenuhan kebutuhan perbekalan, unit usaha ini juga memberikan jasa yang lain yaitu pengantaran dan penjemputan ABK saat ABK akan berangkat dan pulang dari melaut. Hal tersebut dilakukan karena tempat parkir atau tambat labuh kapal tidak selalu dekat dengan dermaga. Unit usaha ini menyediakan kapal kecil untuk menjemput ABK dan mengantar untuk efektifitas kegiatan penangkapan ikan. Selain jasa untuk ABK, unit ini juga menyediakan jasa pemindahan hasil tangkapan ke TPI dengan jasa para pekerja pengangkut ikan dari kapal. Setelah ikan diangkut, selanjutnya adalah pembersihan kapal oleh tenaga pembersih kapal yang juga bekerjasama dengan unit usaha perbekalan. Terlihat bahwa dalam penyediaan jasa perbekalan untuk nelayan yang akan berangkat melaut banyak komponen atau bahan yang harus tersedia. Penyediaan seluruh komponen tersebut membutuhkan kerjasama dengan unit usaha yang lain.

Pelengkapan dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan nelayan dipenuhi juga oleh pemilik usaha angkutan khusus BBM bersubsidi khusus untuk nelayan

dan usaha perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, Dan Pelayanan Umum Di Kabupaten Rembang maka dikeluarkan aturan dan pedoman tentang penggunaan jasa angkutan untuk BBM bagi kapal.

Jasa angkutan ini penting karena meskipun di wilayah Pelabuhan Perikanan Tasikagung Rembang terdapat beberapa SPBN baik yang dimiliki oleh KUD meskipun yang dimiliki oleh swasta yang bersifat perorangan tetapi tidak mungkin nelayan akan mengangkut BBM sendiri untuk kebutuhan penangkapan ikan. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka muncul unit usaha jasa pengangkutan BBM untuk kapal. Pengangkutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perbekalan nelayan untuk bahan bakar dalam proses penangkapan ikan. unit usaha pengangkutan BBM untuk memenuhi kebutuhan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selain itu juga menunjukkan adanya kerjasama atau koordinasi antar unit usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sektor perikanan tangkap.

Koordinasi antar masyarakat lokal yang memiliki unit usaha baru merupakan bentuk partisipasi yang besar masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Mulai dari proses nelayan akan berangkat melakukan penangkapan ikan hingga hasil penangkapan tersebut diolah ataupun dijadikan komoditas untuk meningkatkan nilai jual ikan merupakan hasil peran dan koordinasi yang baik pada masyarakat lokal. Selain masyarakat lokal yang menjadi aktor/*stakeholder* utama dalam pengembangan sumberdaya

ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap ada pula aktor utama lain yang memiliki peran yang besar.

2) Pelaksanaan Peran Masyarakat Lokal

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal membutuhkan peran aktif antara *stakeholder*. Hal tersebut dikarena bidang kegiatan dan fokus dalam pengembangan ekonomi suatu daerah tidak mudah untuk dilaksanakan. Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Masyarakat yang mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harus lakukan. Masyarakat merupakan bagian dari *stakeholder* tingkat lapang. Maksudnya adalah bahwa masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi yang ada. Masyarakat yang dimaksud adalah nelayan dan bakul ikan.

Masyarakat lokal yang mempunyai peranan penting pertama yaitu para nelayan. Nelayan merupakan aktor utama yang bergerak dalam perekonomian lokal. Mayoritas masyarakat Rembang berprofesi sebagai nelayan. Meskipun tidak seluruhnya berasal dari Desa Tasikagung tetapi sebagian besar melakukan aktivitas di Pelabuhan Tasikagung. Aktivitas di Pelabuhan Tasikagung dipilih karena beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya adalah fasilitas yang sudah hampir memenuhi semua kebutuhan nelayan, pelayanan dari pemilik usaha “Papakan” (Usaha perikanan yang menyediakan jasa pengantar dan penjemputan ABK dari darat ke laut maupun sebaliknya) yang mempermudah kerja nelayan, pemenuhan kebutuhan perbekalan untuk melaut dapat diperoleh dengan mudah, serta perolehan hasil lelangan lebih cepat sehingga pengasilan nelayan khususnya ABK

dapat segera diberikan. Pelaksanaan peran nelayan salah satunya adalah memahami fasilitas apa yang mereka butuhkan dan seberapa besar dukungan fasilitas tersebut terhadap kerja mereka. Melihat keterangan dari kedua narasumber tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas yang ada sangat mempengaruhi kerja nelayan itu sendiri. Kerja nelayan juga akan menjadi optimal apabila fasilitas yang diberikan jugamenunjang kerja nelayan itu sendiri. Modal pokok dari nelayan khususnya pandega (nelayan pekerja) adalah tenaga jadi perlu dijadikan pertimbangan dalam kerja adalah tenaga yang dipergunakan pandega saat dilaut dan didarat. Jadi dengan adanya fasilitas dari pihak lain akan mengelola tenaga nelayan agar hanya terkonsentrasi pada saat melaut. Pada saat di darat diharapkan hanya tinggal menunggu hasil dari melaut.

Pilihan pekerjaan sebagai nelayan adalah pengaruh lingkungan internal. Pengaruh internal yang dimaksud adalah keluarga, lingkungan sosial, dan ketekunan dalam memilih pekerjaan (keahlian). Pelaksanaan pekerjaan juga tidak tergantung usia. Setiap kapal dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria berasal dari jumlah, pembagian kerja, dan pembagian keuangan. Faktor usia tidak menjadi prioritas dan pertimbangan khusus. Pemilik kapal juga sejauh ini belum mempunyai fikiran untuk menentukan kriteria ABK berdasarkan usia. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi prioritas utama dalam mengelola ABK adalah etos kerja. Selain kriteria usia pada sumberdaya manusia perikanan yaitu nelayan yang ternyata tidak menjadi prioritas ataupun syarat selain itu hal yang menjadi penting adalah manajemen atau sistem pembagian kerja pada saat melaut. Pembagian kerja ini

sangat penting untuk dilakukan karena dalam aktivitas penangkapan ikan terdiri dari banyak kegiatan seperti penentuan posisi penangkapan, tugas untuk pengelolaan logistik, dan tugas yang lain.

Seorang juragan dan sekaligus sebagai pengurus kapal harus mampu menjadi pemimpin yang baik. Perawatan kapal dan pengelolaan ABK (Pandega) menjadi hal yang wajib dilakukan oleh juragan kapal. Pengelolaan ini juga tidak lepas dari koordinasi dengan pemilik kapal (Majikan Kapal) yang juga memiliki andil dalam pengelolaan kapal terutama pada hal pengelolaan keuangan dan kebutuhan ABK. Kebutuhan ABK seperti ketepatan pemberian hasil penangkapan, penyediaan perbekalan yang sesuai kebutuhan, kesepahaman untuk jadwal pemberangkatan serta kepulangan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan yang baik antara pemilik kapal, juragan, dan pandega yang bekerja dikapal karena hubungan baik akan menjadikan kinerja akan menjadi lebih efektif.

Selain dalam hal pembagian kerja yang tidak kalah penting adalah bagaimana jumlah kebutuhan sumberdaya manusia dan perbekalan dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan sumberdaya kapal dan perbekalan yang sekiranya dibutuhkan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada saat nelayan memulai untuk penangkapan ikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Secara idak langsung hal tersebut menunjukan kemandirian pengelolaan kapal dan pemilik kapal dalam memahami segala hal yang mereka butuhkan.

Tabel 10. Jenis dan Kriteria Kapal yang melakukan Aktivitas di Pelabuhan Tasikagung Rembang

Jenis Kapal	Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)	Kebutuhan Perbekalan
Cantrang	25-35 Orang ABK	-Kebutuhan Perbekalan Kurang lebih 70-100 Juta Rupiah untuk masa melaut selama 30-45 hari dengan jarak tempuh hingga 500 mil. -Kebutuhan tersebut meliputi logistik, BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter, es batu sebanyak 8 ton, dan lain-lain.
Mini Purse Seine (Sarang)	Jumlah ABK 20-25 Orang	-Kebutuhan perbekalan sebanyak 10-20 juta Rupiah untuk masa melaut selama 5-8 hari untuk jarak tempuh 100-150 mil. -Kebutuhan tersebut meliputi logistik, BBM Jenis Solar sebanyak 240-300 Liter, dan es batu sebanyak 100 blok
Mini Purse Seine (Kragan)	18-20 Orang ABK	-Perbekalan dengan nilai 7-12 juta untuk masa melaut selama 2-5 hari dengan jarak tempuh 40-100 mil. - Perbekalan tersebut berupa perbekalan logistik, BBM jenis solar sebanyak 400-450 liter, dan es batu sebanyak 40 blok.
Mini Purse Seine (Pandangan)	16-20 orang ABK	-Perbekalan dengan nilai 7-10 juta untuk masa melaut selama 2-4 hari dengan jarak tempuh < 60 mil. -Perbekalan berupa logistik, BBM jenis solar sebanyak 300-400 liter dan es batu sebanyak 35 blok.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Tabel diatas menunjukkan mengenai rincian keperluan nelayan dan kapal untuk melakukan kegiatan melaut. Selain itu juga terdapat beberapa surat-surat yang harus dibawa saat melaut yaitu Surat Pas Besar (Surat Kelengkapan Kapal), Surat Ukur Kapal, SIUP, SIPI, Sertifikasi Kelautan, Surat Kecakapan, Grosse Kapal, Surat Ijin Berlayar, Surat Keterangan Kecakapan dari Polair dan Pos TNI AL. Selain pengelolaan teknis dalam pengelolaan kerja dalam proses penangkapan ikan dan pengelolaan sumberdaya manusia yang ada terutama nelayan dalam hal ini adalah pandega yang menjadi fokus penting lainnya adalah kepedulian terhadap pekerja. Majikan (Pemilik Kapal) dan keluarga serta pihak lain juga harus memperhatikan kerja meskipun jarak jauh yang hanya melalui sistem komunikasi.

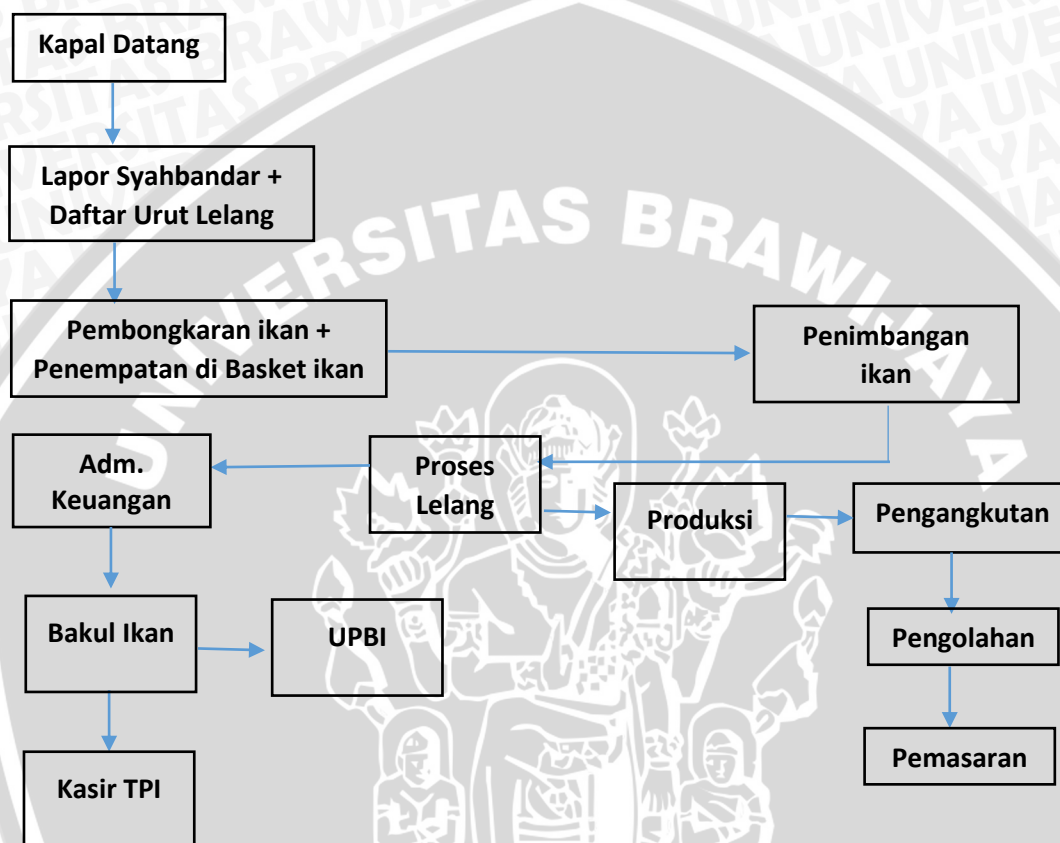
Penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal terutama para nelayan memang terlihat bahwa masyarakat telah siap dalam melaksanakan setiap risiko yang akan dihadapi. Baik risiko dari alam maupun risiko dari pihak lain. Nelayan sudah banyak yang memahami bahwa setiap pekerjaan yang di lakukan pasti terdapat risiko. Pemahaman ini didasarkan pada lokasi tempat nelayan bekerja. Melihat ketepatan nelayan dalam menyelesaikan setiap permasalahan tidak terlepas dari peran kelembagaan masyarakat nelayan. Kelembagaan nelayan yang ada adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Kabupaten Rembang. Lembaga ini merupakan lembaga yang menampung seluruh nelayan yang ada di kabupaten Rembang khususnya yang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai

Tasikagung Rembang. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menampung aspirasi para nelayan terkait kegiatan penangkapan dan memfasilitasi setiap kegiatan nelayan salah satunya adalah koordinasi dan musyawarah antar nelayan dalam menyelesaikan hal tertentu. Selain itu adalah Paguyuban Nelayan Mini *Purse Seine* yaitu perkumpulan para nelayan baik nahkoda maupun para ABK untuk kapal jenis. Paguyuban ini kegiatannya pada dasarnya adalah hanya perkumpulan untuk melakukan diskusi dan musyawarah dalam urusan-urusan tertentu terkait pekerjaan. Sama halnya seperti Paguyuban Mini *Purse Seine* ada juga Paguyuban Nelayan Cantrang. Paguyuban ini juga hanya perkumpulan non formal dan belum memiliki kepengurusan yang terstruktur. Namun tetap perkumpulan ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya Paguyuban/perkumpulan tersebut.

Selain nelayan, aktor/stakeholder tingkat lapang masyarakat lokal yang memiliki peran dalam aktivitas pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor perikanan khususnya perikanan tangkap adalah bakul ikan. Bakul ikan disini tidak diartikan hanya sebagai penjual ikan saja tetapi ada banyak bidang pekerjaan yang dapat di golongkan Bakul ikan adalah perantara antara nelayan dengan perusahaan pengolah hasil perikanan, pemilik usaha pengolahan ikan (perorangan) yang melakukan transaksi untuk membeli bahan baku sendiri, ataupun penampung dari perorangan yang menjual hasil penangkapan.

Berdasarkan *survey*/observasi yang dilakukan oleh peneliti di PPP tasikagung hampir seluruh bakul ikan yang ada adalah perempuan. Bakul ikan mulai bekerja dari jam 07.00 pagi pada saat aktivitas pelelangan dimulai di TPI hingga selesai ataupun saat pekerjaan mereka selesai. Selain melakukan aktivitas

di TPI, bakul ikan ini juga ada yang bekerja dirumah karena sifatnya hanya sebagai pengumpul hasil ikan dari bakul-bakul yang lain. Pada Proses pelelangan ikan bakul ikan memiliki peran yang penting.



Gambar 11. Proses Pelelangan Ikan Hingga Pemasaran (Alir Produksi)

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Berdasarkan skema diatas dapat dilihat bahwa terdapat mekanisme yang tersusun dengan baik dalam kegiatan pelelangan yang dilakukan di Tempat pelelangan Ikan Tasikagung Rembang. Rangkaian kegiatan atau proses tersebut jelas akan melibatkan banyak pelaku diantaranya yaitu nelayan, bakul ikan, pengelola TPI, UPT dan Kesyahbandaran, Unit Permodalan Bakul Ikan (UPBI) dan KUD. Pada Saat kapal datang dari melaut kemudian melakukan kegiatan

pelelangan hasil penangkapan ikan melaporkan diri terlebih dahulu kepada UPT dan Kesyahbandaran untuk mendapat nomor urut proses lelang termasuk proses penimbangan ikan dan penempatan pada basket ikan. Pelaporan ini juga memiliki tujuan untuk melakukan pendataan terhadap jumlah kapal serta melakukan penertiban pada fasilitas tambat labuh. Setelah dilakukan proses lelang kemudian ada dua hal yang kemudian menjadi fokus utama yaitu produksi dan nilai produksi. Produksi yang dimaksud disini adalah ikan yang telah dilelang yang kemudian akan di lakukan proses lanjutan oleh bakul ikan dan pemilik unit usaha pengolahan hasil penangkapan ikan. Setelah bakul ikan membeli ikan hasil pelelangan yang dilakukan oleh juru lelang maka bakul ikan ataupun pemilik unit usaha akan membeli hasil lelang tersebut sesuai dengan kebutuhan kemudian membayarnya sesuai dengan harga lelang yang telah disepakati.

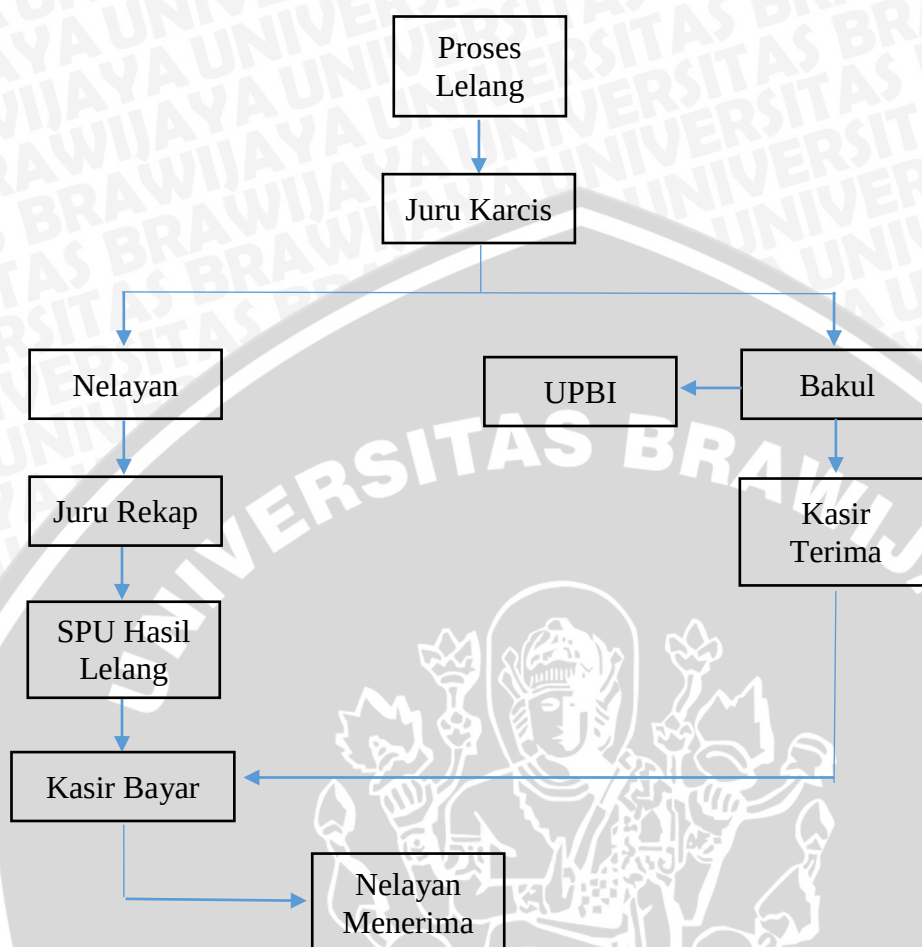
Selanjutnya yang dimaksud dengan nilai produksi adalah jumlah hasil ikan dikalikan dengan harga setiap jenis ikan dan harga yang telah disepakati saat proses pelelangan. Nilai produksi ini terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan bakul ikan dan pemilik unit usaha perikanan, besaran retribusi, serta penghasilan yang diperoleh oleh nelayan. Proses ini melibatkan Kepala Urusan Keuangan TPI Tasikagung Rembang serta UPBI. Bakul Ikan yang akan membeli ikan hasil pelelangan ada dua pilihan pembayaran ke kasir bayar TPI yaitu dibayar langsung apabila jumlah modal mencukupi atau harus memperoleh modal terlebih dahulu melalui UPBI dalam rangka memenuhi kebutuhan modal.



Gambar 12. Suasana Lelang Di TPI Tasikagung Rembang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Proses lelang merupakan kesempatan bertemu antara nelayan dan bakul ikan. Nelayan menjual hasil penangkapan ikan sementara bakul ikan membeli hasil penangkapan tersebut. Proses lelang dilakukan di TPI Tasikagung I dan II sesuai dengan jenis kapal yang mendaratkan hasil penangkapannya. Kesesuaian proses lelang tersebut telah diatur dan menjadi kesepakatan bersama. Perbedaan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran dan pengangkutan ikan untuk di bawa oleh bakul ikan. Setelah dilakukan proses diatas yaitu proses pelelangan ikan selanjutnya yang akan dilakukan adalah alir atau proses administrasi.



Gambar 13. Proses Pembayaran Nelayan Dan Bakul Ikan (Alir Administrasi) Di TPI Tasikagung Rembang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Berdasarkan skema diatas dapat dilihat bagaimana proses lanjutan yang dilakukan oleh seluruh pelaku yang ada di lokasi TPI Tasikagung Rembang. Proses tersebut adalah mekanisme setelah proses lelang yang telah dilakukan. Setelah proses dilakukan maka kemudian terbagi atas dua aktivitas yaitu bakul ikan melakukan pembayaran kepada kasir TPI baik itu dalam bentuk pembayaran langsung maupun melalui UPBI untuk memenuhi kebutuhan modal yang ada. Sedangkan aktivitas satunya adalah nelayan yang memperoleh Surat Permintaan

Uang (SPU). SPU adalah surat hasil lelang yang diberikan kepada juragan kapal untuk mengambil uang hasil pelelangan ikan. Pemberian SPU ini tergantung pada setiap jumlah berat ikan dalam basket ikan dan jenis ikan yang dilelang. SPU yang dikeluarkan TPI terdapat dua jenis yaitu SPU yang dikelola oleh KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang dan SPU yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

KOPERASI UNIT DESA (KUD) "SAROYO MINO"
REMBANG
Badan Hukum : 6216/BH/PAD/XIV 22/2007
Tanggal 12 Desember 2007
Jln. Perikanan no 1 Telp. / Fax (0295) 691632 Tasikagung Rembang

No. 00 -
TPI. TASIK AGUNG 1 0032514
SURAT PERMINTAAN UANG (SPU)

Nama :
Alamat :
Tanggal :

Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Raman Kotor Kg
543	29	300000 2700
		297.200

Jumlah Rp.
Iuran Nelayan 0,90% Rp.
Terima bersih Rp.
Kasir

21 NOV 2014

Gambar 14. Surat Permintaan Uang (SPU) yang dikelola KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014

Gambar diatas menunjukkan contoh SPU yang dikelola oleh KUD Suroyo Mino Kabupaten Rembang. Dapat dilihat pula nilai produksi ikan hasil lelang

074366

MODEL : PI/4

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TPI. TASIKAGUNG 1**

SURAT PERMINTAAN UANG (SPU)

Nama :

Alamat :

Tanggal : *10*

Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Raman Kotor Kg
<i>543</i>	<i>29</i>	<i>300 000</i> <i>6 300</i> <i>293.700</i>

Jumlah Rp.

Retribusi Lelang 2,10 % Rp.

Terima bersih Rp.

Kasir TPI

Jury Hitung TPI

20 NOV 2014

21 NOV 2014

sumber: Hasil Olahan Penulis,2014

Sama halnya dengan SPU yang dikelola oleh KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang ada pula SPU yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. SPU tersebut juga dikeluarkan pada saat setelah terjadi proses lelang di TPI. SPU dikeluarkan bersamaan dengan pembayaran yang dibayarkan oleh bakul ikan maupun pemilik unit pengelolaan hasil perikanan. Perbedaan dari SPU yang dikelola oleh KUD Suroyo Mino adalah terdapat potongan dari hasil produksi yang tertera pada SPU yaitu sebesar 2,10% dari hasil produksi sebagai retribusi lelang.

Pekerjaan yang dilakukan oleh bakul ikan merupakan pekerjaan yang memberikan potensi untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Besar kecilnya usaha yang dimiliki bakul ikan dipengaruhi oleh pangsa pasar dan pastinya modal usaha yang dimiliki. Selain kedua hal itu juga adanya tujuan dari usaha tersebut juga sangat mempengaruhi dalam menjalankan usahanya. Pangsa pasar lokal menjadikan usaha bakul ikan hanya skala kecil saja sedangkan untuk yang memiliki pangsa pasar ataupun bekerjasama dengan pemilik usaha pengolahan ikan berpeluang untuk memiliki usaha dalam skala besar pula. Besar tidaknya usaha yang dimiliki oleh bakul ikan yang perlu dijadikan pertimbangan utama adalah ketersediaan modal. Besarnya modal berasal dari beberapa sumber yang dapat diperoleh dari bakul ikan.

Bakul ikan dalam membangun usahanya memperoleh modal dari beberapa sumber dan dengan jumlah tertentu. Semua lembaga keuangan yang memberikan peluang untuk memperoleh modal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal tersebut terkait dengan nilai dan ketentuan perolehan modal tersebut.

Satu unit yang ada di wilayah kerja KUD Tasikagung Rembang adalah Unit Permodalan Bakul Ikan (UPBI). UPBI merupakan sebuah unit pemberi modal khusus untuk para bakul ikan yang membutuhkan sejumlah modal baik untuk mengawali usaha maupun meningkatkan usaha yang telah ada. UPBI berada di bawah naungan KUD dan TPI Tasikagung Rembang dan berlokasi di TPI PPP Tasikagung Rembang.

Modal yang dibutuhkan oleh bakul ikan sejauh ini sudah memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga keuangan yang ada baik yang berasal dari lembaga keuangan daerah maupun swasta sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan modal bakul ikan. Kebutuhan modal yang seharusnya besar memang tidak dapat terpenuhi secara langsung tetapi dapat dilakukan secara bertahap.

Selain modal dari lembaga keuangan daerah, modal awal bakul ikan juga berasal dari modal pribadi. Beberapa bakul ikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa modal awal dari tabungan individu memang ada tetapi memang nilainya tidak begitu besar. Hal tersebut menjadi sebuah upaya individu untuk memulai sebuah usaha. Penggunaan strategi modal seperti ini berlaku untuk bakul ikan yang sekaligus menjual langsung mentah ikan kepada masyarakat lokal.

c. Pelaksanaan Peran Koperasi

Salah satu akyor yang memiliki peran adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Suroyo Mino Tasikagung Rembang. Perikanan tangkap yang ada di wilayah Kabupaten Rembang memiliki 3 (tiga) wilayah terbesar yaitu Kecamatan Kragan,

Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Rembang. Nelayan yang ada di ketiga wilayah tersebut didukung oleh KUD yang ada yaitu KUD Mina Rahayu (Kragan), KUD Miyoso Mardi Mino (Sarang), dan KUD Suroyo Mino (Tasikagung, Rembang). KUD yang utama adalah KUD Suroyo Mino yang ada di Desa Tasikagung dan masuk dalam wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang. Sedangkan KUD Mina Rahayu dan KUD Miyoso Mardi Mino merupakan pendukung tetapi memiliki peran yang aktif dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan tugas KUD di Kabupaten Rembang terutama KUD Suroyo Mino Tasikagung Rembang memiliki tanggungjawab pada pusat KUD yang terdapat di Provinsi yaitu wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah. Kerja KUD merupakan penunjang kinerja TPI. KUD mengelola keuangan dan segala kepentingan nelayan serta bakul ikan. Pelaksanaan koordinasi antara KUD dan TPI seluruhnya bertanggungjawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan tugasnya yaitu:

1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan.
2. Menyediakan Tempat Pelelangan ikan (TPI) beserta perlengkapannya.
3. Menetapkan Persyaratan dan Penggolongan kelas TPI.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Selanjutnya pelaksanaannya adalah Pusat KUD Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan.

2. Mengusahakan perkreditan Bakul untuk pemenuhan kebutuhan modal.
3. Meningkatkan hasil pungutan/retribusi hasil produksi perikanan.
4. Mengatur tata laksana dan mekanisme kerja TPI meliputi Organisasi, Administrasi, dan pengadaan barang-barang cetak.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan dan pengelolaan Tempat Pelalangan Ikan.
6. Menyampaikan laporan produksi dan keuangan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Biro Keuangan Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
7. Mengatur dan mengkoordinasikan KUD Suroyo Mino untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Setelah pelaksanaan yang dilakukan oleh KUD Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah kemudian pelaksanaan dilaksanakan oleh KUD yang ada di wilayah Kabupaten Rembang yaitu:

1. Membantu Pusat KUD Mina Baruna untuk kelancaran penyelenggaraan ekonomi sektor perikanan tangkap dan aktivitas TPI.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tata laksana kerja di TPI serta mengatasi dan melaoprkan hambatan-hambatan yang terjadi di TPI.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada karyawan TPI, Nelayan, dan Bakul ikan untuk lebih berperan serta guna kelancaran pelaksanaan TPI.
4. Menghimpun laporan-laporan dari TPI di wilayahnya dan selanjutnya mengirimkan ke Pusat KUD Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah.

5. Menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana TPI
6. Melaksanakan peningkatan pelayanan kepada nelayan, memperlancar penyampaian hak-haknya dan melaksanakan kegiatan lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan baik Provinsi maupun Kabupaten Rembang serta baik Pusat KUD maupun KUD yang ada di Kabupaten Rembang tidak hanya terkait dengan tugas dan tanggung jawab atau terkait dengan pemfasilitasan tetapi terkait juga dengan pengelolaan retribusi yang berasal dari hasil produksi setiap tahunnya.

Tabel 13. Alokasi Retribusi Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Rembang

Besaran	Uraian Alokasi
0,90%	Kasda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
0,95%	Kasda Pemerintah Kabupaten Rembang
1,65%	Pusat KUD Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah
1,50%	KUD Suroyo Mino Kabupaten Rembang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2014

Jumlah Keseluruhan alokasi retribusi produksi perikanan di Kabupaten Rembang adalah 5%. Alokasi yang diberikan kepada KUD Suroyo Mino selanjutnya di kelola untuk kebutuhan nelayan. Hasil alokasi yang diberikan kepada nelayan pada waktu tertentu. Pemberian hasil tersebut diberikan sebesar Rp.5000,- setiap jumlah Rp.1.000.000,- dari jumlah nominal produksi perikanan yang tercantum pada SPU KUD maupun SPU Dinlutkan. Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa pendapatan yang diperoleh KUD tidak serta merta kemudian

digunakan sepenuhnya tetapi adanya timbal balik kepada nelayan. Terkait dengan waktu pemberian uang tersebut juga dapat dimabil ketika masa paceklik atau masa disaat para nelayan tidak dapat melaut sehingga masih tetap memperoleh penghasilan meskipun sedikit.

d. Peran Lembaga Keuangan di Daerah

Bakul ikan dalam membangun usahanya memperoleh modal dari beberapa sumber dan dengan jumlah tertentu. Semua lembaga keuangan yang memberikan peluang untuk memperoleh modal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal tersebut terkait dengan nilai dan ketentuan perolehan modal tersebut. Satu unit yang ada di wilayah kerja KUD Tasikagung Rembang adalah Unit Permodalan Bakul Ikan (UPBI). UPBI merupakan sebuah unit pemberi modal khusus untuk para bakul ikan yang membutuhkan sejumlah modal baik untuk mengawali usaha maupun meningkatkan usaha yang telah ada. UPBI berada di bawah naungan KUD dan TPI Tasikagung Rembang dan berlokasi di TPI PPP Tasikagung Rembang. Modal yang dibutuhkan oleh bakul ikan sejauh ini sudah memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga keuangan yang ada baik yang berasal dari lembaga keuangan daerah maupun swasta sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan modal bakul ikan. Kebutuhan modal yang seharusnya besar memang tidak dapat terpenuhi secara langsung tetapi dapat dilakukan secara bertahap.

Aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal selain pemerintah dan masyarakat lokal adalah pada sektor swasta. Sektor ini sedikit banyak telah memberikan peran dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di

Kabupaten Rembang terutama di wilayah Desa Tasikagung Rembang. Aktor swasta yang terlibat pada hal ini adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud disini adalah Koperasi dan Perbankan baik swasta maupun perbankan daerah. Namun lembaga keuangan tersebut yang memiliki hubungan dan mendukung kegiatan perekonomian sektor perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Rembang khususnya di wilayah Desa Tasikagung Rembang.

Beberapa lembaga keuangan daerah tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BPD Jateng, dan beberapa koperasi yang ada. Lembaga keuangan swasta tersebut yang diketahui memberikan dukungan modal baik untuk pemilik kapal, bakul ikan, dan pemilik usaha perikanan. Lembaga keuangan swasta dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Desa Tasikagung tidak banyak namun tetap penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran swasta tetap ada menjadi bagian dari pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal guna mendukung kelancaran kegiatan perekonomian sektor perikanan tangkap. Meskipun peran swasta terlihat kecil namun masih tetap memiliki bagian dalam pengembangan ekonomi khususnya sektor modal.

e. Peran Perguruan Tinggi

Pelaksanaan pengembang sumberdaya ekonomi lokal tidak hanya terdapat peran pemerintah, masyarakat lokal, maupun swasta terdapat pula aktor lain yaitu dari perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di Kabupaten Rembang khususnya Desa Tasikagung baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Perguruan Tinggi tersebut diantaranya adalah Universitas Diponegoro (UNDIP)

Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, serta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Jawa Tengah. Peran beberapa perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah memberikan konsultasi dan bantuan perencanaan pembangunan perikanan.

Salah satu perguruan tinggi yang secara kelembagaan yang memiliki peran untuk pengembangn sektor perikanan tangkap di Kabupaten Rembang adalah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang telah mengadakan penyuluhan pada tanggal 2 November 2014 tentang keselamatan pelayaran dan kesehatan bagi nelayan tradisonal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang. Acara dibuka oleh Kepala PPP Tasikagung Rembang Bapak Sukoco, A.Pi. Berdasarkan sambutan kepala PPP Tasikagung Rembang mengucapkan banyak terima kasih kepada PIP Semarang yang telah memberikan penyuluhan diwilayah kerja PPP Tasikagung Rembang. yang mana penyuluhan ini memberikan dampak positif bagi nelayan, mengingat beberapa permasalahan yang pernah ada di Rembang disaat nelayan saat mencari ikan ditengah laut ada Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit tanpa mengerti penanganan pertama akan semakin membuat buruk kondisi kesehatan awak kapal yang sakit hingga ada juga yang meninggal dunia sebelum mendapat pertolongan. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini sangat penting yang turut serta memberikan pemahaman dan mencerdaskan masyarakat nelayan. Mengingat nelayan harus peduli dengan kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan penangkapan ikan yang memiliki risiko tinggi

Seluruh aktor/*stakeholder* yang telah memberikan peran dan kontribusi pada pengembangann sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan di Desa

Tasikagung. Berdasarkan peran tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pasti berkoordinasi dengan aktor yang lain. Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan informasi atas adanya program kegiatan yang dilakukan juga koordinasi tersebut dilakukan untuk melakukan tugas dan tanggungjawab tersebut secara bersama. Koordinasi tersebut didasarkan akan pada kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing aktor sehingga proses tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa bentuk koordinasi antar aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah koordinasi yang berbentuk horizontal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa masing-masing aktor saling memberikan kontribusi tanpa harus melalui stratifikasi perintah dari atasan kepada bawahan. Koordinasi yang dilakukan lebih kearah menjalin hubungan kerjasama yang baik antar aktor dalam mencapai tujuan secara optimal. Selain itu, koordinasi yang telah dilakukan lebih mengarah pada optimalisasi peran aktor dalam mendorong segenap dukungan baik infrastruktur, aksesibilitas pangsa pasar, dan mobilitas fisik serta ketersediaan modal untuk menunjang upaya pengembangan agar sesuai yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

a. Faktor Pendukung dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor Perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Adanya masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif pada bidang kelautan dan perikanan. Masyarakat tersebut yang meliputi nelayan, bakul ikan dan juga pengolah ikan. Masyarakat lokal yang juga disebut masyarakat perikanan dijadikan faktor pendukung karena dengan partisipasi masyarakat yang kuat maka upaya pengembangan sumberdaya ekonomi akan dapat berjalan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. Keberadaan masyarakat lokal yang terdiri dari nelayan, bakul ikan, hingga pengolah ikan menunjukkan integrasi dari hulu hingga kehilir ekonomi sektor perikanan terutama perikanan tangkap.
- 2) Adanya sarana penangkapan ikan, yang meliputi jumlah kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan selain itu juga terdapat fasilitas infrastruktur pelabuhan yang cukup memadai. Jumlah kapal dan alat tangkap yang ada memadai dan memiliki kapasitas baik dalam menjalankan proses penangkapan ikan.
- 3) Potensi untuk didatangi kapal dari daerah lain, seperti Juwana, Tegal, Pekalongan dan Batang. Potensi ini mengindikasikan bahwa kapal dari luar wilayah Kabupaten Rembang memperhitungkan kondisi TPI dan pelabuhan perikanan yang memadai. Selain Fasilitas fisik, pembayaran hasil penangkapan juga menjadi salah satu perhatian. Banyaknya kapal luar Kabupaten Rembang yang mendaratkan kapal dan menjual hasil perikanan di TPI Rembang mengindikasikan bahwa kondisi keuangan dalam keadaan stabil.

4) Upaya Pelestarian lingkungan untuk mendukung keseimbangan ekonomi sektor perikanan. Pengelolaan kawasan pesisir ini menjadi perhatian utama mengingat kawasan ini mengalami tingkat kerusakan yang cukup signifikan padahal sesungguhnya kawasan ini mempunyai peran besar dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan. Misalnya kawasan terumbu karang. Kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya serta berbiaknya beberapa jenis ikan. Sedangkan kawasan pantai atau mangrove menjadi kawasan untuk benih-benih ikan untuk tumbuh (*spawning*) sebelum kemudian mereka menuju ke laut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kawasan pesisir mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pelestarian sumberdaya alam. Kawasan pesisir ini dapat juga dikatakan meliputi pulau-pulau kecil dan kawasan terumbu karang, di mana kawasan ini berpotensi untuk pengembangan pada sektor perikanan. Sebagai contoh terumbu karang Pulau Marongan dan Pulau Gede. Terumbu karang sendiri merupakan koloni binatang dengan laju pertumbuhan antara 0,1 cm/tahun untuk karang cabang (*soft coral*). Keberadaan terumbu karang itu sendiri dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang laut, pencegah abrasi dan tempat hidup jenis ikan hias dan rumput laut.

Disamping kawasan terumbu karang, kawasan yang juga menjadi kawasan potensi konservasi adalah kawasan bakau, yang merupakan kawasan penting bagi beberapa jenis ikan untuk berkembang biak. Di samping itu dengan ditanamnya bakau di pantai perairan Rembang akan dapat mengurangi abrasi yang mungkin akan terjadi pada saat laut pasang dan ombak besar. Penanaman bakau ini terkait

erat dengan komunitas *mangrove*. Kabupaten Rembang memiliki komunitas *mangrove* yang cukup luas, yang tersebar di tiga wilayah kecamatan pantai, yaitu Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Di Kecamatan Kaliori, komunitas *mangrove* ini dapat ditemui di desa Tunggulsari dan desa Tambakagung dengan areal komunitas seluas 4,2 Ha dengan panjang hamparan hamparan sekitar 2 km dan tebal 2 m. Di Kecamatan Rembang, komunitas *mangrove* dapat dijumpai di Desa Kabongan Lor, Tireman dan Pasar Banggi dengan luas sekitar 15 Ha, dengan panjang hamparan 3 km dan rata-rata ketebalan 50 m. Sedangkan di Kecamatan Lasem, komunitas *mangrove* ini dapat ditemui di Desa Gedongmulyo, Dasun, Tasiksono dan Bonang dengan luas komunitas sekitar 5,6 Ha dengan panjang hamparan sekitar 2,8 km dan ketebalan 20 m

b. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor Perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang ini memiliki beberapa hambatan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus menangani sektor perikanan tangkap. Meskipun sektor perikanan merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Rembang ternyata belum ada inisiatif pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan pembentukan BUMD yang khusus untuk sektor perikanan tangkap.
- 2) Ketersediaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan nelayan yang belum mencukupi. Kebutuhan BBM untuk nelayan di wilayah

Tasikagung Rembang telah ditunjang oleh 3 (Tiga) buah SPBN khusus untuk memenuhi kebutuhan Solar nelayan. Namun yang terjadi adalah kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Setiap pertengahan bulan tanggal 14-18 pasti cadangan sudah habis sehingga harus membeli di luar wilayah.

3) Kesepakatan tidak formal yang sering dilakukan antar aktor yang menyebabkan seringnya masalah terulang kembali. Kesepakatan formal dimaksudkan untuk menjelasakn setiap keputusan yang dimabil sehingga tidak simpang siur informasi yang di dapatkan. Semua pihak yang melakukan kesepakatan tersebut juga memiliki pemahaman yang sama sehingga pelanggaran yang terjadi tidak terus menerus terulang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Tasikagung Rembang didukung oleh peran aktor yang memberikan peran dan kontribusi maksimal. Pelaksanaan Peran aktor dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Rembang:
 - a. Pemerintah Daerah adalah pelaksana pembangunan bidang kelautan dan perikanan di daerah adalah SKPD terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan. Berdasarkan penyediaan fasilitas berjalan baik, namun dalam hal regulasi, koordinasi, dan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan kurang.
 - b. Masyarakat lokal. Sejauh ini masyarakat lokal Desa Tasikagung Rembang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
 - c. Pelaku usaha lokal melakukan peran dalam pengelolaan dan pengolahan sumberdaya alam yang ada dengan baik sesuai dengan bentuk pengolahan yang diinginkan pasar. Pelaku usaha baru merupakan bagian dari masyarakat yang baru memulai unit usaha setelah pengembangan kawasan

mulai dilakukan. Inovasi dan kesadaran akan kebutuhan penunjang yang dibutuhkan masyarakat terlaksana dengan baik.

- d. Koperasi yang memiliki peran besar adalah Koperasi Unit Desa (KUD) serta Koperasi dalam bentuk unit penjamin modal yang memberikan kontribusi cukup besar dalam mengkoordinir ketersediaan modal dan pengelolaan keuangan nelayan dan bakul ikan.
 - e. Lembaga keuangan di daerah yang memiliki kontribusi peran diantaranya adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun koordinasi dengan koperasi dan swasta memberikan peran yang besar bagi masyarakat.
 - f. Perguruan Tinggi sedikit banyak telah menyumbang peran dan pemikiran dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di kawasan Minapolitan tersebut terutama bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis minapolitan perikanan tangkap di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah
- a. Faktor Pendukung diantaranya yaitu:
 1. Adanya masyarakat perikanan yang berperan aktif dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal beserta ketersediaan alat produksi yang telah memadai.
 2. Memiliki sarana penangkapan ikan yang memadai dan telah sesuai dengan zona penangkapan ikan. Termasuk didalamnya terkait dengan jumlah armada kapal dan alat tangkap yang dipergunakan.

3. Memiliki peluang/potensi untuk nelayan dari wilayah lain yang melakukan kegiatan di kawasan minapoltan Desa Tasikagung yang jelas akan memberikan keuntungan.
4. Adanya upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh wilayah sekitar Desa Tasikagung untuk menciptakan keseimbangan pelaksanaan pembangunan.
 - b. faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan sebagai berikut:
 1. Kabupaten Rembang belum memiliki BUMD khusus yang menangani bidang kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap.
 2. Ketersediaan Bahan bakar untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan masih belum maksimal mencukupi.
 3. Terjadinya kesepakatan yang tidak formal dalam penyelesaian permasalahan yang ada sehingga sering terjadi ketidaksepahaman hasil dan pengulangan kesalahan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pemerintah daerah untuk segera mengupayakan membuat *Masterplan* dalam bidang perikanan tangkap dan mengusulkan Desa Tasikagung sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap.
2. Segera dibentuk BUMD di daerah untuk menunjang berjalannya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sektor perikanan tangkap

sehingga segala bentuk unit usaha bidang perikanan tangkap dapat terakomodir dengan baik.

3. Koordinasi juga selalu ditingkatkan untuk menjaga komunikasi antar aktor untuk menghindari kesalahpahaman sekecil mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita,Rahardjo.2006.*Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin dan Beni Ahmad.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Annahar, Nasrun.2013. *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah*. Malang.Fakultas Ilmu administrasi.Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.2012. *Rembang Dalam Angka (RDA) 2012*:BPS Rembang.
- Blakely, Edward J.1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*.California,USA:Sage Publication,Inc.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jateng.2014. *Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah (2005-2009)*. Diakses Melalui <http://www.dislutkan.jatengprov.go.id>
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin.2006.*Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*.Malang: Agritek YPN
- Kamaluddin, Laode M.2002.*Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makmur,Mochamad.2003.*Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik Baru*.Malang:Medio
- Mindarti,Lely Indah.2007.*Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan Dan Teori Dasar*.Malang:Bayumedia Publishing.
- Moleong, J.Lexy.2007.*Metodepenelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Musiyam,Muhammad.2011.*Model Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kabupaten Pacitan*.Surakarta.Universitas Muhammadiyah Surakarta.2011.
- Pamudji,.1987.*Ekologi Administrasi Negara*.Jakarta:Bina Aksara

- Rasyid, M. Ryaas. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Said,Abdullah.2012.*Memperkenalkan Pentingnya LERD*.Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan substantif *Local Economic Resources Development (LERD)*, Malang,2012.
- Said,Abdullah.2014. *Pengembangan Potensi Sumber-Sumber Ekonomi Daerah*.
- Siagian, P. Sondang, 2001, *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sunoto,2010.*Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan Di Indonesia*.
- Suryono,Agus.2010.*Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*.Malang:UB Press
- Tarigan, Robinson.2005.*Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*.Jakarta:Bumi Aksara
- Tjokrowinoto,Moeljarto.1996.*Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*.Yogyakarta:Tiara Wacana
- Ulum,Saiful.2013.*Analisis Peran Multi aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan berbasis Sustainable Development*.Malang.Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Wiadnya, Dewa Gede Raka.2011. *Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah*. Makalah disajikan pada Workshop Penyiapan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang di Kabupaten Tematik – diselenggarakan tanggal: 22 – 23 November 2011 di Kampus Institut Teknologi Malang.
- _____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- _____,Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per12/Men/2010 Tentang Minapolitan
- _____,Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan

- _____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep34/Men/2013 Tentang Penetapan kawasan Minapolitan
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015
- _____, Ringkasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Zumrotul Ainiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 01 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : Sarjana Administrasi Publik
(SAP) Universitas Brawijaya
Malang
Alamat Sekarang : Desa Tegal Mulyo Rt.05/II Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59273
Telepon : 087833012023
Motto Hidup : Usaha dan Doa Menjadi Jawaban Setiap Tantangan



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 1 Kragan (1999-2004)
SMP N 1 Kragan (2005-2008)
SMA N 1 Rembang (2009-2011)
Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi (2011-2015)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Bidang Penelitian *Research Study Club* (RSC) FIA UB 2012
2. Anggota Biasa *Research Study Club* (RSC) FIA UB
3. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) FIA UB 2013
4. Sekretaris Umum Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB 2013

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Bendahara Pelaksana Diklat RSC FIA UB 2012
2. Bendahara Pelaksana II *Training Organization* (TO) RSC FIA UB 2013
3. Panitia Pemilihan Presiden BEM dan DPM FIA UB 2013
4. Panitia *Workshop* Penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Pelatihan GIS LKP3 FIA UB 2014

PENGALAMAN PRESTASI

1. Juara 2 Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT)
Maba FIA UB 2011
2. Peserta Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT)
Mahasiswa Baru UB 2011
3. Peserta Lomba Penulisan Karya Ilmiah Dintanhut Provinsi Jawa Timur
2012

